Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, MA

Kapita Selekta
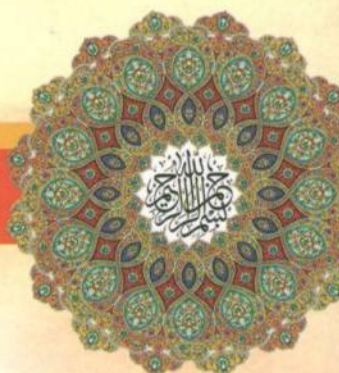
Pendidikan Islam di Indonesia

KAPITA SELEKTA

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

KAPITA SELEKTA

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Penulis:
Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, MA.

Editor:
Sahkholid Nasution, S.Ag., MA.

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

Kapita Selekta
PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Penulis: Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, MA.

Editor: Sahkholid Nasution, S.Ag., MA.

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING
(Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana)
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Nopember 2012

ISBN 978-602-8935-97-5

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, atas segala anugerah, nikmat dan izin-Nya jualah buku yang ada ditangan pembaca ini dapat diterbitkan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kepribadiannya menjadi suri tauladan buat semua umat. Semoga kita semua dapat meneladani Beliau agar selamat dunia akhirat.

Buku yang ada ditangan pembaca ini diberi judul: *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*. Dari judul tersebut dapat dipahami bahwa isinya terdiri dari topik-topik terpilih yang banyak membahas dan mengungkap seputar persoalan-persoalan pendidikan Islam di Indonesia, baik berbentuk lembaga maupun pemikiran pendidikan Islam.

Topik-topik yang dikemukakan dalam buku ini adalah tulisan-tulisan yang pernah dikemukakan dalam berbagai seminar dan diskusi, dan telah mendapat tanggapan dari *audience*, kemudian diperbaiki sesuai kebutuhan. Seterusnya diedit dan disajikan dalam buku seperti yang ada ditangan pembaca saat ini.

Kandungan buku ini meliputi enam bab: *Pertama*, Konsep, Hikikat dan Problematika Pendidikan Islam; *Kedua*, Pendidikan Islam Di Indonesia; *Ketiga*, Pembaharuan Pendidikan di Dunia Islam dan Indonesia; *Keempat*, Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Tantangan Globaliasi, *Kelima*, Pendidikan Agama dalam Prespektif Multi Kultural di Indonesia; Dan *Keemam*, tentang Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia.

Kehadiran pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu kunci sukses terlaksananya Islamisasi di Indonesia. Perubahan agama dan kepercayaan bangsa Indonesia dari pemeluk agama Hindu, Budha dan Anismisme menjadi pemeluk Islam, tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari pendidikan Islam. Para sejarawan telah mengungkapkan bahwa banyak jalur-jalur Islamisasi di Indonesia: seperti perdagangan, pernikahan, kesenian dan pendidikan.

Apabila dicermati dengan seksama, bahwa kaitan pendidikan Islam dengan Islamisasi di Indonesia sangat erat, bahkan mungkin jalur pendidikanlah yang paling dominan di antara jalur-jalur tersebut dalam proses Islamisasi di Indonesia. Apa sebab?, karena lewat pendidikanlah kehidupan beragama masyarakat Indonesia terbina dan agama Islam tersebar dengan cepat di Indonesia.

Di dalam membicarakan pendidikan Islam di Indonesia dapat dilihat dari dua aspek; *pertama*, aspek kelembagaan, dan *kedua*, aspek pemikiran. Pada aspek kelembagaan terdapat aspek kelembagaan formal, nonformal dan informal. Sedangkan pada aspek pemikiran akan muncul pembahasan diseputar ide-ide dan gagasan-gagasan sekitar pendidikan Islam. Aspek

kelembagaan pendidikan formal mencakup lembaga pendidikan pesantren, sekolah, madrasah dan pendidikan Tinggi. Dinamika dan problematika serta solusi pendidikan Islam di Indonesia diantaranya perlu dideskripsikan dan akan penulis uraikan dalam buku ini.

Dinamika pendidikan Islam di Indonesia dapat dilihat dari fase-fase perkembangan pendidikan Islam yang dimulai dari fase *pertama*, sejak masuknya pendidikan Islam ke Indonesia sampai munculnya ide-ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Fase *kedua*, sejak munculnya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia pada awal abad keduapuluh, sampai kepada era kemerdekaan. Dan fase *ketiga* sejak Indonesia merdeka hingga saat sekarang ini.

Fase *pertama*, adalah sejak kedatangan Islam ke Indonesia yang dimulai dari pendidikan Islam informal dalam bentuk kontak-kontak pribadi antara pedagang yang merangkap sebagai *muballigh* dengan masyarakat sekitar sehingga terbentuklah masyarakat muslim. Setelah itu, muncul pendidikan nonformal di masjid-masjid, surau dan langgar, seterusnya muncul lembaga pesantren, sekolah, madrasah yang bentuknya formal. Fase *kedua,* adalah fase pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, diawali dengan kepulangan para pelajar Indonesia yang belajar di Timur Tengah pada awal abad keduapuluh.

Kedatangan mereka kembali ke Tanah Air membawa udara segar dengan munculnya ide-ide pembaharuan. Muncullah lembaga pendidikan Islam yang bernama madrasah. Di madrasah diajarkan pengetahuan agama dan umum berbeda dengan apa yang diajarkan di pesantren pada waktu itu hanya meng-

ajarkan pengetahuan agama saja yang bersumber dari kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Para pembaharu sangat berkepentingan agar diterapkan ide-ide pembaharuan di lingkungan lembaga pendidikan, karena menurut mereka inilah salah satu upaya guna memajukan umat Islam yang saat itu hidup dalam keterbelakangan.

Fase *ketiga*, adalah sesudah diundangkannya undang-undang pendidikan. Undang-undang pendidikan yang pertama sekali dikeluarkan adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 yakni Undang-Undang tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran. Undang-Undang tersebut ditinjaklanjuti dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1954. Pada undang-undang ini telah dimasukkan masalah pendidikan agama. Kemudian muncul berbagai undang-undang pendidikan lainnya sebelum lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Pada tahun 2003 dikeluarkan pula Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003. Di pandang dari sudut kedekatan Undang-Undang ini dengan pendidikan Islam, dapat dilihat, bahwa Undang-Undang No.20 Tahun 2003 sangat dekat dengan pendidikan Islam.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, terlihat secara eksplisit tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam. Misalnya pada Pasal 17 dan 18 disebutkan bahwa madrasah mulai tingkat dasar sampai tingkat menengah. Pasal 28 membicarakan tentang Pendidikan Anak Usia Dini dengan mencantumkan istilah Raudatul Athfal (RA). Pasal 30 mengemukakan tentang pendidikan keagamaan mencakup di dalamnya tentang pesantren dan diniyah.

Dalam rentang kurun waktu yang begitu panjang perlulah dideskripsikan pendidikan Islam tersebut baik ditinjau dari sudut lembaga maupun pemikiran. Untuk mendeskripsikan itu perlu dituangkan dalam sebuah buku yang diberi judul "*Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*." Penulis menyadari betul bahwa banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam yang perlu dideskripsikan. Namun, karena keterbatasan waktu dan kesempetan, dalam buku ini hanya dapat dideskripsikan sebagian kecil saja.

Seiring dengan itu, penulis mengaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi sehingga buku ini bisa terbit. Terutama kepada saudara **Sahkholid Nasution, MA.** yang bersedia meluangkan waktu untuk mengedit naskah ini. Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Rektor IAIN Sumatera Utara Medan dan seluruh jajarannya, yang telah membantu pembiayaan pencetakan buku ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran konstruktif dari semua pembaca sangat penulis nantikan, demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini dikemudian hari.

Medan, 26 Maret 2012

Penulis,

Haidar Putra Daulay

DAFTAR ISI

Pengantar penulis v
Daftar isi x

BAB I:

KONSEP, DASAR, TUJUAN, ASPEK DAN HAKIKAT SERTA PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA 1

A. Konsep Pendidikan Islam 1
B. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam 3
C. Aspek-Aspek Pendidikan Islam 4
D. Upaya Merealisasikan Konsep Pendidikan Islam . 6
E. Hakikat Pendidikan Islam 7
F. Problematika Pendidikan Islam di Indonesia 11
G. Idealisasi Pendidikan Islam 13

BAB II:

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA 17

A. Dimensi Historis dan Filosofis 17
B. Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia 20
C. Kedudukan Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 28
D. Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia 44

BAB III:

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN DI DUNIA ISLAM DAN INDONESIA 52

A. Keterpurukan Pendidikan Islam 52
B. Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia 55
C. Madrasah dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia 80

BAB IV:

REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DAN TANTANGAN GLOBALISASI 113

A. Pengertian Reformasi Pendidikan Islam 113
B. Urgensi Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani dan Manusia Indonesia Seutuhnya.. 117
C. Era Globalisasi dan Tantangan Terhadap Pendidikan Islam 124
D. Inovasi Pendidikan Islam Di Era Globalisasi 129

BAB V:
PENDIDIKAN AGAMA DALAM PRESPEKTIF MULTI KULTURAL DI INDONESIA 143
A. Masyarakat Majemuk 145
B. Pendidikan Agama Islam di Indonesia 146
C. Pendidikan Multikultural 148
D. Hubungan Pendidikan Agama dan Pendidikan Multikultural 151

BAB VI:
PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA 156
A. Peranan Pendidikan Tinggi dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia ... 156
B. Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia 162
C. Pembidangan Ilmu Pada Perguruan Tinggi Agama Islam 169
D. Memberdayakan Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi 187
E. Peranan Etika Akademik di Perguruan Tinggi dalam Membentuk Sikap Ilmiah 197

Daftar Kepustakaan 208
Tentang Penulis 214
Tentang Editor 216

BAB I

KONSEP, DASAR, TUJUAN, ASPEK DAN HAKIKAT SERTA PROBELAMATIKA PENDIDIKAN ISLAM

A. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniyah maupun ruhaniyah, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia dan alam semesta.

Pendidikan Islam bertolak dari pandangan Islam tentang manusia. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai dua fungsi yang sekaligus mencakup dua tugas pokok pula. Fungsi *pertama*, manusia sebagai Khalifah Allah di bumi, makna ini mengandung arti bahwa manusia diberi amanah untuk memelihara, merawat, memanfaatkan

serta melestarikan alam raya. Fungsi *kedua*, manusia adalah makhluk Allah yang diberi tugas untuk menyembah dan mengabdi kepada-Nya. Selain itu, manusia adalah makhluk yang memilik potensi lahir dan bathin. Potensi lahir adalah unsur fisik yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan potensi bathin adalah unsur bathin yang dimiliki manusia yang dapat dikembangkan ke arah kesempurnaan.

Berdasarkan konsep Islam tentang manusia tersebutlah yang diaplikasikan ke dalam konsep pendidikan Islam, yang dalam kaitan ini kelihatan sesungguhnya pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang berkeseimbangan.

Dalam Konfrensi Pendidikan Islam disebutkan bahwa defisini pendidikan adalah : *"Education should aim at the balanced growth of the total personality of Man through the training of Man's spirit, intellect, the rational self, feelings and bodily senses. Education should there Cater for fgroudth of man in all aspects: Spritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic booth individually and collectively and motivate. All Thes aspekcts to words goodness and the attainment of perfection. The ultimate aim of Muslim education lies in the realization of complete submission to Allah. On the level of individual, the community and humanity at large".* (*Conference on Muslim Education* : 4).

Prinsip keseimbangan pendidikan Islam tersebut menjadi ciri khas pendidikan Islam. Keseimbangan antara jasmani-rohani, individu-masyarakat, dunia-akhirat, dan intelktual-emosional.

B. DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM

Dasar pendidikan Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Di atas kedua pilar inilah dibangun konsep dasar pendidikan Islam. Titik tolaknya dimulai dari konsep manusia menurut Islam. Manusia yang bagaimana yang dicita-citakan oleh Islam tersebut. Hal ini harus tergambar dalam tujuan. Kemudian baru muncul upaya apa yang dilakukan dalam rangka mencapai konsep tersebut. Dari situ lahirlah materi apa yang akan diberikan untuk mencapai tujuan yang dikemas dalam kurikulum dan silabus. Setelah itu, bagaimana menyampaikan materi tersebut, maka muncullah metode pembelajaran. Agar metode itu efektif dan efisien, diperlukan pula sarana dan fasilitas. Selanjutnya untuk mengukur apakah yang disampaikan itu telah dapat dipahami peserta didik atau sejauh mana daya serapnya terhadap materi yang diberikan maka diperlukan evaluasi.

Tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah SWT. dan sebagai *'Abdu* Allah. Rincian-rincian itu telah diuraikan oleh banyak pakar pendidikan Islam. Di antaranya adalah 'Atiyah Al-Abrâsyi, mengemukakan rincian aplikasi dari tujuan pendidikan Islam tersebut sebagai berikut:

1. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia;
2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat;
3. Menumbuhkan ruh ilmiyah *(scientific spirit)*;
4. Menyiapkan peserta didik dari segi profesional;
5. Persiapan untuk mencari rezki. (Al-Abrâsyi, 1975 : 22-25).

Sedangkan As-Syaibâny mengemukakan tujuan pendidikan Islam itu adalah persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat (As-Syaibâny, 1975 : 292). Abdurrahman Shaleh Abdullah (selanjutnya disebut Abdullah) menyebutkan ada tiga tujuan pokok dari pendidikan Islam: physical aims *(ahdâf jismiyyah)*, spritual aims (*ahdâf ruhiyyah*) dan mental aims (*ahdâf 'aqliyyah*) (Abdullah, 119).

Konferensi Pendidikan Islam Internasional juga mengemukakan tentang tujuan pendidikan Islam, yaitu: "*The aim of Muslim education is the creation of the good and righteous man who worship Allah in the true sense of the term, build up the structure of his earthly life according to the syari'ah (law) and employs it to subserve his faith* (*Conference on Muslim Education*: 4).

C. ASPEK-ASPEK PENDIDIKAN ISLAM

Di pandang dari sudut potensi manusia yang terdiri dari dua macam, yakni potensi lahir dan potensi bathin, maka dapat dilihat ada beberapa hal aspek yang perlu dikembangkan. *Pertama*, aspek pendidikan fisik manusia. *Kedua*, aspek pendidikan ruhani manusia yang meliputi aspek pikiran dan perasaan manusia. Sedangkan manusia ditinjau dari segi fungsinya sebagai khlalifah, maka aspek yang perlu dikembangkan adalah aspek pemahaman, penguasaan dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam raya. Berkenaan dengan itu, maka perlu dikembangkan aspek pendidikan ilmu pengetahuan dan aspek pendidikan moral serta aspek keterampilan pengelolaan alam raya. Ditinjau dari segi fungsi manusia sebagai hamba (*'abd*), maka aspek yang penting untuk dididik adalah aspek pendidikan ketuhanan.

Berdasarkan alur pikir yang dibangun di atas, maka aspek-aspek pendidikan yang perlu ditanamkan kepada manusia itu menurut konsep pendidikan Islam adalah :

1. Aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak;
2. Aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan serta keterampilan;
3. Aspek pendidikan fisik;
4. Aspek pendidikan kejiwaan;
5. Aspek pendidkan keindahan (Seni);
6. Aspek Pendidikan Keterampilan;
7. Aspek Sosial.

Aspek pendidikan ketuhanan adalah penanaman jiwa beragama yang kokoh meliputi akidah Islam dalam arti yang sesungguhnya dan mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Pendidikan moral (akhlak) mewujudkan sifat dan tingkah laku terpuji serta menjauhi tingkah laku tercela. Pendidikan akal, ilmu pengetahuan dan keterampilan, berkaitan dengan pencerdasan akal, membekali peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan baik *perennial knowledge* maupun *acquired knowledge*. Sedangkan pendidikan keterampilan adalah membentukan kecakapan-kecakapan khusus bagi peserta didik. Pendidikan fisik, berkaitan dengan organ-organ jasmaniah, mengembangkan dan memeliharanya sebagai amanah yang diberikan Allah SWT, agar manusia hidup dalam keadaan sehat untuk dapat dipergunakan sebagai sarana mengabdi

kepada Allah SWT. Aspek pendidikan kejiwaan intinya adalah agar setiap peserta didik memilki jiwa yang sehat terhindar dari segala macam penyakit kejiwaan. Berkenaan dengan itu, agar seseorang dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan.

Aspek pendidikan sosial berkenaan dengan bagaimana membangun hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan individu dan masyarakat dengan masyarakat.

D. UPAYA MEREALISASIKAN KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

Untuk merealisasikan konsep pendidikan Islam, diperlukan perencanaan pendidikan yang meliputi; *Pertama*, kelembagaan, *kedua* kurikulum, *ketiga* manajemen, *keempat* pendidik, *kelima* peserta didik, *keenam* alat.

Pendidikan Islam ditinjau dari segi kelembagaan mengandung makna bahwa kelembagaan pendidikan Islam itu adalah kelembagaan yang menekankan upaya agar dapat merealisasi seluruh aspek-aspek pendidikan Islam yang telah disebutkan terdahulu, terutama pada pendidikan formalnya. Adapun pada pendidikan nonformal dan informalnya dapat memberi tekanan kepada beberapa aspek tertuntu, misalnya aspek pendidikan ketuhanan atau aspek pendidikan keterampilan dan seterusnya.

Tinjauan dari sudut kurikulum, pendidikan Islam harus mampu merencanakan untuk memuat berbagai aspek pendidikan Islam dalam rancangannya, yang kemudian diuraikan dalam bentuk mata pelajaran, silabus GBPP, evaluasi dan seterusnya, yang tujuannya adalah untuk meraih berbagai aspek tersebut di atas.

Manajemen pendidikan adalah upaya untuk memberdayakan operasional pendidikan. Sulit dibayangkan jika suatu opersional pendidikan bisa berjalan dengan baik tanpa manajemen.

Pendidik adalah orang yang secara langsung bertanggung jawab untuk membawa peserta didik ke arah yang dicita-citakan. Seorang pendidik memiliki tanggung jawab yang besar. Untuk itu, diperlukan beberapa kompetensi pokok. *Pertama*, kompetensi keilmuan, seorang pendidik mesti memilki ilmu yang kadarnya dia layak untuk mengajar pada tingkat dan program tertentu. *Kedua*, kompetensi keterampilam mengkomunikasikan keilmuan, dan *ketiga* kompetensi moral akademik.

Peserta didik, adalah orang yang akan diajar, dibimbing, dilatih ke arah tujuan yang ingin diraih. Sementara alat pendidikan ada dua: alat yang bersifat fisik, yaitu sarana dan fasilitas yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya alat yang bersifat non-fisik yaitu segala upaya yang bersifat edukatif guna mencapai tujuan pendidikan, seperti hukuman (*punishment*), hadiah (*reward*), suruhan, larangan, dorongan, dan lain sebagainya.

E. HAKIKAT PENDIDIKAN ISLAM

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi

muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk *jasmaniah* maupun *rohaniah*, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta. Dengan demikian, pendidikan Islam berupaya mengembangkan individu sepenuhnya, maka sudah sewajarnyalah untuk memahami hakekat pendidikan Islam bertolak dari pemahaman terhadap konsep manusia menurut Islam.

Atas dasar itulah hakikat pendidikan berperan mengembangkan potensi manusia semaksimal mungkin. Bertolak dari potensi manusia tersebut juga maka paling tidak ada beberapa aspek pendidikan yang perlu dididikkan kepada manusia yaitu aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak, aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan. Pendidikan kejasmanian, kemasyarakatan, kejiwaan, keindahan dan keterampilan. Kesemuanya diaplikasikan secara seimbang.

Dilihat dari sudut fungsi manusia di bumi sebagai khalifah Allah SWT dan sebagai *'abd*, dipandang sebagai perwujudan dari keseimbangan. Keseimbangan antara kehidupan dunia dan *ukhrawi*nya. Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, keseimbangan antara individu dan sosial. Fungsi kekhalifahan sebagai perwujudan dari peran manusia di bumi untuk mengolah dan memanfaatkan alam semesta untuk kemaslahatan mereka. Sedangkan fungsi *'abd* adalah penghambaan dan kepatuhan serta penyerahan diri kepada Allah SWT.

Dari berbagai argumen dan pikiran di atas terlihatlah bahwa sesungguhnya pendidikan Islam itu adalah upaya untuk memanusiakan manusia dengan arti sebenarnya yang di dalamnya

sudah tercakup pembentukan manusia yang beradab yang pada gilirannya menuju kepada terbentuknya pribadi insan kamil.

Al-Qur'an meletakkan kedudukan manusia sebagai Khalifah Allah SWT di bumi (Lihat: Al-Baqarah,2: 30). Esensi makna khalifah adalah orang yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin alam. Dalam hal ini manusia bertugas untuk memelihara dan memanfaatkan alam guna mendatangkan kemaslahatan bagi semesta.

Agar manusia dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah secara maksimal, maka sudah semestinyalah manusia memiliki potensi yang menopangnya untuk terwujudnya jabatan khalifah tersebut. Potensi itu meliputi; potensi jasmani dan rohani.

Potensi jasmani adalah meliputi seluruh organ jasmaniah yang berwujud nyata. Sedangkan potensi rohaniah bersifat spiritual, yang menurut Hasan Langgulung terdiri dari fitrah, ruh, kemauan bebas dan akal. (Langgulung, 1986: 57-58). Sedangkan Asy-Syaibani menyatakan, bahwa manusia memiliki potensi yang meliputi badan, akal dan ruh. Ketiga-tiganya persis segitiga yang sama panjang sisi-sisinya. (Asy-Syaibani, 1979: 92) Selanjutnya, Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa potensi spiritual manusia meliputi dimensi: akidah, akal, akhlak, perasaan (hati), keindahan, dan dimensi sosial. (Daradjat, 1984: 2-3).

Selain itu, Al-Qur'an juga menjelaskan tentang potensi rohaniah lainnya, yakni *al-Qalb*, *al-Fuâd*, *an-Nafs*. Dengan bermodalkan potensi-potensi yang dimilikinya itulah manusia

merealisasi fungsinya sebagai Khalifah Allah di bumi yang bertugas untuk memakmurkannya.

Untuk terciptanya kedua fungsi tersebut yang terintegrasi dalam diri pribadi muslim, maka diperlukan konsep pendidikan yang komprehensif yang dapat menghantarkan pribadi muslim kepada tujuan akhir pendidikan yang ingin dicapai.

Agar peserta didik dapat mencapai tujuan akhir (*ultimate aim*) pendidikan Islam, maka suatu permasalahan pokok yang sangat perlu mendapat perhatian adalah penyusunan rancangan program pendidikan yang dijabarkan dalam kurikulum. Pengertian kurikulum dalam tulisan ini adalah segala kegiatan dan pengalaman pendidikan yang dirancang dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan bagi peserta didiknya, baik di dalam maupun di luar sekolah dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Berpedoman kepada ruang lingkup pendidikan Islam yang ingin dicapai, maka kurikulum pendidikan Islam itu berorientasi kepada tiga hal, yaitu :

1. Tercapai tujuan *hablum minallâh* (hubungan dengan Allah)
2. Tercapai tujuan *hablum minannâs* (hubungan dengan manusia)
3. Tercapai tujuan *hablum minal'âlam* (hubungan dengan alam).

Para ahli pendidikan Islam seperti Al-Abrâsyi, An-Nahlâwi, Al-Jamâli, As-Syaibâni, Al-Ainâni, masing-masing mereka telah memperinci tujuan akhir pendidikan Islam yang pada

prinsipnya tetap berorientasi kepada ketiga komponen di atas.

F. PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Menurut hemat penulis ada tiga permasalahan pokok problematika pendidikan Islam di Indonesia. Dari ketiga problem itu melahirkan beberapa problema lainnya yang apabila dikaji berpangkal dari ketiga problem tersebut.

1. Strukural

Secara struktural lembaga-lembaga pendidikan Islam Negeri berada langsung dibawah kontrol dan kendali Kementerian Agama, termasuk pembiayaan dan pendanaannya. Problema yang timbul adalah alokasi dana yang dikelola oleh Kementerian Agama selain kecil juga dipergunakan untuk membiayai berbagai sektor di lingkungan Kementerian Agama termasuk pembiayaan pendidikan. Akibatnya alokasi pendanaan bagi lembaga pendidikan yang berada dibawah Kementerian Agama sangat terbatas. Dampaknya kekurangan fasilitas dan peralatan dan juga terbatasnya upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kegiatan-kegiatan non fisik. Idealnya pendanaan pendidikan ini tidak melihat kepada struktural tetapi melihat kepada *cost per* siswa atau mahasiswa.

Berkenaan dengan masalah struktural ini juga lembaga-lembaga pendidikan Islam akan dihadapkan pula dengan persoalan diberlakukannya UU. No. 2 Tahun 1999 yakni tentang Otonomi Daerah. Bagaimana kebijakan Kementerian Agama

tentang hal ini?. Disatu sisi masalah pendidikan termasuk salah satu dari bagian yang pengelolaannya diserahkan ke daerah, sedangkan masalah agama tetap berada pengelolaannya di pusat.

Sehubungan dengan itu, perlu dikaji secara cermat dan arif dalam melahirkan kebijakan yang tetap mempertahankan eksistensi lembaga pendidikan Islam dan juga perlakuan yang adil dan merata dari segi pendalaman.

2. Kultural

Lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah banyak yang menganggapnya sebagai lembaga pendidikan "kelas dua". Sehingga persepsi ini mempengaruhi masyarakat muslim untuk memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan tersebut. Pandangan yang menganggap lembaga pendidikan Islam tersebut sebagai lembaga pendidikan "kelas dua" juga mungkin ada kebenarannya. Indikasinya mungkin dapat dilihat dari *output*-nya, gurunya, sarana dan fasilitas yang terbatas. Dampaknya adalah jarangnya masyarakat muslim yang terdidik dan berpenghasilan yang baik, serta yang memiliki kedudukan/jabatan, memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut di atas.

3. Sumber Daya Manusia

Para pengelola dan pelaksana pendidikan di lembaga pendidikan Islam yang terdiri dari guru dan tenaga administrasi perlu ditingkatkan. Tenaga guru dari segi jumlah dan profesional masih kurang. Guru-guru bidang studi umum (Matematika, IPA, Biologi, Kimia dan lain-lain) masih belum mencukupi. Hal ini sangat berdampak terhadap *output*-nya.

G. IDEALISASI PENDIDIKAN ISLAM

Bertitik tolak dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa hakikat yang sesungguhnya dari pendidikan Islam itu, adalah pendidikan yang memperhatikan pengembangan seluruh aspek-aspek manusia dalam suatu kesatuan yang utuh tanpa kompartementalisasi, tanpa terjadinya dikotomis. Pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, seperti yang pernah dilakukan oleh sebagian umat Islam, tentulah tidak sesuai dengan konsep pendidikan. Pemisahan yang seperti itu, dijadikan landasan pemikiran oleh Konferensi Dunia tentang pendidikan Islam untuk dirubah.

> *"And that thera exists at present a regrettable dichotomy in education the Muslim World, one system, namely, religious education being completely divorced from the secular sciences and secular education being equally divorced from religion, althought such compratmentalization was contrary to the true Islamic concept of education and made it impossible for the products of either system to represent Islam as a comprehensive and integrated vision of life". (Conference on Muslim Education: 1)*

Melihat masa depan yang akan datang yang penuh dengan tantangan, sudah barang tentu tidak bisa menyelesaikan per-masalahan jika pendidikan Islam tersebut masih terikat kepada dikotomi. Berkenaan dengan itu perlu diprogramkan upaya pencapaiannya, mobilisasi pendidikan Islam tersebut. Untuk itu paling tidak perlu dirancang:

1. Rancangan Kurikulum

Sesuai dengan hakekat kurikulum pendidikan Islam, maka rancangan kurikulum pendidikan Islam yang ideal adalah mencakup seluruh aspek yang terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam. Setiap aspek dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Dalam bidang keilmuan dirumuskan upaya pengintegrasian antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Penyatuan itu tidak hanya mencakup masalah memasukkan mata pelajaran agama ke sekolah-sekolah umum dan mata pelajaran umum ke pesantren dan madrasah, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah rancangan dari kedua jenis ilmu itu agar ada saling keterkaitannya. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan:

a. Merancang keterkaitan ilmu-ilmu agama dan umum. Materi pelajaran agama tidak hanya berdiri sendiri, dari materi ilmu-ilmu agama dapat dikaitkan dengan ilmu sosial, humaniora dan ilmu-ilmu kealaman.

b. Merancang nilai-nilai Islami pada setiap mata pelajaran. Adanya keterkaitan ilmu-ilmu tersebut dengan nilai-nilai Islam. Dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dengan ajaran Islam, dapat dilakukan dengan cara:

   1) Mengimplikasikan nilai-nilai Islam ke dalam setiap mata pelajaran;

   2) Merancang konsep-konsep Islam untuk disiplin ilmu, misalnya Islam untuk pengetahuan sosial, Islam untuk kesenian dan sebagainya;

   3) Menggali konsep-konsep Islam dalam berbagai bidang ilmu. Seperti konsep-konsep Islam dalam bidang ilmu sosial, humaniora dan ilmu kealaman.

Dalam rangka merealisasikan semua aspek pendidikan Islam tersebut, perlu dirancang keterpaduan antara pendidikan di sekolah, di rumah dan di masyarakat dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demikian, peserta didik selalu berada dalam suasana pendidikan walaupun dia berada di luar sekolah. Disinilah ditampilkan tentang terlaksananya dengan baik intra kurikuler, kokurikuler, ekstra kurikuler dan hidden kurikuler.

2. Pendidik

Pendidik adalah salah satu faktor pendidikan yang amat penting. Terlaksana atau tidaknya dengan baik program pendidikan, banyak ditentukan oleh faktor pendidik. Salah satu tuntutan yang amat penting bagi pendidik - guru, orang tua murid, pemimpin, masyarakat - adalah agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan program kurikulum pendidikan Islam. Pendidik merupakan "cermin" dimana peserta didik selalu "berkaca". Seluruh tingkah laku pendidik selalu dalam pengamatan peserta didik. Penampilan pendidik yang meyakini kemampaunnya dan sekaligus menumbuhkan kepercayaan peserta didik itu penting maknanya.

Tenaga pendidik pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, juga berfungsi sebagai pendidik agama, kendatipun secara formal dia bukan mengajarkan mata pelajaran agama. Lewat mata pelajaran yang diajarkannya, dia bisa memimplisitkan nilai-nilai Islami. Lebih dari itu, yang amat penting adalah tercerminnya nilai-nilai Islami dalam seluruh tingkah laku pendidik. Karena itulah, personifikasi pendidik di lembaga-

lembaga pendidikan Islam, sangat dituntut memiliki jiwa keislaman yang tinggi.

3. Lembaga-lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam yang ideal adalah lembaga pendidikan yang dapat merealisasi konsep kurikulum pendidikan Islam seutuhnya. Beberapa lembaga pendidikan Islam yang ada sekarang ini dapat dijadikan alternatif sepanjang lembaga tersebut dapat merealisasikan konsep kurikulum pendidikan Islam, dengan persyaratan sekurang-kurangnya :

a. Memprogramkan seluruh aspek-aspek kurikulum pendidikan Islam;
b. Merencanakan konsep pelarutan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum dan diprogramkan suasana islami, baik dalam bentuk pergaulan sehari-hari, ibadah, pakaian dan sebagainya yang melambangkan iklim keislaman;
c. Merancang materi bidang studi ilmu agama yang memungkinkan peserta didik memiliki landasan ilmu agama untuk bisa dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi atau untuk terjun ke masyarakat.

BAB II

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

A. DIMENSI HISTORIS DAN FILOSOFIS

Pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak-kontak pribadi maupun kolektif antara *muballigh* (pendidik) dengan peserta didiknya. Setelah komunitas muslim terbentuk di suatu daerah tertentu mereka kemudian membangun tempat peribadatan yaitu masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama muncul di samping rumah tempat kediaman ulama atau *muballigh*. Setelah itu muncullah lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti pesantren, dayah ataupun surau. Nama-nama tersebut walaupun berbeda, tetapi hakikatnya sama, yakni sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan keagamaan. Perbedaan nama itu adalah dipengaruhi oleh perbedaan tempat. Perkataan pesantren populer di masyarakat Jawa, Rangkang, Dayah di Aceh dan Surau di Sumatera Barat.

Inti dari materi pendidikan pada masa awal tersebut adalah ilmu-ilmu keagamaan yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik adalah menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu keagamaan seseorang.

Materi pendidikan yang diajarkan terpusat kepada masalah-masalah diniyah-aqidah, syariah dan akhlak. Kehadiran Islam di Indonesia sekaligus pula ikut serta memberikan andil yang besar bagi tumbuhnya masyarakat yang beradab. Lewat ajaran-ajaran Islam yang dididikkan kepada penganutnya membawa perubahan-perubahan yang bararti bagi masyarakat Indonesia di kala itu. misalnya memperkenalkan aksara Arab, bahasa Arab, kehidupan yang lebih berbudaya misalnya kebersihan, disiplin dan lain sebagainya.

Sesuai dengan gencarnya pembaharuan pemikiran Islam yang dicanangkan oleh para pembaharu Muslim di berbagai negara; seperti Mesir, India, Turki - sampai juga gaung pembaharuan itu ke Indonesia. Salah satu aspeknya adalah munculnya pembaharuan Pendidikan Islam di Tanah Air.

Di awal abad ke-20 muncullah ide-ide pembaharuan pendidikan di Indonesia. Ide ini muncul disebabkan sudah mulai banyak orang yang tidak puas dengan sistem pendidikan yang berlaku saat itu. Karenanya ada beberapa sisi yang perlu diperbaharui, yaitu dari segi isi (materi), metode, sistem dan manajemen.

Dari segi isi (materi) yang disampaikan, sudah ada keinginan untuk memasukkan materi pengetahuan umum kedalam isi pengajaran pada ketika itu, dan dari segi metode tidak lagi hanya mempergunakan metode sorogan, hafalan watonan, tetapi diinginkan adanya metode-metode baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dari segi sistem, perubahan dari sistem *halaqah* ke sistem klasikal. Sedangkan tinjauan manajemen adalah penterapan manajemen sekolah.

Dari perjalanan historis tersebut terlihat adanya dinamika dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Ada tiga lembaga pendidikan yang telah muncul sejak awal abad ke duapuluh. *Pertama*, pesantren, *kedua* sekolah dan *ketiga* madrasah. Pesantren telah mengalami dinamika hingga sekarang, sejak dari pesantren tradisional sampai pesantren modern. Madrasah yang pada mulanya menekankan ilmu-ilmu agama dan hanya berkiprah di lingkungan Kementerian Agama, berubah setelah ditetapkannya madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, yang kedudukannya sama dengan sekolah.

Apa sebetulnya yang melatarbelakangi timbulnya pembaharuan tersebut ? Ini tidak lain disebabkan dua hal. *Pertama*, daya dorong dari ajaran Islam itu sendiri yang memotivasi umatnya untuk melakukan pembaharuan (*tajdîd*), dan juga kondisi umat Islam Indonesia yang jauh tertinggal dalam bidang pendidikan. *Kedua*, daya dorong yang muncul dari para pembaharu pemikiran Islam yang telah mendapat masukan dari berbagai tokoh-tokoh pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan lain-lain.

Ide dan inti dari pembaharuan itu adalah berupaya meninggalkan pola dan pemikiran lama yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman dan berupaya meraih aspek-aspek yang menopang untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman.

Berdasarkan dua daya dorong itulah makanya mulai muncul ide untuk memasukkan mata pelajaran umum ke lembaga-lembaga pendidikan Islam serta merubah metode pengajaran kepada metode yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Ditinjau dari segi inti dan hakikat pendidikan Islam itu sendiri, maka inovasi terhadap pendidikan Islam itu adalah sesuatu yang sudah selayaknya, sebab inti dan hakikat dari pendidikan Islam itu adalah bagaimana upaya membentuk manusia muslim seutuhnya, dan memberdayakan seluruh potensi manusia. Kearah sanalah ditujukan pendidikan Islam. Dengan demikian, pembaharuan tetap digulirkan sepanjang belum tercapainya konsep pembentukan manusia ideal menurut Islam.

B. DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Lembaga pendidikan Islam formal saat sekarang dapat dibagi kepada lembaga pendidikan dasar-menengah dan pendidikan tinggi. Pada tingkat dasar–menengah dapat dibagi kepada tiga jenis yaitu pesantren, sekolah dan madarasah. Pada tingkat pendidikan tinggi dibagi kepada dua pendidikan tinggi Islam negeri yaitu IAIN/STAIN dan UIN, dan pendidikan tinggi Islam swasta yakni universitas/institut Islam swasta serta sekolah tinggi agama Islam swasta.

1. Pesantren

Banyak sekali defenisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pesantren. Disamping disebabkan semakin berkembangnya dinamika pesantren, maka agaknya semakin sulit pula untuk mendefinisikannya. Hanya saja, ada ciri-ciri umum yang dimiliki oleh seluruh pesantren yang terbagi beberapa pola. Ciri-ciri umum itu adalah :

a. Pendidikan ilmu-ilmu agama;

b. Mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keseharian.

Menurut historisnya, pesantren telah tumbuh sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengalami dinamika dari yang tradisional maupun yang modern. Jumlah pesantren cukup banyak di Indonesia dan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, karena banyaknya terasa sangat sulit untuk menjeneralisasikannya. Kendatipun demikian, penulis akan mencoba mempolakannya yang ditinjau dari kurikulum dan sistem pendidikan yang dilaksanakan di pesantren tersebut.

Penulis mempolakannya kepada lima pola, tanpa menutup kemungkinan masih ada pola lain. Pola-pola tersebut adalah:

Pola *pertama*, materi pelajaran yang dikembangkan adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik, non klasikal, tinggi-rendah ilmu santri diukur dengan kitab-kitab yang dipelajarinya. Tidak mengharapkan ijazah sebagai alat untuk mencari kerja.

Pola *kedua*, pola ini hampir sama dengan pola pertama di atas, hanya saja pada pola kedua proses belajar mengajar

diadakan secara klasikal dan non klasikal dan sedikit diberikan pengetahuan umum.

Pola *ketiga*, materi pelajaran telah dilengkapi dengan mata pelajaran umum. Adanya keseimbangan ini karena sebahagian besar dari pola ketiga ini mengikuti ujian negara. Dalam mata pelajaran tertentu mengikut kurikulum Kementerian Agama yang dimodifikasi oleh pesantren yang bersangkutan sebagai ciri kepesantrenan.

Pola *keempat*, menitikberatkan kepada pelajaran keterampilan disamping pelajaran agama. Pelajaran keterampilan ini ditujukan untuk menjadi bekal kehidupan bagi seorang santri setelah dia tamat dari pesantren tersebut.

Pola *kelima*, pesantren serba guna yang didalamnya diasuh berbagai jenis dan jenjang pendidikan seperti :

a. Pengajian kitab-kitab klasik
b. Madrasah
c. Sekolah
d. Perguruan tinggi

Disisi lain, pesantren secara garis besar dibagi kepada dua macam, *pertama,* pesantren salafi dan *kedua,* pesantren khalafi. Pesantren salafi adalah pesantren yang masih terikat dengan tradisi lama dan terkonsentrasi kepada kitab-kitab klasik nonklasikal. Sedangkan pesantren khalafi, pesantren yang telah dimodernisir baik dari segi kurikulum, sistem dan manajemen. Pesantren khalafi ini lebih memberikan alternatif bagi peserta didiknya untuk mengembangkan diri.

Seirama dengan permasalahan pokok pendidikan di Indonesia, pesantrenpun tidak luput dari permasalahan tersebut. Permasalahan pokok itu adalah mutu pendidikan yang bersumber dari segi pendidik, sarana dan fasilitas, proses belajar-mengajar. Pendidikan Islam di Indonesia terkait erat kualaitasnya dengan beberapa aspek yang di kemukakan di atas.

2. Sekolah

Sekolah telah didirikan oleh Belanda sejak abad XVII. Sekolah-sekolah Belanda ini telah menyebar ke seluruh Indonesia. Di sekolah-sekolah Belanda tidak diajarkan mata pelajaran agama, sesuai dengan kebijakan pemerintah Belanda yang netral agama. Pendidikan agama di zaman kolonial baru diberikan di sekolah setelah berdirinya sekolah-sekolah yang diasuh oleh organisasi Islam.

Setelah Indonesia merdeka, oleh pemerintah sejak tahun 1946, telah melaksanakan kerjasama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Nasionaldan Kebudayaan guna terlaksananya pendidikan agama di sekolah. Ditinjau dari segi pelaksanaannya setelah Indonesia merdeka dapat dibagi kepada tiga fase. Fase *pertama* sejak tahun 1946-1966 sebagai fase peletakan dasar dari pendidikan agama di sekolah. Fase ini dapat dikatakan berupa fase pencarian bentuk dan masa pembinaan awal.

Fase *kedua* adalah fase setelah diadakannya Sidang Umum MPRS/1996, TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1996 pasal 1 menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai ke Universitas-Universitas

negeri. Disamping itu, pasal 4 menyatakan tentang isi pendidikan yang semakin memperkuat pendidikan agama yakni point (a) yang berbunyi: "Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama".

Fase *ketiga*, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 1989 dan No. 20 Tahun 2003) dimana pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

Titik tumpu perhatian kita terhadap sekolah dikaitkan sebagai lembaga pendidikan Islam, karena sekolah melaksanakan pendidikan agama. Setelah Indonesia merdeka sejak tahun 1946 dimasukkan pendidikan agama ke sekolah yang dikerjasamai oleh Kementerian Agama dengan Departemen Pendidikan. Permasalahan pokok setelah dilaksanakannya pendidikan agama di sekolah adalah tentang *output* pendidikan agama itu sendiri, sudah sejauh mana hasil pendidikan agama itu bagi perbaikan kepribadian sesorang. Pertanyaan ini muncul sebab salah satu krisis yang menimpa Indonesia adalah krisis akhlak, indikasi tentang cukup banyak. Sejaumanakah peranan pendidikan agama itu dalam menangkal kenakalan remaja di Indonesia, kendatipun belum di adakan penelitian yang akurat tentang ini, tetapi banyak orang berasumsi bahwa pendidikan agama belum maksimal peranannya menangkal berbagai kemerosotan akhlak. Jika demikian tentu ada permasalahannya.

Setelah dicoba dianalisa di antara permasalahan itu adalah pendidikan agama di sekolah yang pendekatannya terfokus kepada pendekatan kognitif, sedikit pendekatan afektif, di

samping banyak permasalahan lainnya. Seperti sarana fasilitas, alokasi waktu, kurikulum, kerjasama antara kepala sekolah dengan guru agama serta guru agama dengan guru-guru lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka agenda utama pendidikan agama di sekolah adalah memberdayakan pendidikan agama, sehingga pendidikan agama itu betul-betul dirasakan sebagai solusi bagi kemerosotan akhlak peserta didik.

3. Madrasah

Madrasah di Indonesia baru populer setelah awal abad kedua puluh. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan dilatarbelakangi oleh munculnya semangat pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang muncul setelah pesantren dan sekolah mengadopsi sebagian sistem pesantren dan sekolah.

Ditinjau dari segi dinamika dan perkembangannya, madrasah mengalami tiga fase. Fase *pertama*, sekitar tahun 1945-1975. Dimana madrasah menekankan materi pendidikannya kepada penyajian ilmu agama, dan sedikit pengetahuan umum. Disebabkan hal itulah maka pengakuan ruang lingkup madrasah hanya berada di seputar Kementerian Agama.

Fase *kedua* adalah fase diberlakukannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975 (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri). Fase ini berlangsung dari tahun 1975-1989. Inti dari SKB itu adalah upaya untuk meningkatkan mutu madrasah, dalam surat keputusan tersebut dicantumkan :

a. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat;
b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih diatasnya;
c. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat (SKB Tiga Menteri Tahun 1975, bab II, pasal 2).

Dengan dilaksanakannya SKB Tiga Menteri ini berarti:

a. Eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat;
b. Pengetahuan umum pada madrasah-madrasah lebih meningkat;
c. Fasilitas fisik dan peralatan lebih disempurnakan;
d. Adanya civil effect terhadap ijazah madrasah.

Fase *ketiga* adalah setelah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 1989 dan UU No. 20 Tahun 2003) dan diiringi dengan sejumlah Peraturan Pemerintah.

Madrasah, pada fase ini dijelaskan secara eksplisit adalah sekolah yang berciri khas agama Islam, makna yang terkandung didalamnya bahwa madrasah mulai dari tingkat dasar dan menengah memberlakukan kurikulum sekolah yang ditambah dengan kurikulum ilmu-ilmu agama sebagai ciri khasnya. Khusus pada tingkat Aliyah, menurut UU No. 20 Tahun 2003 bahwa Madrasah Aliyah terbagi kepada dua jenis; Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh sejak masuknya ide-

ide pemabaharuan pemikiran Islam di Indonesia pada awal abad ke duapuluh. Madrasah dapat dikatakan sebagai pembaharuan dari sistem pesantren. Setelah Indonesia merdeka, madrasah telah melewati tiga fase. Fase pertama sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai tahun 1975. Madrasah pada fase ini lebih terkonsentrasi kepada pendalaman ilmu-ilmu agama. Kedua, madarasah setelah lahirnya SKB tiga Menteri, madrasah pada ketika ini sudah di samakan dengan kedudukan dan civil efeknya dengan sekolah. Akan tetapi disebabkan alokasi waktu, beban kurikulum, pendidik, sarana fasilitas maka madrasah SKB ini tidak sama kualitasnya dengan sekolah. Selanjutnya fase ketiga, adalah fase setelah lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah berubah ujud menjadi sekolah yang berciri khas agama Islam. Dengan demikian, madrasah dalam pengalokasian waktu dan kurikulum sama dengan sekolah. SD = MI, SLTP = MTS, SMU = MA.

4. Perguruan Tinggi Islam

Perguruan Tinggi Islam di Indonesia berdiri pertama kali di Jakarta pada bulan Juli 1945 bernama Sekolah Tinggi Islam (STI). Selanjutnya tahun 1946 Sekolah Tinggi Islam di pindahkan ke Yoyakarta, dan tahun 1948 STI menjadi Universitas dengan nama Universitas Islam Indonesia (UII) dengan empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Pada tahun 1950 Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia dinegerikan menjadi Peguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN). Selanjutnya PTAIN yang ada di Yogyakarta digabung dengan Akademi Dasar Ilmu Agama (ADIA) yang ada di Jakarta menjadi Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) pada tahun 1960. Dari tahun 1960 sampai tahun 1973 IAIN telah berkembang sejumlah 14 buah. Dan tahun 1997 fakultas-fakultas IAIN yang lokasinya berada di luar IAIN induknya dijadikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN). Dan sejak tahun 2002 beberapa IAIN telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Secara garis besar Perguruan Tinggi Islam ini dibagi kepada dua macam. *Pertama* perguruan tinggi Islam negeri seperti UIN, IAIN dan STAIN. *Kedua*, perguruan tinggi Islam swasta dibagi kepada bentuk Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. Perguruan tinggi Islam swasta ini berada di bawah kordinasi KOPERTAIS (Kordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta).

C. KEDUDUKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa dapat diwariskan. Karena itu, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk *how to know* dan *how to do*, tetapi yang amat penting adalah *how to be,* dan agar pendidikan bisa mewujudkan *how to be* maka diperlukan transfer budaya dan kultur.

Dengan demikian, pentingnya masalah yang berkenaan

dengan pendidikan maka perlu diatur suatu aturan yang baku mengenai pendidikan tersebut, yang dipayungi dalam sistem pendidikan nasional. Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Bangsa Indonesia diawal kemerdekaannya sungguh sangat serius untuk membenahi pendidikan. Ada beberapa catatan sejarah dari kronologisnya menunjukkan keseriusan dan kesungguhan para pendiri negara ini untuk membenahi pendidikan. Catatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran.
2. Tahun 1947 Kongres Pendidikan I di Solo.
3. Tahun 1948 membentuk panitia pembentukan rancangan undang-undang pendidikan.
4. Tahun 1949 Kongres Pendidikan II di Yogyakarta.
5. Tahun 1950 lahirnya UU. NO 4 tahun 1950 Undang-Undang Tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPP).
6. Tahun 1954 lahirnya UU. No 12 tahun 1954 tntang pernyataan berlakunya UU No 4 tahun 1950.
7. Tahun 1961 lahirnya Undang Undang tentang Perguruan Tinggi.
8. Tahun 1965 lahirnya Majelis Pendidikan Nasional.
9. Tahun 1989 lahirnya Undang–Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional(UUSPN).
10. Tahun 1990, lahirnya PP, 27, 28, 29, 30 tahun 1990.

11. Tahun 1991, lahirnya PP 72, 73 tahun 1991.
12. Tahun 1992, lahirnya PP 38, 39.
13. Tahun 1999, lahirnya PP 60 dan 61.
14. Tahun 2003 lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU N0 2 tahun 1989.
15. Tahun 2005 lahir Undang – Undang RI No. 14 tentang guru dan dosen.
16. Tahun 2005 lahir PP No. 19 tentang Standard Nasional Pendidikan
17. Tahun 2007 lahir PP No. 55 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagaamaan.

Undang-Undang Dasar 1945 bab XIII, pasal 31 ayat (2), mengamanahkan bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai "suatu sistem pendidikan nasioanl".

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara. Menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, dan terpadu dalam arti adanya saling terkait antara pendidikan nasional dengan seluru usaha pembangunan nasioanl.

Pendidikan Nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia supaya bisa berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang perubahan zaman.

Dengan visi tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mempunyai perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Mempersiapkan kesiapan masukan dan kualitas masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan gelobal.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UU No 20 Tahun 2003).

Strategi pengembangan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 meliputi :

1. Pelakasanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.

5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
8. Penyeleggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
9. Pelaksanaan wajib belajar.
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
11. Pemberdayaan peran masyarakat.
12. Pusat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional (Penjelasan UU. No. 20 tahun 2003).

2. Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Menurut catatan sejarah masuknya Islam ke Indonesia dengan damai berbeda dengan daerah-daerah lain kedatangan Islam dilalui lewat peperangan, seperti Mesir, Irak Parsi dan beberapa daerah lainnya. Peranan para pedagang dan *muballigh* sangat besar sekali andelnya dalam proses Islamisasi di Indonesia. Salah satu jalur proses Islamisasi itu adalah pendidikan.

Hakekat pendidikan adalah pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan. Dengan demikian, pendidikan Islam adalah proses pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan

Islam. Para pedagang atau *muballigh* adalah orang yang melakukan aktifitas pendidikan. Adapun argumen yang bisa dikemukakan bahwa kegiatan para pedagang atau muballigh tersebut digolongkan kepada aktifitas pendidikan adalah dilihat dari sudut esensi pendidikan.

Esensi dari pendidikan adalah dengan melihat unsur dasar pendidikan. Unsur dasar pendidikan itu ada lima; adanya unsur pemberi dan penerima, unsur tujuan, cara atau jalan yang baik, dan adanya konteks positif. (Muhadjir, 1987:15).

Apabila kelima kreteria itu dikaitkan dengan aktifitas para pedagang dan *muballigh*, maka aktifitas mereka itu telah termasuk ke dalam aktifitas pendidikan.

Melihat kepada kegiatan pendidikan Islam di Indonesia, maka dapat diketahuhi bahwa pendidikan Islam telah banyak memainkan permanannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, telah terjadi pula dinamika perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu yang amat strategis dalam dinamika itu adalah masuknya pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional.

Makna yang terkandung di dalamnya bahwa pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, yang dibagi kepada tiga hal. *Pertama*, pendidikan Islam sebagai lembaga, *kedua* pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan *ketiga* pendidikan Islam sebagai nilai (*value*).

Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara ekspelisit. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat

dasar sampai perguruan tinggi. Berikutnya pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan nacional.

a. Tinjauan Historis

Kajian historis tentang pendidikan Islam di Indonesia sejak awal masuknya Islam ke Idonesia dapat dibagi kepada tiga fase. Fase *pertama* sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam sejak awal masuknya Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Fase *kedua* sejak masuknya ide-ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Fase *ketiga*, sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 4 tahun 1950, UU No. 12 tahun 1994, UU No. 2 Tahun 1989 dan dilanjutkan dengan UU No. 20 tahun 2003). Setiap fase ditandai dengan ciri-ciri khas masing-masing.

Fase *pertama* dimulai dengan munculnya pendidikan infomal. Yang amat dipentingkan pada tahap awal ini adalah pengenalan nilai-nilai Islami, selanjutnya baru muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diawali dengan munculnya masjid, pesantren, madrasah, rangkang, dayah, dan surau. Ciri yang paling menonjol dalam fase ini adalah; *pertama* materi pelajaran terkonsentrasi kepada pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu agama, seperti tauhid, fiqh, tasawuf, akhlak, tafsir, hadist dan lain-lain yang sejenis dengan itu, pembelajarannya terkonsentrasi kepada pembahasan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab. *Kedua.* metodenya adalah sorogan, wetonan dan *muzakarah* (musyawarah). *Ketiga,*

sistemnya non-klasikal yakni dengan memakai sistem *halaqah*. *Output*-nya akan menjadi ulama, kyai, ustaz, guru agama, dan juga menduduki jabatan-jabatan penting keagamaan dari tingkat yang paling tinggi seperti mufti sampai ketingkat pengurusan soal-soal yang berkenaan dengan fardu kifayah ketika seseorang meninggal ḍunia, di masyarakat Jawa dikenal peristilahan modim, sedangkan di masyarakat Sumatera Utara menyebutnya dengan bilal.

Fase *kedua* adalah fase ketika masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia. Sejak abad ke-19 Masehi telah berkumandang ide-ide pemaharuan pemikiran Islam ke seluruh dunia Islam, dimulai dari gerakan pembaharuan di Mesir, Turki, Saudi Arabia dan juga Indonesia. Khusus dalam gerakan pembaharuan pendidikan ada beberapa nama yang terkenal diantaranya Muhammad Ali Pasya, Muhammad Abduh dengan murid-muridnya di Mesir, Sultan Mahmud II di Turki, Said Ahmad Khan di India, Abdullah Ahmad di Indonesia. Inti dari gerakan pembaharuan itu adalah berupaya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran modern yang berkembang di dunia pendidikan.

Khusus pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua faktor penting. *Pertama,* faktor intern yakni kondisi masyarakat Muslim Indonesia yang terjajah dan terbelakang dalam dunia pendidikan mendorong semangat beberapa orang pemuka-pemuka masyarakat Indonesia untuk memulai gerakan pembaharuan pendidikan tersebut. *Kedua,* faktor ekstern yakni sekembalinya pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu agama ke Timur Tengah, dan setelah mereka kembali ke Indonesia mereka memulai gerakan-

gerakan pembaharuan tersebut. Di antara tokoh yang berpengaruh menggerakkan pembaharuan tersebut adalah Syekh Muhammad Djamil Djambek, Haji Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Ibrahim Musa Parabek di Sumatera Barat. Di Jawa muncul tokoh-tokoh lain, seperti KH. Ahmad Dahlan, dengan gerakan Muhammadiyahnya, KH. A.Hasan dengan gerakan Persis, (Persatuan Islam), Haji Abdul Halim dengan gerakan Perserikatan Ulama, KH. Hasyim Asy'ary dengan organisasi Nahdatul Ulama. (Daulay, 2001: 47).

Menurut Steenbrink ada empat faktor yang mendorong munculnya pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia :

1. Sejak tahun 1900 telah banyak pemikiran untuk kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah yang dijadikan titik tolak menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada;
2. Adanya sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda;
3. Adanya usaha-usaha dari umat Islam untuk memperkuat oganisasinya dalam bidang sosial dan ekonomi;
4. Banyak yang tidak puas dengan metode pendidikan tradisional di dalam mempelajari Al-Qur'an dan studi agama (Steenbrink, 1986: 46-47).

Ada empat sasaran pokok yang diperbaharui. *Pertama*, materi pelajaran. Materi pelajaran yang diajarkan sebelum lahirnya ide-ide pembaharuan adalah terpusat kepada pelajaran agama yang terkonsentasi kepada kitab-kitab klasik seperti yang telah diuraikan terdahulu. Setelah zaman pembaharun pendidikan Islam materi pembelajaran itu tidak lagi hanya

sekedar pendalaman ilmu-imu agama tetapi juga diajarkan ilmu pengetahuan umum, seperti aljabar, ilmu ukur, lmu alam, kimia, ilmu hayat, ekonomi, tata negara, bahasa Inggeris/ Belanda dan lain-lain.

Kedua, pembaharuan metode tidak lagi hanya tertumpu kepada metode sorogan, wetonan, dan muzakarah, tetapi telah dikembangkan kepada metode pembelajaran lainnya. *Ketiga*, sistemnya klasikal, peserta didik telah dibagi kepada kelas-kelas berdasarkan urutan tahun masuk dan lamanya belajar. *Keempat*, manajemen pendidikan, diterapkannya prinsip-prinsip dasar menejemen pendidikan.

Salah satu lembaga pendidikan yang lahir sebagai hasil dari pembaharuan itu adalah madrasah. Perkataan madrasah di Indonesia baru populer setalah awal abad kedua pulah, padahal madrasah di dunia Islam telah berkembang pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi.

Madrasah di Indonesia merupakan perpaduan antara pesantren dan sekolah. Ada unsur-unsur yang diambil madrasah dari pesantren ada pula dari sekolah. Unsur-unsur yang diambil dari pesantren itu adalah ilmu agama dan jiwa beragama, sedangkan unsur yang diambil dari sekolah adalah ilmu pengetahuan umum, sistem, metode serta manajemen pendidikan.

Perkembangan berikutnya adalah fase *ketiga*, yakni setelah diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang diikuti dengan lahirnya sejumlah peraturan pemerintah tentang pendidikan, misalnya, selanjutnya diikuti pula dengan lahirnya UU. No. 20 Tahun 2003.

Diantara peraturan-peraturan pemerintah tentang pendidikan dimaksud adalah:

- PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
- PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- PP No. 30 tahun 1990 yang kemudian disempurnakan dengan PP 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
- PP No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
- PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Tahun 2005 lahir PP No. 19 tentang Standard Nasional Pendidikan.
- Tahun 2007 lahir PP No. 55 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagaamaan.

Ada beberapa pasal dalam UU. No. 20 tahun 2003 yang menyinggung tentang pendidikan Islam. Di dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam. *Pertama*, kelembagaan formal, non formal dan informal didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah, dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam.

Selanjutnya, majelis taklim diakui sebagai pendidikan

nonformal dan dimasukkannya Raudhatul Athfal (RA) sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, serta dipertegas pula bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan.

Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik disemua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan nasional.

b. Realisasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Untuk melihat realisasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasioanal perlu diklasifikasikan kepada tiga hal.

1. Pendidikan Islam Sebagai Lembaga
   a. Lembaga Pendidikan formal
      1) Pendidikan dasar (Pasal 17) menyebutkan : Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
      2) Pendidikan Menengah (Pasal 18) : Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliya (MA), Sekolah Menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentul lain yang sederajat.

3) Pendidikan Tinggi (Pasal 20)
Pendidikan Tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.

b. Lembaga Pendidikan nonformal (pasal 26)
Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.

c. Lembaga Pendidikan informal (Pasal 27)
Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

d. Pendidikan Usia dini (Pasal 28)
Pendidikan Usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

e. Pendidikan Keagamaan (Pasal 30)

1) Pendidikan kegamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peseta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.
3) Pendidikan kegamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesanten, pasraman, pabhaya samena,dan bentuk lain yang sejenis.
5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2). ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2. Pendidikan Islam Sebagai Mata Pelajaran

a. Kurikulum disusun sesuai degan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan;

1) Peningkatan iman dan taqwa.
2) Peningkatan akhlak mulia.
3) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.
4) Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
5) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
6) Tuntutan dunia kerja.
7) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni.
8) Agama.
9) Dinamika perkembangan global.
10) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (pasal 36 ayat 3).

b. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :

1) Pendidikan agama.
2) Pendidikan kewarganegaraan.

3) Bahasa.
4) Matematika.
5) Ilmu pnegatahuan alam.
6) Ilmu pengetahuan sosial.
7) Seni dan budaya.
8) Pendidikan jasmani dan olah raga.
9) Keterampilan/ kejuruan.
10) Muatan lokal.

c. Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib :
1) Pendidikan agama.
2) Pendidikan kewarganegaraan.
3) Bahasa.

Dalam Undang–Undang ini juga disebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik, disebutkan; setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Pasal 12 ayat a). Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (3).

3. Nilai-Nilai Islami dalam UU No 20 tahun 2003

Inti dari hakikat nilai-nilai Islami itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk (sesuai konsep *rahmatan lil'alamîn*), demokratis, egalitarian dan humanis. Di antara nilai-nilai tersebut adalah :

1) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2) Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3) Pendidikan Nasional bersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif.
4) Memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
5) Menekankan pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup.
6) Pendidikan merupakan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.

D. PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

1. Pendidikan Islam Sebagai Lembaga

Pendidikan Islam sebagai lembaga terdiri dari tiga bentuk; *Pertama*, lembaga pendidikan informal berlangsung di rumah tangga. *Kedua*, lembaga pendidikan nonformal berlansung di masyarakat dan *ketiga*, lembaga pendidikan formal berlangsung di sekolah. Khusus lembaga pendidikan formal ada empat jenis bentuknya yakni pesantren, sekolah, madrasah serta pendidikan tinggi.

Pesantren pada mulanya adalah lembaga pendidikan Islam yang seluruh program pendidikannya adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan mempergunakan kitab-kitab klasik, kemudian sesuai arus perkembangan zaman pesantren telah mengalami dinamika. hingga saat sekarang ini di samping masih tetap ada pesantren yang berciri salafiyah, juga pesantren yang berciri khalafiyah pun tidak sedikit.

Lembaga berikutnya adalah sekolah, pada mulanya didirikan oleh kolonial Belanda dan ilmu–ilmu yang diajarkan seluruhnya adalah ilmu-ilmu umum. Kemudian setelah Indonesia merdeka dimasukkan mata pelajaran agama. Sebagian dari sekolah ini ada yang berada dibawah yayasan atau organisasi keislaman sehingga sekolah–sekolah tersebut memprogramkan pendidikan agama Islam yang lebih dari sekolah negeri.

Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang lahir setelah munculnya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Karena itu, unsur-unsur pendidikan modern ditemukan di madrasah, seperti sistem klassikal,

manajemen pendidikan, mata pelajaran agama dan umum yang seimbang. Dinamika madrasah hingga saat sekarang ini mengantarkan madrasah menjadi sekolah yang berciri khas agama Islam. Setelah terlebih dahulu diakuinya madrasah setara dan sederajat dengan sekolah berdasarkan SKB Tiga Menteri tahun 1975.

2. Pendidikan Islam Sebagai Mata Pelajaran

Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran adalah merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Pada lembaga–lembaga pendidikan tersebut, mata pelajaran agama Islam sudah diajarkan. Sejak Indonesia merdeka di sekolah-sekolah umum dimasukkan pendidikan agama begitu juga sejak permualan tahun 1960-an pendidikan agama dimasukkan ke perguruan tinggi. Subyek keagamaan inilah yang dimaksudkan dengan pendidkan Islam sebagai mata pelajaran.

Pendidikan Islam di Indonesia baik ditinjau dari segi lembaga maupun mata pelajaran, perlu diberdayakan dengan cara mencarikan jalan keluar dari berbagai problema yang diahadapi. Peroblema *pertama* adalah tentang struktural dan kultural. Struktural adalah pendidikan Islam di Indonesia berada di bawah struktur Kementerian Agama, yang untuk ke depan pemerintah sangat perlu memberdayakan Depertemen Agama. *Kedua*, kultural, agar umat Islam dari seluruh lapisan masyarakat ikut serta memberdayakan pendidikan Islam. Problema-problema berikutnya dapat dilihat dari segi pendidik, peserta didik, manajemen,

kurikulum dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu perlu diperhatikan.

Dalam rangka pemberdayaan pendidikan Islam di Indonesia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Pendidik

Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki kekurangan tenaga pendidik baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena itu berbagai persolan yang menyangkut tentang ketenagaan ini harus dicarikan solusinya. Setidaknya ada empat kompetensi pokok yang mesti dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. *Pertama*, kompetensi keilmuan. Pendidik mesti memiliki ilmu yang menghantarkan dia layak untuk mengajar. Sebab salah satu tugas pokoknya adalah transfer ilmu. *Kedua*, kompetensi keterampilan mengkomunikasikan ilmunya kepada peserta didik. *Ketiga*, kompotensi manajerial, mencakup tentang kepemimpin guru, supervisor, administrasi, dan lain sebagainya. *Keempat*, kompetensi moral akademik, dari segi moral, pendidik mesti menjadi contoh panutan. Pendidik tempat murid 'berkaca". Hal ini sejalan dengan kompetensi guru yang telah ditetapkan dalam UU No. 14 tahun 2005 yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

b. Sarana dan Fasiltas

Disebabkan karena sumber dana yang terbatas maka kelengkapan sarana dan fasilitas pun terbatas pula. Masih

banyak ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan Islam-pesantren, sekolah dan madrasah- sarana dan fasilitas yang sangat minim. Keterbatasan sarana ini juga berpengaruh kepada pembentukan manusia berkualitas.

c. Kurikulum

Ada beberapa persoalan berkenaan dengan ini. *Pertama*, beban kurikulum pada lembaga-lembaga pendidikan Islam lebih berat dari lembaga pendidikan lainnya. Sebab ada keinginan agar peserta didik dapat memiliki bekal ilmu pngetahuan umum dan agama secara seimbang. *Kedua*, beban kurikulumnya untuk dapat membentuk manusia profesionalis guna memiliki keterampilan tertentu sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja.

Ditinjau dari segi pengembangan pendidikan Islam ke depan ada masalah yang bersifat epistimologi keilmuan, yakni bagaimana merancang terintegrasinya ilmu-ilmu yang selama ini digolongkan kepada *perennial knowledge* dengan *acquired knowledge*. Di Indonesia upaya ini telah dilakukan langkah-langkahnya. *Pertama*, memasukkan mata pelajaran agama ke sekolah-sekolah umum. *Kedua*, sekolah umum plus madrasah diniyah. *Ketiga*, memasukkan mata pelajaran agama ke sekolah umum. *Keempat*, madrasah SKB Tiga Menteri tahun 1975. *Kelima*, program IDI (Islam Untuk Disiplin Ilmu). *Keenam*, madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Langkah-langkah yang belum selesai adalah soal Islamisasi ilmu atau setidaknya ilmu yang berwawasan Islam.

Pada tingakat Perguruan Tinggi (IAIN), telah terbentuknya

Universitas Islam Negeri (UIN). Diantara IAIN yang telah mengalami perubahan tersebut adalah IAIN Jakarta menjadi UIN Jakarta, IAIN Yogyakarta menjadi UIN Yogakarta, IAIN Bandung menjadi UIN Bandung, STAIN Malang menjadi UIN Malang, IAIN Pekanbaru menjadi UIN Pekanbaru, dan UIN Makassar menjadi UIN Makassar.

Dasar perubahan IAIN/STAIN menjadi UIN dengan beberapa pertimbangan:

1. Konsep pendidikan Islam seutuhnya dan secara khusus konsep Unversitas Islam adalah mengembangkan dua jenis keilmuan yaitu *perennial knowledge* dan *acquired knowledge* (ilmu *naqliyah* dan *aqliyah*) (Hasil Konferensi Pendidikan Islam sedunia, Naquib Al Attas, As-Syaibani, Al-Abrasyi, Al 'Ainaini, Al Ashraf)
2. Pada saat dibukanya perkuliahan Sekolah Tinggi Islam (STI) yang pertama tanggal 8 juli 1945 di Jakarta kurikulum yang dipakai adalah mencontoh kurikulum Fakultas Usuluddin Unversitas Al-Azhar Kairo. Erat kaitannya bahwa ketika itu Al-Azhar masih terkonsentrasi kepada ilmu-ilmu diniyah, sedangkan sekarang Al Azhar telah membuka fakultas-fakultas eksakta, sosial di samping fakultas ilmu-imu keagamaan.
3. Sejak diberlakukannya UU. No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 Tahun 2003 serta diiringi dengan seperangkat PP, terutama PP No. 28 (tentang Pendidikan Dasar) dan PP No. 29 tahun 1990 (Tentang Pendidikan Menengah), madrasah digolongkan kepada sekolah yang berciri khas agama Islam. Madrasah sebagai sekolah, maka program pokoknya adalah apa yang dberikan di sekolah. Hal ini bermakna tujuan institusional madrasah tidak lagi dipersiapkan untuk mendalami ilmu-imu agama. Sehubungan dengan itu maka harus ada lembaga pendidikan tinggi Islam negeri yang akan menampung lulusan madrsah dalam berbagai aspeknya.
4. Kecenderungan masyarakat saat sekarang ini adalah menginginkan putra-putri mereka mendalami ilmu-ilmu umum, tetapi memiliki jiwa keagamaan yang kuat.

Sebagai sebuah unversitas maka ilmu yang dikembangkan adalah meliputi ilmu kealaman (natural science, sosial science, humaniora dan ilmu-ilmu keagaman, yang selanjutnya akan dirancangkan integrated di antara ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dengan ilmu yang bersumber dari nonwahyu.

Pendidikan Islam di Indonesia adalah bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional. Secara kelembagaan pendidikan Islam telah ujud sejak masuknya Islam ke Indonesia dan telah banyak memainkan perananya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak sedikit dari tokoh-tokoh dan pemimpin nasional baik yang tergolong pendiri bangsa, maupun pemimpin bangsa yang berasal dari lembaga pendidikan Islam-pesantren, madrasah, surah, dayah.

Dalam perjalanan panjang pendidikan Islam telah melewati tiga priode. *Periode pertama* sejak masuknya Islam sampai masuknya ide-ide pembaharuan pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam pada fase ini masih tergolong tradisional belum disentuh oleh ide-ide pembaharuan. Selanjatnya awal abad keduapulah, muncullah ide-ide pembaharuan pendidikan

Islam. Ada empat sasaran pokok pembaharuan tersebut: isi (kurikulum), metode, sistem, dan manajemen.

Pendidikan Islam semakin kukuh kedudukannya setelah masuk dan inklusif dalam sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU. No. 2 Tahun 1989 yang selanjutnya diatur pula serangkaian, Peraturan pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan dan kemudian dilanjutkan pula dengan diberlakukannya UU. No. 20 tahun 2003.

Untuk mengukuhkan eksistensi pendidikan Islam di Indonesia, maka usaha ke depan adalah bagaimana memberdayakannya dan mengembangkannya. Untuk memberdayakannya perlu dicarikan *way out* atau solusi dari berbagai probelma yang sedang dihadapi-tenaga pendidik, sarana fasiltas, kurikulum, struktural dan cultural.

Sedangkan untuk pengembangan pendidikan tinggi sudah saatnya diprogramkan agar adanya Universitas Islam Negeri di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Didalam perjalanannya itu telah terjadi dinamika. Perubahan-perubahan itu pada dasarnya adalah alamiah. Perubahan-perubahan kearah kemajuan pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam adalah merupakan *trend* umat Islam masa kini. Kendatipun kesadaran umat Islam Indonesia telah tumbuh sejak hampir seratus tahun yang lalu bahwa pendidikan Islam bukanlah semata-mata pendidikan yang mengarah kepada pendidikan *ukhrawi* saja, namun untuk merealisasikannya dalam bentuk nyata masih terasa banyak hambatan. Hambatan-

hambatan itu bisa disebabkan faktor intern dan bisa juga karena faktor ekstern. Berkenaan dengan itu pengkajian-pengkajian pendidikan secara mendalam dan menukik masih sangat dibutuhkan .

Diperlukan kajian-kajian yang mendalam agar dapat disatukan visi dalam menatap masa depan dan sekaligus dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia, baik dari teori maupun praktek.

BAB III

PEMBAHARUAN PENDIDIKAN DI DUNIA ISLAM DAN INDONESIA

A. KETERPURUKAN PENDIDIKAN ISLAM

Periodisasi sejarah Islam ditandai dengan adanya zaman kemajuan dan zaman kemunduruan. Zaman kemajuan adalah kecerahan (*golden age*) ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi dan politik, seni dan lain sebagainya. Sedangkan zaman kemunduran adalah zaman kegelapan (*dark age*) ditandai dengan kejumudan, kebakuan berpikir, stagnasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban, perpecahan, disintegrasi dan lain sebagainya. Priode klasik dari tahun 650 – 1000, digolongkan kepada priode kemajuan. Pada masa itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan munculnya sejumlah ilmuan dalam berbbagai bidang seperti falsafah, sains dan ilmu- ilmu agama.

Sedangkan priode kemunduran I (1250-1500 M) dan

priode kemunduran II (1700 – 1800) terjadinya kefakuman dan kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan serta berbagai aspek lainnya. M.M. Sharif mengungkapkan bahwa pikiran Islam menurun setelah abad XIII, dan terus melemah sampai abad XVIII M. Salah satu faktor yang amat berpengaruh membuat melemahnya umat Islam ketika itu adalah karena mereka telah meninggalkan pendidikan intelektual, maka timbullah pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Bila ijtihad tidak berkembang maka dinamikapun tertutup dan pada saat itulah manusia hidup dalam kebekuan dan kejumudan.

Fazlur Rahman dalam bukunya "Islam" menjelaskan tentang gejala-gejala kemunduran/kemacetan intelektual sebagai berikut: *Penutupan pintu Ijtihad (yakni pemikiran yang orisinil dan bebas) selama abad IV H/ X M dan V H/ XI M telah membawa kepada kemacetan umum dalam ilmu hukum dan ilmu intelektual, yakni teologi dan pemikiran keagamaan, sangat mengalami kemunduran dan menjadi miskin kerana pengucilan yang sengaja dari intelektual skuler dan kerena kemunduran yang disebutkan terakhir ini, khususnya filsafat, dan juga pengucilan dari bentuk- bentuk pemikiran keagamaan seperti yang di bawah ikal sufisme.*" (Rahman, 1984:274).

Bersamaan dengan kemunduran tersebut maka secara otomatis pendidikan Islam, baik sebagai ide, konsep, lembaga, kurikulum, maupun kegiatan, juga mengalami kemunduran.

Kemunduran umat Islam tersebut tidak hanya dari segi kemunduran ilmu pengetahuan dan pendidikan, akan tetapi juga dari segi ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi, umat Islam hidup dalam kemiskinan dan dari segi politik umat

Islam sejak abad ke-17 banyak dijajah oleh negeri-negeri Barat. Dan implikasi dari penjajahan itu adalah kebodohan dan kemiskinan.

Kesadaran akan ketertinggalan umat Islam tersebut muncul ketika Napoleon mulai menguasai Mesir di tahun 1798 M. Napoleon tidak hanya membawa pasukan ke Mesir, tetapi juga membawa ilmuan. Lewat lembaga ilmiyah yang didirikan Napoleon yang bernama *Institut d' Egypte* Napoleon memperkenalkan berbagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat Mesir. Lewat kontak dengan peradaban Barat yang sedemikian itulah menculnya kesadaran masyarakat Mesir akan ketertinggalan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan.

Sekembalinya Napoleon ke Perancis muncullah gerakan-gerakan pembaharuan di Mesir, misalnya gerakan dalam bidang pendidikan digalakkan oleh Muhammad Ali Pasha untuk membangun berbagai bentuk lembaga pendidikan umum dan keterampilan. Lembaga pendidikan tidak lagi hanya terkonsentrasi kepada lembaga pendidikan madrasah. Dalam bidang pemikiran muncullah M. Abduh dan murid-muridnya.

Di Turkipun demikian juga, kesadaran muncul setelah mengetahui bahwa Barat lebih unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama militer dari bangsa Turki. Turki yang pada mulanya selalu menang berperang dengan orang Eropa, tetapi belakangan Turki selalu kalah, mendorong mereka untuk mengatahui keunggulan lawan, yang akhirnya mereka sadari bahwa orang Eropa lebih unggul dari mereka.

Ide-ide pembaharuan itu menyebar ke dunia Islam termasuk

ke Indonesia. Lewat-lewat pelajar-pelajar atau mahasiswa Islam Indonesia yang belajar di Luar Negeri, khususnya di Timur Tengah (Mesir dan Saudi Arabia), setelah mereka kembali ke Indonesia, mereka tiupkan semangat pembaharuan tersebut. Salah satu sentuhan dari semangat pembaharuan itu adalah dalam dunia pendidikan, maka mulailah muncul ide dan aplikasi pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad ke XX M.

B. PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

1. Latar Belakang

Timbulnya pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan diawali dan dilatar belakangi oleh pembaharuan pemikiran Islam yang timbul dibelahan dunia Islam lainnya, terutama diawali oleh pembaharuan pemikiran Islam yang timbul di Mesir, Turki dan India. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa latar belakang pembaharuan yang timbul di Mesir dimulai sejak kedatangan Napoleon ke Mesir.

Napoleon memasuki Mesir pada tahun 1798 M. Dalam tempo lebih kurang tiga minggu Napoleon telah dapat menaklukkan Mesir. Kedatangan Napoleon ke Mesir tidak hanya membawa pasukan, beliau juga membawa sejumlah ilmuan dalam berbagai bidang. Dalam rombongannya terdapat 500 orang sipil dan 500 orang wanita, di antara kaum sipil itu terdapat 167 ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Beliau juga membawa dua set alat percetakan hurup Latin, Arab dan Yunani.

Dengan demikian, misinya ini tidak hanya untuk kepentingan militer tetapi juga untuk kepentingan ilmiah.

Di Mesir beliau mendirikan lembaga ilmiah (*Institut d 'Egypt*) Lembaga ini memiliki empat bidang kajian pokok yaitu kajian ilmu pasti, ilmu alam, ekonomi, politik, sastra dan seni. Di lembaga ini ditemukan beberapa perlengkapan-perlengkapan ilmiah yang belum dimiliki oleh masyarakat Mesir ketika itu, seperti mesin cetak, teleskop, mikroskop dan alat-alat untuk percobaan kimiawi. Napoleon juga memperkenankan ulama-ulama Mesir untuk berkunjung ke lembaga tersebut. Salah seorang di antara ulama dari Al-Azhar yang pernah mengunjungi lembaga ini adalah Abdur Rahman Al-Jabarti. Beliau amat kagum dengan apa yang dilihatnya di lembaga tersebut, perpustakaan yang memuat beraneka macam buku-buku agama dalam bahasa Arab, Parsi dan Turki, serta berbagai alat-alat ilmiyah lainnya. Akhirnya setelah beliau mengunjungi lembaga tersebut, beliau tulis kesan kunjungannya itu dengan kata kata: "Saya lihat di sana benda-benda dan percobaan-percobaan ganjil yang menghasilkan hal-hal yang besar untuk dapat ditangkap oleh akal seperti yang ada pada diri kita (Nasution, 1992: 30).

Komentar ulama tersebut menujukkan kekagumannya terhadap produk ilmu pengetahuan yang dipertunjukkan kepadanya di lembaga ilmiyah tersebut dan hal ini membuktikan betapa sesungguhnya masyarakat Muslim Mesir jauh tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dibanding dengan bangsa Eropa (dalam hal ini Perancis).

Di Turki juga mengalami hal yang sama. Kesadaran ini

muncul ketika bangsa Turki selalu kalah perang dengan bangsa Eropa. Kekalahan demi kekalahan ini membuat bangsa Turki ingin mengetahui penyebabnya. Akhirnya diketahuilah bahwa bangsa Eropa telah lebih unggul dari bangsa Turki dalam bidang ilmu pengetahuan dan hal ini sekaligus berdampak terhadap persenjataan serta siasat perang bangsa Eropa yang lebih unggul dari bangsa Turki.

Dari berbagai kenyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Eropa itu lebih unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dari kaum Muslimin baik yang tinggal di Mesir, Turki dan daerah lain. Kontak dengan Eropa itu menimbulkan kesadaran bagi masyarakat Muslim terutama tokoh-tokohnya tentang kemajuan-kemajuan bangsa Eropa dan ketertinggalan mereka.

Peristiwa ini menimbulkan kesadaran umat Islam untuk merubah diri. Kesadaran merubah diri itulah menimbulkan fase pembaharuan dalam priodesasi sejarah Islam. Fase pembaharuan itu muncul sebagai sahutan terhadap tuntutan kemajuan zaman dan sekaligus juga sebagai respon umat Islam atas ketertinggalan mereka ketika itu dalam bidang ilmu pengetahuan. Muncullah di dunia Islam tokoh-tokoh yang berteriak agar umat Islam merubah diri guna menuju kemajuan, meninggalkan pola-pola lama menuju pola baru yang berorientasi kepada kemajuan zaman.

Di Mesir muncullah pertama sekali Muhammad Ali Pasha yang banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum, seperti Sekolah Militer, Teknik dan Kedokteran, Sekolah Pertambangan dan lain-lain. Juga digalakkan penterjemahan buku-buku dari bahasa Eropa ke Bahasa Arab. Di Turki muncul

Sultan Mahmud II, yang juga banyak mendirikan lembaga pendidikan umum, seperti Sekolah Militer, Sekolah Teknik, Kedokteran Pembedahan di tahun 1838 digabunglah Sekolah Kedokteran dengan Sekolah Pembedahan dengan nama *Dar-ul Ulum-u Hikemiye ve Mekteb-i Tibbiye-i Sahane*.

Di India muncul pula tokoh seperti Said Akmad Khan, yang mendirikan lembaga pendidikan MAOC (*Muhammadin Anglo Oriental College*) yang kemudian pada tahun 1920 menjadi Universtitas Aligarh (*Aligarh Muslim University*) merupakan sebuah universitas terkemuka di India Utara sampai saat hari ini.

Gaung kemajuan dan gema pembaharuan itu sampai juga ke Indonesia. Di awal abad ke 20 muncullah beberapa tokoh-tokoh pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Para pembaharu itu banyak bergerak dibidang organisasi sosial, pendidikan dan politik. Di antaranya Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh Thaher Jalaluddin, Haji Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Syekh Ibrahium Musa, Zainuddin Labai Al-Yunusi, yang kesemuanya ini berasal dari Minangkabau.

Disamping itu, terjadi beberapa perubahan dalam sistem pendidikan Islam. Perubahan itu antara lain diperkenalkannya sistem klasikal pada lembaga-lembaga pendidikan Islam dan juga diperkenalkannya materi pelajaran yang tidak hanya tertumpu semata-mata kepada materi pelajaran agama dan kitab-kitab klasik. Berkenaan dengan itu muncullah suatu lembaga pendidikan Islam yang baru di Indonesia yaitu madrasah. Madrasah pada dasarnya adalah kombinasi dari dua sistem pendidikan yang telah lahir sebelumnya yaitu sistem pendidikan

sekolah yang didirikan oleh Belanda dan sistem pendidikan pesantren yang didirikan oleh umat Islam. Madrasah mengadopsi sistem kedua lembaga tersebut. Dari pesantren diambil mata pelajaran agamanya dan suasana hidup beragama sedangkan dari sekolah diambil sistem klasikal, administrasi pendidikan dan mata pelajaran umum. Dimasukkannya pengetahuan umum kedalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan tersebut adalah merupakan jawaban umat Islam di kala itu terhadap kemajuan zaman.

Di Jawa muncul tokoh KH. Ahmad Dahlan, dengan gerakan Muhammadiyah, A. Hasan dengan Gerakan Persatuan Islam (Persis), Haji Abdul Halim dengan gerakan Perserikatan Ulama. KH. Hasyim Asy'ari dengan organisasi Nahdatul Ulama. Tokoh-tokoh ini semuanya banyak bergerak dibidang pendidikan. Muncullah upaya-upaya untuk memperbaharui pendidikan Islam di Indonesia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa latar belakang pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama*, pembaharuan yang bersumber dari ide-ide yang muncul dari luar yang dibawa oleh para tokoh atau ulama yang pulang ke tanah air setelah beberapa lama bermukim di luar negeri (Makkah, Madinah, Kairo). Ide-ide yang mereka peroleh diparantauan itu menjadi wacana pembaharuan setelah mereka kembali ke tanah air.

Makkah sebagai tempat berkumpulnya umat Islam sedunia terutama pada musim haji, maka berbagai ide dan pemikiran keagamaan bertemu di tempat tersebut. Pemikiran-pemikiran keagamaan meliputi aqidah, fiqh sufistik dari berbagai penjuru

dunia Islam bertemu di Kota Suci Makkah. Demikian juga pemikiran dan gerakan-gerakan politik, tentu juga tidak ketinggalan pemikiran dan gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang muncul di abad ke sembilan belas.

Syaikh Thaher Djalaluddin, adalah salah seorang di antara pelajar Indonesia yang bermukim di Makkah untuk menuntut ilmu. Ia lahir di Ampek Angkek Bukit Tinggi pada tahun 1869. Beliau mempunyai hubungan langsung dengan Al-Azhar di Kairo, dan beliau banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhamad Abduh. Sekembalinya dari Makkah pada tahun 1900 beliau mendirikan Sekolah di Singapura dengan nama *al-Iqbâl al-Islâmiyah*. Disamping itu, beliau terbitkan pula majalah *Al-Imâm*. Majalah ini sering mengutip pendapat dari Muhamad Abduh dan juga pendapat yang dikemukakan oleh majalah Al-Manar di Mesir.

Syekh Thaher adalah orang yang dituakan dari tiga ulama lainnya yang juga sangat berpengaruh di Sumatera Barat, yaitu Syekh Muhammad Djamil Djambek, Haji Karim Amrullah dan Haji Abdullah Ahmad (Noer, 1980: 40). Pemikiran-pemikiran modernis yang mereka terima dari pergulatan pemikiran yang berkembang di dunia Islam ketika itu mereka bawa ke Indonesia. Muncullah gagasan dan ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia, seperti yang dicanangkan oleh H. Abdullah Ahmad dengan mendirikan *Adabiyah School* di tahun 1909 setelah beliau mengunjungi Sekolah *Al-Iqbâl* di Singapura.

Faktor yang bersumber dari kondisi tanah air juga banyak mempengaruhi pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Kondisi tanah air di Indonesia pada awal abad ke 20 adalah

dikuasai oleh kaum penjajah Barat. Dalam bidang pendidikan pemerintah kolonial Belanda melakukan kebijakan pendidikan diskriminatif. Lembaga pendidikan di kala itu dibagi atas tiga strata. Strata pertama adalah strata tertinggi yaitu sekolah untuk anak-anak Belanda yaitu sekolah ELS, HBS dan seterusnya ke perguruan tinggi. Strata kedua adalah untuk anak-anak bumi putra yang orang tuanya memiliki kemampuan ekonomi dan mempunyai posisi di pemerintahan, dapat disebut sebagai kelompok elit masyarakat Indonesia. Anak-anak mereka dimasukkan ke sekolah HIS, MULO, AMS selanjutnya ke perguruan tinggi. Strata terendah adalah anak-anak bumi putra yaitu kelompok orang kebanyakan hanya boleh mengecap pendidikan Sekolah Desa (3 tahun) atau Sekolah Kelas Dua (5 tahun).

Sementara itu, di kalangan umat Islam memiliki lembaga pendidikan pesantren, rangkang, dayah, surau. Dengan menekankan mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Pendidikan pesantren ini sama sekali amat berbeda sistemnya dengan sekolah-sekolah pemerintah. Melihat kondisi yang demikian itu, maka sebagian dari tokoh-tokoh Islam berupaya untuk melaksanakan pembaharuan dalam bidang pendidikan.

Di kalangan Muhammadiyah, berdirilah sekolah-sekolah yang mengambil nama sama dengan sekolah-sekolah pemerintah– HIS, MULO, AMS- yang diberi dengan muatan keagamaan. Sekolah yang demikian itu diberi nama *HIS Met De Qur'an*, *MULO Met De Qur'an* dan sebagainya.

Selain dari itu Abdullah Ahmad di Sumatera Barat mempelopori berdirinya madrasah, yang sistemnya mendekati dengan sekolah pemerintah, berbeda dengan sistem pesantren.

Steenbrink, menyebutkan ada beberapa faktor pendorong bagi pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia pada permulaan abad kedua puluh, yaitu :

a. Sejak tahun 1900, telah banyak pemikiran untuk kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah yang dijadikan titik-tolak untuk menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Tema sentralnya adalah menolak taklid. Dengan kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah mengakibatkan perubahan dalam bermacam-macam kebiasaan agama;
b. Dorongan kedua, adalah sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda;
c. Dorongan ketiga, adalah adanya usaha-usaha dari umat Islam untuk memperkuat organisasinya dibidang sosial ekonomi;
d. Dorongan keempat, berasal dari pembaharuan pendidikan Islam. Dalam bidang ini cukup banyak orang dan organisasi Islam, tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Qur'an dan studi agama. (Stanbrink, 1986 : 46-47).

Masuknya ide-ide pembahruan pemikiran Islam ke Indonesia, sangat besar pengaruhnya bagi terealisasinya pembaharuan pendidikan di Tanah Air.

2. Upaya Pembaharuan

Pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia ini dimulai dengan munculnya Sekolah Adabiyah. Sekolah ini adalah setara dengan sekolah HIS, yang di dalamnya agama dan Al-Qur'an diajarkan secara wajib. Dalam tahun 1915, sekolah ini menerima subsidi dari pemerintah dan mengganti namanya menjadi *Hollandsch Maleische School Adabiyah* (Noer, 1980: 52).

Menurut Mahmud Yunus sekolah Adabiyah ini adalah sekolah (agama) yang pertama memakai sistem klasikal, berbeda dengan pendidikan di surau-surau yang tidak berkelas-kelas, tidak memakai bangku, meja, papan tulis, hanya duduk bersila saja, dan juga madrasah (sekolah agama) yang pertama di Minang Kabau, bahkan diseluruh Indonesia. Adabiyah ini berperan sebagai madsarah (sekolah agama) sampai dengan tahun 1914. Dan pada tahun 1915 telah berubah menjadi HIS, seperti yang dikemukakan terdahulu.

Pada tahun 1915 Zainuddin Labai al Yunusi mendirikan Diniyah School (Madrasah diniyah) di Padang Panjang. Madrasah ini mendapat perhatian besar dari masyarakat Minangkabau. Setelah itu tersebarlah madrasah-madrasah pada beberapa kota dan desa di Minangkabau khususnya, dan di Indonesia umumnya (Yunus, 1979 : 63).

Pada tahap awal madrasah-madrasah yang ada di Sumatera Barat sebelum tahun 1931, terkonsentrasi mengajarkan mata pelajaran agama. Perbedaanya dengan surau adalah pertama madrasah ini memakai sistem klasikal. Kedua, kitab-kitab yang dibaca tidak selalu berpedoman kepada kitab-kitab klasik, tetapi memakai kitab-kitab baru, yaitu kitab-kitab yang dipelajari di sekolah-sekolah di Mesir. Ketiga, dimasukan dalam kurikulumnya sedikit pengetahuan umum seperti ilmu bumi dan menulis.

Sesudah tahun 1931 madrasah mengalami modernisasi, yaitu dengan memasukkan sejumlah mata pelajaran umum

ke madrasah, dipelopori oleh pelajar-pelajar yang pulang dari Mesir. Di Mesir mereka menerima pelajaran umum. Madrasah yang mula-mula memasukkan pengetahuan umum dalam rencana pelajarannya adalah:

a. Al-Jamiah Islamiyah di Sungayang Batusangkar, didirikan oleh Mahmud Yunus pada tanggal 20 Maret 1931. Al-Jamiah Islamiyah ini mempunyai tiga tingkatan :
   1) Ibtidaiyah, lama belajarnya 4 tahun. Pelajarannya :
      a) Ilmu-ilmu agama
      b) Bahasa Arab
      c) Pengetahuan umum yang sama tingkatannya dengan sekolah Schakel.
   2) Tsanawiyah, lama pelajarannya 4 tahun. Pelajarannya :
      a) Ilmu-ilmu agama
      b) Bahasa Arab
      c) Pengetahuan umum yang setingkat dengan Normal School
   3) Aliyah, lama belajarnya 4 tahun.
b. Normal Islam (kuliah *Mu'allimin Islamiyah*) didirikan oleh Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI) di Padang tanggal 1 April 1931 dan dipimpin oleh Mahmud Yunus.
c. *Islamic College*, didirikan oleh Persatuan Muslim Indonesia (Permi) di Padang pada tanggal 1 Mei 1931, dipimpin oleh Mr. Abdul Hakim, kemudian digantikan oleh Mukhtar Yahya Tahun 1935.

Selain itu, berdiri pula beberapa madrasah yang memasukkan pengetahuan umum dan pendidikan dalam rencana pelajarannya, seperti :

a. Training College didirikan tahun 1934;
b. Kuliah Muballighin/Muballighat;
c. Kuliah Muallimat Islamiyah didirikan tanggal 1 Pebruari 1937;
d. Kuliah Dianah didirikan tahun 1940;
e. Kuliahtul Ulum;
f. Kuliah Syariah;
g. Nasional Islamic College;
h. Modern Islamic College. (Yunus, 1979 : 102-103)

Perimbangan mata pelajaran umum dan agama antara satu madrasah dengan madrasah lainnya tidak sama, ada yang memasukkan mata pelajaran umum 30%, 40% dan ada pula 50%.

RENCANA PELAJARAN TSANAWIYAH AL-JAMI'AH ISLAMIYAH (TAHUN 1931 M) (4 KELAS)

No	Mata Pelajaran	KL.I	KL.II	KL.III	KL.IV
1	Agama	9	9	9	9
	a. Tafsir	2	2	2	2
	b. Hadits/musthalah	1	1	1	1
	c. Tauhid	1	1	1	1
	d. Fiqh/hikmah Tasyri'	4	4	4	4
	e. Usul Fiqh	1	1	1	1
2	Bahasa Arab	7	7	7	7
	a. Membaca	2	2	2	2
	b. Bercakap-cakap/ mengarang	1	1	1	1
	c. Hafalan	1	1	1	1
	d. Qawaid/Nahu Sharaf	3	3	3	3
3	Tarikh Islam	1	1	1	1
4	Sejarah Indonesia/dunia	2	2	2	2
5	Ilmu Bumi/Falak	2	2	2	2
6	Ilmu Alam	2	2	2	2
7	Ilmu Tumbuh-tumbuhan	1	1	1	1
8	Ilmu Hewan	-	-	-	-
9	Ilmu Tubuh Manusia	-	-	-	-
10	Ilmu Berhitung	2	2	2	2
11	Bahasa Inggris	2	2	2	2
12	Gerak Badan	1	1	1	1
	Jumlah	29	29	29	29

Sumber : Mahmud Yunus, 1979: 106

Keterangan : Pelajaran vak umum disamakan dengan pelajaran Normal School Pemerintah.

RENCANA PELAJARAN NORMAL ISLAM PADANG TAHUN 1931

No	Mata Pelajaran	KL.I	KL.II	KL.III	KL.IV
1	Ilmu-Ilmu Agama	6	6	5	4
2	Bahasa Arab	8	8	8	8
	a. Mengarang/berpidato	2	2	2	2
	b. Musthalah	2	2	2	2
	c. Mahfuzat	1	1	1	1
	d. Qawaid	2	2	2	2
	e. Adabul Lughah	2	2	2	2
3	Aljabar	2	2	2	2
4	Ilmu Ukur	1	1	1	1
5	Ilmu Alam/Kimia	2	2	2	2
6	Ilmu Hayat/Geologi	1	1	1	1
7	Ekonomi	-	-	1	1
8	Tarikh Islam	1	1	1	1
9	Sejarah Indonesia/dunia	2	2	2	2
10	Ilmu Bumi/Falak	2	2	2	2
11	Tata Negara	1	1	-	-
12	Bahasa Inggris/Belanda	3	3	3	3
13	Gerak Badan	1	1	1	1
14	Ilmu pendidikan	2	2	2	2
15	Ilmu Jiwa	-	-	1	1
16	Ilmu Kesehatan	1	1	-	-
17	Khat/Menggambar	1	1	1	1
	Jumlah	34	34	34	34

Sumber : Mahmud Yunus, 1979: 107

RENCANA PELAJARAN MADRASAH AWALIYAH DI MINANGKABAU TAHUN 1936 M

No	Pengajaran	KLAS I	KLAS II	KLAS III
1.	Bahasa Indonesia	6	6	5
2.	Bahasa Arab	-	2	2
3.	A g a m a	5	4	4
4.	Berhitung	5	5	5
5.	Ilmu bumi	-	-	1
6.	Menulis	3	2	2
7.	Melagu	1	1	1
8.	Menggambar	1	1	1
9.	Permainan (pergerakan badan)	2	2	2
Jumlah pengajaran seminggu @ 40 m.		23	23	23

Sumber: Mahmud Yunus, 1979: 113

Usaha-usaha pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia pada mulanya telah dimulai sejak awal abad kedua puluh. Dimotivasi baik oleh kondisi intern umat Islam maupun faktor extern. Dari uraian yang dikemukakan terdahulu dapat dimaklumi bahwa pembaharuan itu terkonsentrasi kepada dua hal yaitu sistemnya, dan meteri pelajaran. Sistemnya yang ada pada mulanya sebelum masuk ide-ide pembaharuan adalah sistem non klasikal, berubah menjadi sistem klasikal. Materi pelajaran sebelum masuk ide-ide pembaharuan terpusat kepada mata pelajaran agama melulu, dengan berpedoman kepada kitab-kitab klasik, dan setelah diinspirasi oleh ide-ide pembaharuan mata pelajarannya telah berimbang antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum.

3. Lembaga Pendidikan Islam Pada Masa Pembaharuan.

Gaung pembaharuan pemikiran Islam yang menggema di berbagai dunia Islam-Mesir, Turki, India akhirnya pada awal abad kedua puluh sampai juga ke Indonesia, dibawa oleh para pelajar yang pulang kembali ke Indonesia membawa pemikiran-pemikiran baru, salah satu di·antara pikiran-pikiran baru itu adalah dalam bidang pendidikan.

Pendidikan Islam sebelum dimasuki oleh ide-ide pembaharuan terpusat di pesantren, rangkang, dayah, surau. Ciri pendidikan di lembaga pendidikan tersebut adalah: *Pertama*, non klasikal, *kedua* metode *sorogan, wetonan,* dan hafalan, *ketiga*, materi pelajaran adalah terpusat kepada kitab-kitab klasik. Tinggi rendahnya ilmu seorang diukur dari penguasaannya kepada kitab-kitab tersebut.

Dengan masuknya ide-ide baru dalam bidang pendidikan, maka beberapa ciri dari lembaga pendidikan sebelum masuknya ide-ide pembaharuan tersebut disesuaikan dengan ide-ide pembaharuan. Sistem non-klasikal berubah menjadi klasikal dilengkapi dengan managemen pendidikan yang sudah barang tentu pada tahap awal masih sederhana. Metode mengajar guru tidak lagi semata-mata berpedoman kepada metode sorogan, wetonan dan hafalan, tetapi telah bervariasi sesuai dengan tuntutan sistem klasikal. Materi pelajaran tidak lagi semata-mata berpegang kepada materi pelajaran agama dengan titik tumpu pada kitab-kitab klasik. Masuknya mata pelajaran non keagamaan adalah merupakan salah satu indikasi penting tentang masuknya ide-ide pembaharuan di dunia Islam.

Muhammad Ali Pasha, sebagai seorang penguasa di Mesir

pasca Napoleon mengadakan reformasi pendidikan di Mesir dengan cara mendirikan berbagai lembaga pendidikan non keagamaan. Begitu juga Sultan Mahmud II di Turki, juga dapat digolongkan tokoh yang mempelopori berdirinya sekolah-sekolah non keagamaan di Turki, seperti yang telah disinggung terdahulu.

Lembaga pendidikan Islam yang muncul di Indonesia, untuk menyahuti ide pembaharuan itu adalah madrasah. Madrasah yang dalam bahasa Indonesia *ekwivalent* dengan sekolah. Di dunia Islam perkataan madrasah sudah lama dikenal, misalnya madrasah yang didirikan oleh Nuruddin Zinki penguasa Syria dan Mesir. Beliaulah yang mula-mula mendirikan madrasah di Damaskus. Tidak kalah terkenalnya juga madrasah yang didirikan oleh Nizamul Mulk. Mengenai ini Shalaby berkomentar Abu Samah menulis : "Sekolah-sekolah Nizamul Mulk termasyhur di dunia. Tidak ada satu negeripun yang disitu tidak berdiri madrasah Nizamul Mulk sehingga di Pulau Ibnu Umar yang terpencil di sudut dunia yang jarang didatangi manusia disitupun didirikan Nizamul Mulk suatu sekolah yang besar lagi bagus. Itulah yang dikenal sekarang (yakni dimasa Abu Syamah) dengan nama Madrasah Radhiuddin" (Syalaby, 1976: 88).

Di antara madrasah yang didirikan oleh Nizamul Mulk itu adalah Nizamiyah Bagdad yang paling penting dan yang mula-mula didirikan. Pembangunannya dilaksanakan tahun 457 H selesai 459 H.

Gambaran selintas yang dikemukakan di atas ini menunjukkan bahwa pada abad ke 5 H dunia Islam telah mengenal perkataan madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam.

Sedangkan di Indonesia perkataan madrasah sebagai nama dari sebuah lembaga pendidikan Islam baru populer setelah awal abad kedua puluh. Lembaga pendidikan Islam yang populer di kala itu adalah lembaga pendidikan yang bersifat indegenius, yaitu pesantren, rangkang, dayah dan surau. Nama-nama lembaga ini bila ditelusuri sejarahnya telah muncul sebelum Islam masuk ke Indonesia. Lembaga pendidikan semacam pesantren misalnya telah muncul sejak zaman Hindu-Budha, dan sejak agama jawa kuno berperan di Indonesia. Setelah Islam masuk dilaksanakan proses Islamisasi didalamnya. Begitu juga dengan lembaga surau di Sumatera Barat, telah muncul sejak zaman Aditiawarman. Perkataan yang bersumber dari bahasa setempat itu menjadi hidup di kalangan umat Islam tanpa ada upaya untuk merubahnya.

Masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia menjadi sumber inspirasi bagi para pembaharu untuk mengadopsi nama madrasah sebagai nama sebuah lembaga pendidikan Islam yang telah disemangati oleh semangat baru.

Timur Tengah, khususnya Mesir adalah daerah inspirator bagi munculnya ide pembaharuan pendidikan. Apa sebab ? karena Mesir pada abad kesembilan belas setelah Napoleon meninggalkan Mesir dibawah kendali dari Muhammad Ali Pasha telah banyak mendirikan sekolah-sekolah umum seperti Sekolah Militer, Sekolah Teknik, Sekolah Kedokteran. Selain dari itu Mesir juga pada abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh adalah menjadi sentral gerakan pembaharuan pemikiran Islam, yang dipelopori Said Jamaluddin Al- Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Rido, serta murid-

murid Muhammad Abduh lainnya. Khusus Muhammad Abduh yang banyak bergerak dalam bidang pemikiran kependidikan sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia, lewat pelajar-pelajar Indonesia yang sedang belajar di Timur Tengah, utamanya Mesir. Bagi pelajar-pelajar Islam yang menuntut ilmu di Makkah dan Madinah kendatipun suara pembaharuan yang muncul dari dua Kota Suci ini tidak sepopuler suara yang muncul dari lembah sungai Nil. Namun karena komunikasi antar pelajar itu tetap berjalan dengan baik, maka bukanlah sesuatu yang mustahil ide-ide yang berkembang di Mesir sampai juga kepada pelajar-pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Makkah–Madinah.

Salah seorang diantara pelajar Indonesia yang sedang belajar di Makkah yang mendapat masukan ide-ide pembaharuan itu adalah Haji Abdullah Ahmad. Beliau lahir di Padang Panjang tahun 1878. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya di sekolah pemerintah dan pendidikan agamanya di rumah, ia pergi ke Makkah pada tahun 1895 dan kembali ke Indonesia tahun 1899, ia mengajar di Padang Panjang, ikut serta memberantas bid'ah dan tarikat. Iapun tertarik dengan penyebaran pemikiran pembaharuan melalui publikasi dengan jalan menjadi agen dari berbagai majalah pembaharuan.

Haji Abdullah Ahmad tertarik untuk mendirikan pendidikan yang sistematis, sebab tidak semua anak-anak dari Padang Panjang yang dapat masuk sekolah-sekolah pemerintah. Hal ini mendorongnya untuk membuka sekolah Adabiyah, dengan bantuan para pedagang pada tahun 1909 setelah ia mengunjui sekolah al-Iqbal di Singapura (Noer, 1980: 52).

Menurut Mahmud Yunus, sekolah (Adabiah School) di Padang adalah madrasah (sekolah agama) yang pertama di Minagkabau, bahkan di seluruh Indonesia. Madrasah ini pada tahun 1915 menjadi HIS Adabiah dan inilah HIS yang pertama di Minangkabau yang memasukkan mata pelajaran agama dalam rencana pelajarannya.

Deliar Noer, mengomentari sekolah ini: *"Sekolah Adabiah ini didirikan pada tahun 1909 di Padang dengan kira-kira 20 orang murid. Kebanyakan adalah anak-anak pedagang setempat, sekolah ini tetap merupakan sekolah dasar yang sama dengan sekolah HIS (Hollands Inlandse School), agama dan Al-Qur'an wajib diajarkan. Pada tahun 1915 sekolah ini menerima subsidi dari pemerintah dan mengganti namanya menjadi Hollandsch Maleische School Adabiyah. Kepala Sekolahnya pada waktu itu adalah seorang Belanda, dan oleh sebab itu maksud agar sekolah itu merupakan tiang tumpuan bagi golongan pembaharu, menjadi hilang, sejak itu sekolah ini seakan-akan terpisah dari kegiatan dan cita-cita kaum muda. Pelajaran agamapun kurang diperhatikan."* (Noer, 1980 : 52).

Steenbrink, mengomentari bahwa perbedaan antara sekolah Adabiyah dengan HIS lainnya di Padang adalah terletak kepada pemberian mata pelajaran agama 2 jam perminggu yang diberikan oleh Abdullah Ahmad sendiri. Sekolah HIS lainnya hanya terbuka bagi anak-anak pegawai dan keluarga tertentu saja, sedangkan sekolah Adabiyah terbuka bagi setiap orang yang dapat membayar uang sekolah, oleh karena itu sekolah ini amat laku dan disukai oleh anak-anak pedagang.

Berhubung karena kecilnya porsi pendidikan agama di

sekolah ini sedangkan seluruh unsur tradisional dalam waktu beberapa tahun saja telah ditinggalkan. Dan hal ini tidak bisa diterima oleh kalangan ulama tradisional Minangkabau atas perubahan yang cepat itu.

Merujuk kepada beberapa komentar tersebut ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai kesimpulan. *Pertama,* semangat dan ide pembaharuan pendiikan Islam yang muncul pada awal abad kedua puluh itu adalah upaya untuk memperbaharuhi sistem, metode dan materi. *Kedua*, pembaharuan itupun pada dasarnya tidak bisa melepaskan diri dari sistem pendidikan kolonial yang berlaku pada waktu itu. *Ketiga*, ide-ide pembaharuan itu sendiripun belum seluruhnya dapat diterima masyarakat Muslim terutama ulamanya.

Seirama dengan lahirnya Sekolah Adabiyah di Padang, maka di berbagai tempat lain di Sumatera Barat muncul pula beberapa lembaga pendidikan madrasah. Pada tahun 1910 Syekh M. Thaib Umar mendirikan Madrasah School. Tiga tahun kemudian madrasah ini ditutup, dan dibuka kembali pada tahun 1918 oleh Mahmud Yunus, dan pada tahun 1923 madrasah ini menjadi Diniyah School. Rangkayo Rahmah el-Yunusiah pada tahun 1923 mendirikan Madrasah Diniyah Putri di Padang Panjang, sedangkan sebelumnya yakni tahun 1915 Zainuddin Labai el-Yunusi mendirikan Madrasah Diniyah di Padang Panjang.

Madrasah yang didirikan Zainuddin Labai ini adalah memakai sistem klasikal dengan susunan pelajaran yang terpadu antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu umum. Di Madrasah ini mengajarkan dasar-dasar bahasa Arab, kemudian

melatih pembacaan Al-Qur'an. Pengetahuan umum yang diberikan adalah sejarah dan ilmu bumi. (Maksum, 1999: 103).

Madrasah yang dibangun oleh Zainuddin Labai ini berbeda dengan madrasah yang dibangun oleh Abdullah Ahmad. Madrasah yang dibangun oleh Abdullah Ahmad lebih mirip dengan sekolah kolonial Belanda, yang diberikan sedikit pelajaran agama, sekitar 2 jam pelajaran seminggu, oleh karena itu seperti komentar Deliar Noer dan Steenbrink tersebut menggambarkan betapa sekolah yang dibangun oleh Abdullah Ahmad ini kurang mendapat dukungan dari ulama. Agaknya jika dibandingkan dengan zaman sekarang sekolah ini sama dengan sekolah umum yang diberi mata pelajaran agama.

Sedangkan yang dibangun oleh Zainuddin Labai adalah sekolah yang berbasis agama, kemudian diberi tambahan dengan pengetahuan umum. Karena itu madrasah ini mendapat sambutan di daerah-daerah pedesaan, karenanya dalam masa yang singkat terdata 15 sekolah di Sumatera Barat yang mengikuti pola madrasah diniyah ini menjadi model bagi pembaharuan pendidikan Islam (Maksum, 1999 : 103).

Di antara madrasah yang perlu mendapat perhatian adalah madrasah Diniyah Putri Padang Panjang. Madrasah ini didirikan oleh Rangkayo Rahmah Elyunisiah. Madrasah ini adalah khusus mengasuh pelajar-pelajar putri. Mata Pelajarannya adalah: fiqh, tafsir, tauhid, hikmah tasyri, adab (ahklaq), hadits, nahwu, syaraf, ilmu bumi, usul fiqh, 'arud, tarikh Islam, menulis Arab, keputrian, pendidikan rumah tangga, bahasa Inggris, Belanda, ilmu bumi dan sebagainya (Maksum, 1999 : 103).

Sama halnya dengan di Sumatera Barat, di Jawa juga

berkembang madrasah. Pada tahun 1914 KH. A. Wahab Hasbullah dan KH Mas Mansur mendirikan Madrasah Taswirul Afkar, pada mulanya madrasah ini hanya sebagai tempat kursus, diskusi dan musyawarah selanjutnya menjadi madrasah. Pada tahun 1919 KH. Hasyim As'ary mendirikan Madrasah Salafiyah.

Beberapa organisasi Islam yang berdiri di Jawa pada awal abad kedua puluh banyak pula terlibat dengan mendirikan madrasah, misalnya Muhammadiyah yang didirikan oleh KH.A.Dahlan pada tahun 1912, di samping mendirikan sekolah umum yang mengambil nama sekolah Belanda, organisasi ini juga mendirikan madrasah.

Al-Irsyad didirikan di Jakarta pada tahun 1913, organisasi ini juga mengasuh sekolah umum dan madrasah. Mathla'ul Anwar didirikan di Menes Banten, oleh KH. Mohammad Yasin juga mengasuh pula tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah.

Organisasi Perhimpunan Umat Islam (PUI) yang didirikan oleh KHA. Halim pada tahun 1917, juga mendirikan Madrasah Diniyah (6 tahun), Madrasah Tsanawiyah (4 tahun) dan Madrasah Pertanian (4 tahun). Nahdatul Ulama yang didirikan tahun 1926 mendirikan Madrasah Awaliah (2 tahun), Madrasah Ibtidaiyah (2 tahun), Madrasah Tsanawiyah (3 tahun), Madrasah Muallimin Ulya (3 tahun). Al-Jamiyatul Washliyah yang didirikan di Medan pada tahun 1930, mendirikan madrasah dengan susunan sebagai berikut : Madrasah Tajhiziyah (2 tahun), Madrasah Ibtidaiyah (4 tahun), Madrasah Tsanawiyah (3 tahun), Madrasah Qismul Ali (3 tahun), Madrasah Takhassus (2 tahun).

Abdul Halim telah terpengaruh dengan dua lembaga pendidikan yang ditemukannya sewaktu dia masih belajar di Makkah. Pertama di Bab al-Salam dekat Makkah dan yang kedua di Jeddah, yang menurut ceritanya telah menghapuskan sistem *halaqah* dan sebagai gantinya mengorganisir kelas-kelas serta menyusun kurikulum serta mempergunakan bangku dan meja. Lembaga-lembaga ini merupakan contoh baginya untuk mengubah sistem pendidikan tradisional di daerah asalnya sekembali ke tanah air. (Noer: 53)

Pada tahun 1932 Abdul Halim dalam satu Kongres Perserikatan Ulama di Majalengka mengusulkan agar sebuah lembaga didirikan guna memberikan berupa pekerjaan tangan, perdagangan dan pertanian.

Dari deskripsi di atas dapat dimaklumi bahwa mulai dari awal abad kedua puluh di Indonesia telah populer nama madrasah, sehingga banyak muncul lembaga pendidikan Islam yang mengambil nama madrasah, oleh karena madrasah ini tumbuh dan berkembang secara independen baik yang dibangun oleh perorangan maupun organisasi, maka madrasah-madrasah tersebut tidak memiliki keseragaman baik mengenai tingkatan, begitu juga rencana pelajarannya.

Dipandang dari sudut madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang membawa semangat pembaharuan. Hal ini dapat dilihat dari madrasah sebagai gabungan dari dua sistem pendidikan yang ada telah muncul sebelumnya, yaitu pesantren dan sekolah, lembaga yang ketiga ini (madrasah) adalah hasil perpaduan dari dua sistem sebelumnya.

Ada unsur yang diadopsi madrasah dari pesantren dan

ada pula unsur yang diambil dari sekolah. Unsur yang dari pesantren adalah ilmu-ilmu keagamaan dan ruh (semangat) keberagaman, sedangkan unsur yang diambil dari sekolah adalah ilmu-ilmu pengetahuan umum serta sistem dan manajemen sekolah. Atas dasar itulah maka madrasah dikelompokkan kepada lembaga pendidikan Islam yang telah mengadopsi ide-ide pembaharuan.

Perkembangan berikutnya madrasah berevolusi dari sistem pendidikan Islam yang pada mulanya lebih menekankan kepada ilmu-ilmu keagamaan, berkembang menjadi lembaga pendidikan yang dikelompokkan kepada lembaga pendidikan sekolah yang berciri khas agama Islam. Pada saat madrasah telah merubah diri menjadi sekolah yang berciri khas agama Islam bermakna bahwa madrasah telah menitik beratkan mata pelajaran yang diajarkan di dalamnya adalah mata pelajaran umum.

4. Ciri-Ciri Pendidikan Islam Pada Masa Pembaharuan

Steenbrink mengemukakan bahwa ada 4 faktor pendorong bagi perubahan Islam di Indonesia. Salah satu dari keempat faktor itu adalah dorongan yang berasal dari pembaharuan pendidikan Islam. Menurut beliau, cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Qur'an dan studi agama, maka pribadi-pribadi dan organisasi Islam pada permulaan abad kedua puluh ini berusaha memperbaiki pendidikan Islam, baik dari segi metode maupun isinya. Mereka juga mengusahakan kemungkinan memberikan pendidikan umum untuk orang Islam.

Ada beberapa indikasi pendidikan Islam sebelum dimasuki oleh ide-ide pembaharuan:

a. Pendidikan yang bersifat non klasikal. Pendidikan ini tidak di batasi atau ditentukan lamanya belajar seseorang berdasarkan tahun. Jadi seseorang bisa tinggal di suatu pesantren, satu tahun atau dua tahun, atau boleh jadi beberapa bulan saja, bahkan mungkin juga belasan tahun.
b. Mata pelajaran adalah semata-mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Tidak ada diajarkan mata pelajaran umum.
c. Metode yang dipergunakan adalah metode sorongan, wetonan, hafalan dan *muzâkarah*.
d. Tidak mementingkan ijazah sebagai bukti yang bersangkutan telah menyelesaikan atau menamatkan pelajarannya.
e. Tradisi kehidupan pesantren amat dominan di kalangan santri dan kyai. Ciri dari tradisi itu adalah antara lain kentalnya hubungan antara kyai dan santri. Hubungan batin ini berlangsung terus sepanjang masa. Kontak-kontak pribadi itulah yang terpelihara sepanjang masa. Santri yang telah menyelesaikan pelajaran di suatu pesantren bisa jadi pindah ke pesantren lain atau mendirikan pesantren baru, namun kontak pribadinya dengan kyai di mana dia pernah berguru masih tetap terpelihara.

Dipandang dari sudut masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke dalam dunia pendidikan, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperbaharui. *Pertama*, metode yang tidak puas hanya dengan metode tradisional pesantren saja, tapi

diperlukan metode-metode baru yang lebih merangsang untuk berpikir. *Kedua*, isi atau materi pelajaran sudah perlu diperbaharui, tidak hanya mengandalkan mata pelajaran agama semata-mata yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Sebab masyarakat Muslim sejak awal abad kedua puluh di Indonesia telah merasakan peranan ilmu pengetahuan umum bagi kehidupan individu maupun kolektif. *Ketiga*, manajemen. Manajemen pendidikan adalah keterkaitan antara sistem lembaga pendidikan dengan bidang-bidang lainnya di pesantren.

Ketiga macam ini merupakan tuntutan terhadap kebutuhan dunia pendidikan Islam di kala itu. Dengan demikian, jika ide-ide pembaharuan itu diterapkan dalam dunia pendidikan Islam, maka ianya merupakan salah satu jalan menuju perbaikan pendidikan Islam di Indonesia.

Dari berbagai uraian terdahulu, dapat dikemukakan beberapa indikasi terpenting dari pendidikan Islam pada masa pembaharuan, yakni. *Pertama*, dimasukkannya mata pelajaran umum ke madrasah. *Kedua* penerapan sistem klasikal dengan segala kaitannya. *Ketiga*, ditata dan dikelola administrasi sekolah dengan tetap berpegang kepada prinsip manajemen pendidikan. *Keempat* lahirnya lembaga pendidikan Islam yang baru yang diberi nama dengan nama madrasah.

C. MADRASAH DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

1. Latar Belakang

Pendidikan Islam telah berlangsung sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, dilaksanakan dengan cara tradisional.

Setelah memasuki awal abad kedua puluh di kalangan dunia Islam termasuk Indonesia telah dimasuki oleh semangat pembaharuan, digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan dan pencerahan (*renaisance*) (Steenbrink, 1986: 26).

Ide-ide pembaharuan itu juga memasuki dunia pendidikan. Timbulnya ide pembaharuan dalam bidang pendidikan adalah karena banyaknya orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Al-Qur'an dan studi Islam. Pribadi-pribadi dan organisasi Islam pada awal abad ke 20 berusaha memperbaiki pendidikan Islam baik dari segi isi maupun metode (Steenbrink, 1986: 27-28). Realisasi dari ide pembaharuan tersebut timbulnya usaha mendirikan madrasah.

Sampai pada tahun 1930 mata pelajaran yang diajarkan di madrasah-madrasah ini adalah semata-mata pelajaran agama, kemudian sebagian madrasah mulai 1930-an memasukkan mata pelajaran umum. Kendatipun mata pelajaran umum telah dimasukkan namun tekanan madrasah adalah tetap mata pelajaran agama dengan tujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang ahli dalam ilmu agama.

Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan akan mata pelajaran umum untuk dimasukkan ke dalam kurikulum madrasah semakin merata, sebagai tuntutan zaman. Dengan demikian, timbullah berbagai variasi di dalam memperseimbangkan antara mata pelajaran umum dan agama di lingkungan madrasah, dan di dalam memperseimbangkan itu mata pelajaran umum mendapat porsi yang sedikit. Ada yang berbanding 50: 50,. 60: 40, 30: 70, bahkan ada yang berbanding 10:90. (Kafrawi, 1978:103).

Sebagai akibat dari perbandingan antara mata pelajaran umum dan agama seperti yang tertera di atas, maka ijazah madrasah mempunyai nilai yang tidak sama dengan ijazah sekolah-sekolah umum yang diasuh oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ketidaksamaan nilai ijazah tersebut dapat dilihat dari dua hal; *pertama*, kesempatan untuk melanjutkan studi bagi lulusan madrasah hanya terbatas kepada Perguruan Tinggi Agama saja dalam hal ini IAIN. Lulusan madrasah tidak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studinya ke fakultas-fakultas umum, baik fakultas-fakultas eksakta maupun fakultas-fakultas ilmu sosial. Hal yang demikian ini tentu saja tidak menguntungkan bagi tamatan madrasah, dan lebih ironisnya lagi generasi muda Islam yang dididik di madrasah tidak memiliki kesempatan untuk menjadi tenaga ahli dalam bidang ilmu-ilmu eksakta dan ilmu-ilmu sosial.

Kedua, kesempatan untuk mencari pekerjaan bagi lulusan madrasah juga terbatas bila dibanding dengan lulusan sekolah umum. Instansi pemerintah, swasta lebih mengutamakan lulusan sekolah umum dari pada lulusan madrasah untuk bekerja di instansi mereka, bahkan ada yang tidak menerima lulusan madrasah sama sekali.

Berdasarkan dua hal tersebut menjadikan madrasah berada pada posisi marginal. Dan hal ini tentu saja tidak menguntungkan. Untuk itu perlu dicarikan upaya pemecahannya sehingga kedudukan madrasah sama dan setara dengan sekolah-sekolah umum.

Inti atau esensi permasalahan yang menyebabkan ketidaksamaan ijazah madrasah dan sekolah umum terletak pada kurikulumnya. Seandainya kurikulum madrasah diperbaharui sehingga tamatan madrasah dapat menguasai ilmu-ilmu yang dikuasai oleh tamatan sekolah umum, maka permasalahan nilai ijazah di antara kedua bentuk pendidikan itu dapat diwujudkan.

Untuk merealisasi ide menyamakan status lulusan madrasah dengan sekolah umum, maka pada tahun 1975, keluarlah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

Inti dari SKB Tiga Menteri itu adalah :

1. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat;
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas;
3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. (SKB Tiga Menteri Tahun 1975 Bab II pasal 2).

Ketiga point di atas ini adalah pemberian hak yang diperoleh madrasah yang belum pernah dimilikinya seperti itu sebelumnya. Dan ketiga point itu juga mengandung makna baik implisit maupun eksplisit bahwa status dan derajat Madrasah SKB Tiga Menteri sama dengan sekolah umum.

Apa sebab hal itu bisa diberikan kepada madrasah ? Hal ini tidak lain oleh karena madrasah lewat SKB Tiga Menteri telah mengadakan pembaharuan kurikulum. Kalau pada tahun-tahun sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri bobot mata pelajaran umum lebih kecil dari mata pelajaran agama, maka setelah SKB Tiga Menteri dikeluarkan, madrasah memiliki

bobot 70% mata pelajaran umum dan 30% mata pelajaran agama.

Dengan pertimbangan yang demikian ini diharapkan lulusan madrasah akan memiliki bobot yang sama dengan lulusan sekolah umum. Di sisi lain kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi terhadap madrasah. Hal ini berakibat akan semakin cerahnya kehidupan madrasah di Indonesia.

Madrasah pasca Undang-Undang Sistem Pendididkan Nasional disebutkan sebagai sekolah yang berciri khas Islam. Pemaknaan ini adalah madrasah sama dengan sekolah yang diperkuat dengan ciri-ciri keislaman berupa ilmu keislaman dan lain sebagainya.

Madrasah pada tingkat Aliyah sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 dibagi kepada dua: *Pertama*, Madrasah Aliyah (MA) dan kedua Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Madrasah Aliyah (MA) adalah sekolah umum yang berciri khas Islam. Dengan demikian, kurikulumnya persis seperti yang ada pada sekolah umum yang diberi ciri keislaman. Sedangkan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dipersiapkan untuk siswa yang akan mempelajari ilmu-ilmu keterampilan.

Ditinjau dari segi pelaksanaannya, tentu saja mengalami berbagai masalah, antara lain tenaga pengajar, sarana dan fasilitas, waktu/jam pelajaran dan dana.

Pembaharuan kurikulum di dunia pendidikan bukanlah hal yang aneh, tetapi malah merupakan keharusan demi menghadapi perkembangan masyarakat. Pola-pola lama dirubah untuk mencari pola-pola baru merupakan dinamika dalam kehidupan manusia. Munculnya ide-ide dan upaya-

upaya pembaharuan pendidikan itu erat kaitannya dengan kebutuhan persamaan status di kalangan masyarakat. Pendidikan yang berbeda bisa menyebabkan status yang berbeda di masyarakat. Stratifikasi masyarakat juga erat kaitannya dengan pendidikan. Kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas akan menjadi kelompok dominan. Sedangkan kelompok yang tidak memperoleh pendidikan yang tidak baik serta pendidikan yang tidak menjamin masa depan bisa cenderung menjadi kelompok minoritas.

Timbulnya apa yang disebut *caste-like* (semacam kasta), dalam tulisan John U Ogbu yang berjudul : *Equalization of Educational Opportunity and Racial/Ethnic Inequality*, erat kaitannya dengan masalah pendidikan. Dalam tulisan ini Ogbu melihat adanya kelompok dominan dan kelompok minoritas. Kelompok pertama dominan dalam hal ekonomi dan pendidikan, sedangkan kelompok kedua terbelakang dalam kedua hal itu. Khusus dalam bidang pendidikan, kaum minoritas memperoleh pendidikan yang lebih rendah, yang ini sudah barang tentu berakibat rendahnya penghasilan kaum minoritas (Ogbu, 1982: 273-274). Disisi lain dengan rendahnya pendidikan kaum minoritas tersebut, maka sulit bagi mereka untuk meniti karier dan mobilitas status. Berdasarkan uraian Ogbu dalam tulisan ini dapat dipetik suatu pengertian: bahwa erat sekali hubungan timbulnya *caste-like* dengan pendidikan.

Di Indonesia, sebelum kemerdekaan adanya batasan-batasan tertentu bagi anak-anak pribumi untuk memperoleh pendidikan. Bagi seseorang lulusan Sekolah Desa, dan Sekolah Kelas Dua jelas sudah tidak mungkin baginya untuk memasuki MULO, AMS, yang merupakan jenjang ke pendidikan tinggi,

sehingga dengan demikian hanya segelintir kecil sajalah orang-orang Indonesia yang bisa mengecap pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Hal ini tentu saja memiliki dampak yang tidak baik terutama untuk mobilitas status bagi masyarakat pribumi.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak Indonesia untuk memasuki dunia pendidikan mulai dari tingkat rendah sampai perguruan tinggi. Hanya saja karena madrasah-madrasah pada waktu itu lebih diarahkan untuk membentuk orang-orang yang ahli dalam ilmu agama saja, maka tamatan madrasah terbatas ruang lingkupnya untuk memasuki perguruan tinggi.

Melihat kondisi yang demikian itu, maka perlu diciptakan suatu peraturan yang memungkinkan tamatan madrasah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi umum. Dengan demikian lahirlah SKB Tiga Menteri. Kondisi yang membatasi lulusan madrasah tidak boleh melanjutkan ke perguruan tinggi umum, bisa berakibat fatal bagi umat Islam Indonesia, sebab anak-anak yang berasal dari keluarga Muslim yang taat yang memasuki madrasah tidak memperoleh kesempatan untuk menjadi tenaga ahli dalam bidang-bidang ilmu eksakta dan ilmu-ilmu sosial.

Diskriminasi dalam bidang pendidikan berdampak jauh terhadap mobilitas sosial suatu masyarakat. Pada saat adanya diskiriminasi pendidikan di Indonesia pada zaman pemerintahan Belanda sebagai bagian dari kebijakan pendidikan Belanda, maka mayoritas masyarakat Muslim Indonesia tidak memperoleh

pendidikan yang layak, maka tidak heran mereka tertinggal dalam berbagai kehidupan. Begitu juga pada saat madrasah belum diperbaharui, belum dikeluarkan SKB Tiga Menteri, maka lulusan madrasah sangat terbatas di dalam melanjutkan studinya.

2. Dikotomi Pendidikan dan SKB 3 Menteri

Seperti yang telah diungkapkan terdahulu bahwa inti dari SKB Tiga Menteri Tahun 1975 adalah peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, peningkatan meliputi:

1. Kurikulum;
2. Buku-buku pelajaran, alat-alat pendidikan lainnya dan sarana pendidikan pada umumnya;
3. Pengajar (SKB Tiga Menteri Bab III pasal 3).

Hasil dari peningkatan tersebut *civil effect* ijazah madrasah sama dengan ijazah sekolah umum, seperti yang tertera dalam bab II pasal 2 SKB Tiga Menteri yang dituliskan terdahulu.

Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri tahun 1975 kita melihat adanya perbedaan yang mendasar antara lulusan madrasah dengan sekolah umum. Perbedaan yang mendasar itu terlihat nyata sekali di dalam dua hal: *Pertama*, di dalam kesempatan untuk melanjutkan studi. Dalam hal ini lulusan madrasah tidak memiliki kesempatan untuk memasuki universitas umum negeri, mereka hanya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi agama seperti IAIN atau Perguruan Tinggi Agama Swasta. Setelah adanya SKB Tiga Menteri, maka lulusan madrasah

telah memiliki kesempatan untuk memasuki universitas umum negeri.

Kesempatan melanjutkan studi adalah salah satu bagian dari pemerataan pendidikan. Josep D. Farrell mengemukakan, bahwa di negara-negara berkembang salah satu problema yang dihadapi dalam pendidikan ini adalah pemerataan kesempatan melanjutkan pendidikan. Banyak anak-anak di negara-negara berkembang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke lembaga yang lebih tinggi bahkan banyak pula yang *drop out*. (Farrell, 1982:45-46).

Perbedaan *kedua* adalah dari segi kesempatan kerja. Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri kesempatan untuk menjadi pegawai negeri maupun swasta, bagi tamatan madrasah hanya terbatas dalam lingkungan Kementerian Agama atau lembaga-lembaga keagamaan saja. Tetapi dengan adanya SKB Tiga Menteri ini kesempatan itu lebih luas.

Keterbatasan pekerjaan menimbulkan keterbatasan penghasilan dan keterbatasan memperoleh upah yang tinggi. Seperti yang dialami kelompok-kelompok minoriti diberbagai negara. Umat Islam Indonesia kendatipun mayoritas dari segi jumlah, tetapi bisa memiliki peranan minoriti apabila terbelakang di dalam dunia pendidikan.

Dari sisi lain, dapat juga dilihat bahwa SKB Tiga Menteri itu adalah upaya untuk menimbun jurang pemisah antara lulusan madrasah dengan sekolah umum. Upaya menimbulkan jurang itu amat diperlukan dalam rangka untuk menghilangkan dua pola pikir generasi Indonesia di masa mendatang.

Bila direnungkan lebih mendalam lagi maka pada hakekatnya

madrasah SKB Tiga Menteri itu tiada lain adalah sekolah umum plus. Pada tingkat sekolah dasar yaitu Ibtidaiyah sama dengan SD Plus, ditingkat SLTP yaitu Tsanawiyah sama dengan SMP Plus dan ditingkat SLTA yaitu Madrasah Aliyah sama dengan SMA Plus. Plusnya di sini adalah mata pelajaran agama dan bahasa Arab yang tidak mungkin mereka peroleh apabila mereka memasuki sekolah umum.

Sebenarnya bila kita menukikkan pandangan lebih mendalam tentang konsep pendidikan dalam Islam baik yang bersumber dari ajaran dasar yakni Al-Qur'an maupun Hadits begitu juga praktek yang dilakukan oleh umat Islam pada zaman kejayaan Islam, dapat kita lihat bahwa Islam tidak memisahkan antara ilmu diniyah (agama) dengan ilmu umum. Bahkan bila diteliti secara cermat Islam tidak mengenal pembahagian ilmu tersebut dengan peristilahan ilmu agama dan ilmu umum. Sebab apa yang kita sebut dengan ilmu umum misalnya kelompok-kelompok ilmu-ilmu kealaman (*natural science*) dan kelompok-kelompok ilmu-ilmu sosial (*social science*), ada yang kelompok-kelompok ilmu yang dianjurkan bahkan ada yang sampai kepada tingkat wajib sekurang-kurangnya wajib khifayah untuk dipelajari.

Sehubungan dengan masalah ini, sangat menarik apa yang diungkapkan oleh Zakiah Daradjat. Pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA), yang tegas-tegas digolongkan dalam mata pelajaran umum, namun Islam mendorong untuk mengetahuinya agar alam raya dengan segala makhluk yang ada didalamnya dapat diketahui dan diolah untuk kemanfaatan umat manusia. Pelajaran Matematika juga tegas-tegas berada dalam kelompok mata pelajaran umum. Padahal pengetahuan

Matematika sangat diperlukan sebagai dasar bagi pengetahuan teknologi yang akan digunakan dalam pengelola alam yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia (Daradjat, 1977: 3).

Pengetahuan dalam bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran umum, yang juga diperlukan oleh setiap orang Islam, agar ia dapat mengenal bangsa-bangsa, peraturan-peraturan dasar yang berlaku dalam negara dan masyarakat pada umumnya. (Daradjat, 1977: 4).

Pengetahuan Bahasa (Indonesia, Inggris dan sebagainya) juga tergolong mata pelajaran umum. Akan tetapi bagi seorang muslim di Indonesia kedua bahasa itu juga diperlukan di samping bahasa Arab.

Pendek kata semua pelajaran yang dalam kurikulum terkelompok dalam mata pelajaran umum itu, sebenarnya perlu pula diketahui dan dipahami oleh seorang Islam, untuk dapat melaksanakan perintah Allah. (Daradjat, 1977: 4).

Berdasarkan pandangan di atas dapat dsimpulkan bahwa Islam pada hakekatnya sangat menganjurkan untuk mempelajari ilmu-ilmu umum walaupun sebetulnya batas yang tegas antara ilmu yang digolongkan kepada ilmu-ilmu umum dan agama itu sulit untuk menentukannya. Sebab apa yang dikatakan dengan ilmu umum itu ternyata sangat dianjurkan oleh Islam untuk dipelajari.

Bila kita kembali kepada sejarah di saat kejayaan Islam baik di dunia timur, maupun di barat (Andalusia), pada saat itu pembidangan ilmu tidak hanya ilmu-ilmu diniyah (agama) saja yang dikembangkan dan diperhatikan tetapi juga ilmu-ilmu umum seperti kedokteran, matematika, fisika, astronomi,

dan berbagai bidang ilmu alam dan kemasyarakatan. (Nasr, 1970:60).

Berbagai madrasah di kala itu di samping mengajarkan ilmu-ilmu diniyah juga mengajarkan ilmu-ilmu umum, seperti halnya Madrasah Al-Mustanshiriyah di Baghdad didirikan oleh Khalifah Al-Mustansir Billah tahun 631 H. Ilmu-ilmu yang diajarkan di madrasah tersebut adalah ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu-ilmu syari'ah, bahasa Arab, kedokteran, ilmu pasti. (Yunus, 1981:70).

Dengan demikian, pada saat itu dikembangkan secara seimbang antara ilmu-ilmu naqliyah serta ilmu-ilmu *'aqliyah* dan *lisaniyah*. Ilmu-ilmu *'aqliyah* adalah ilmu falak, ilmu kimia, ilmu pasti, fisika, kedokteran, ilmu musik. Sedangkan yang tergolong ilmu *naqliyah* adalah ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu hadits, ilmu tauhid dan lain-lain. Ilmu lisaniyah adalah ilmu bahasa seperti nahu syaraf, balaghah dan sebagainya.

Para ilmuwan Islam di kala itu menyatu di dalam diri mereka sebagai seorang intelek dan ulama, misalnya Ibnu Sina sebagai seorang ulama, di samping sebagai seorang filosif Islam yang juga seorang dokter yang terkenal. Ibnu Rusydy sebagai filosof Islam terkenal di Andalusia juga seorang ahli fiqih yang terkemuka bahkan sampai sekarang karyanya dalam bidang fiqih masih dipelajari dan dibaca yaitu *Bidâyah al-Mujtahid*. Sebuah kitab fiqh yang memuat tentang perbandingan mazhab. Demikian juga sejumlah ilmuan lainnya yang belum disebutkan nama-nama mereka dalam tulisan ini.

Para ahli pendidikan Islam baik klasik maupun modern

telah menguraikan bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya pendidikan diniyah semata-mata.

Al-Qabisi, nama lengkapnya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Khallaf Al-Qabisi, hidup pada abad keempat Hijriyah, membagi ilmu itu kepada dua bagian yang beliau sebut istilahnya dengan: *Pertama*, ilmu *Ijbâriyah*, yaitu Al-Qur'an, al-Shalat, al-Do'a sebahagian *Al-Nahwu wal 'Arabiyah* dan *Qiraat al-Kutub*. Ilmu-ilmu *Ijbâriyah* ini semacam ilmu dasar atau komponen dasar menurut istilah kita saat sekarang ini. *Kedua*, ilmu *Ikhtirâiyah*, termasuk dalam ilmu ini adalah berhitung, keseluruhan *nahwu* dan bahasa Arab, sya'ir dan sejarah bangsa Arab. (Al-Ahwâni, 165-170).

Tokoh-tokoh pendidikan Islam kontemporer yang akan diuraikan pendapatnya di sekitar konsep pendidikan Islam, adalah :

1. Dr. Ahmad Fuad Al-Ahwâni, mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah perpaduan yang menyatu antara pendidikan jiwa, membersihkan ruh, mencerdaskan akal, dan menguatkan jasmani. (Al-Ahwâni, tth: 9).
2. Ali Khalîl Abû Al-Ainaní, mengungkapkan bahwa hakekat pendidikan Islam itu adalah perpaduan di antara pendidikan akal, aqidah, akhlak, perasaan, keindahan dan kemasyarakatan. (Al-Ainâni, 1980: 150-209).
3. Dr. Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (Al-Abrâsyi, 1964:9-10).
4. Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Toumy al-Syaibâni, menjelaskan bahwa tujuan tertinggi dari pendidikan Islam adalah persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat (Al-Syaibâni, 1979: 410).

Bertolak dari pandangan Al-Qur'an tentang manusia maka semakin jelaslah bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya semata-mata yang berkenaan dengan kehidupan akhirat saja. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menempatkan fungsi manusia sebagai khalifah. Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi."

Esensi makna khalifah adalah orang yang diberikan Allah amanah untuk memimpin alam, dalam hal ini manusia bertugas untuk memelihara dan memanfaatkan alam semesta ciptaan Allah SWT.

Dengan demikian, eksistensi khalifah terletak pada daya kreatif untuk memakmurkan bumi. Oleh karena itu, jabatan khalifah adalah jabatan yang bersifat kreatif ketimbang sekedar status (Saefuddin, 1987: 8). Agar manusia dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah secara maksimal, maka sudah barang tentu manusia itu memiliki ilmu pengetahuan dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Guna memenuhi persyaratan dalam bidang ilmu pengetahuan, Allah SWT mengajari Adam tentang nama-nama sesuatu (lihat surah Al-Baqarah ayat 31 – 33).

Berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tersebut, maka dia mampu mengelola alam ini untuk kesejahteraan mereka. Mampu mengelola alam pertama menjadi alam kedua dalam bentuk teknologi. Kemampuan berkarya manusia itu diungkapkan oleh Dr. Sir Muhammad Iqbal, dalam salah satu

untaian syairnya: "Kau yang menciptakan malam dan aku yang membuat pelita. Kau yang menciptakan tanah liat dan aku yang membuat piala."

Berdasarkan fungsi manusia sebagai khalifah maka tidak kita ragu lagi manusia itu mestilah memiliki seperangkat ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu kealaman maupun ilmu-ilmu sosial sedemikian juga ilmu-ilmu humaniora di samping ilmu-ilmu agama.

Dari sisi lain bisa pula ditinjau bahwa manusia adalah perpaduan yang menyatu di antara unsur jasmani dan rohani. (Lihat surah Al-Hijr ayat 29). Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menyempurnakan kejadian fisik manusia (Adam) dari tanah (materi) dan setelah itu Allah meniupkan roh ciptaan Allah (immateri) kepada Nabi Adam, sehingga dengan demikian sempurnalah kejadian Adam sebagai manusia.

Dimensi jasmani terdiri dari organ-organ tubuh manusia yang bersifat materi, baik yang terlihat langsung oleh panca indra maupun dengan mempergunakan alat.

Sedangkan dimensi rohani manusia terdiri dari :

1. Dimensi akal;
2. Dimensi aqidah;
3. Dimensi akhlak;
4. Dimensi perasaan;
5. Dimensi keindahan;
6. Dimensi Kemasyarakatan. (Daradjat, 1984: 76).

Berdasarkan ungkapan-ungkapan di atas maka pendidikan yang ideal menurut Islam adalah pendidikan yang dapat

mengembangkan seluruh potensi manusia tersebut, baik potensi jasmani maupun potensi rohani.

Bila keterangan-keterangan di atas ini semuanya dikaitkan dengan SKB Tiga Menteri 1975 jelaslah bahwa pendidikan Islam yang ideal itu sejalan dan serasi dengan hakekat SKB Tiga Menteri. Keserasian SKB Tiga Menteri dengan konsep pendidikan Islam adalah dari segi pengembangan ilmu yang tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama saja akan tetapi mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi manusia untuk menjadi khalifah Allah di permukaan bumi.

SKB Tiga Menteri ini berusaha untuk menghilangkan dikhotomi yang terasa selama ini. Sehingga dengan demikian diharapkan akan tumbuh pandangan yang utuh terhadap ajaran Islam. Dari segi teknis operasional SKB Tiga Menteri ini bukanlah tanpa problem. Ada sejumlah problema-problema mendasar ditinjau dari segi pelaksanaan yang apabila tidak diatasi sudah pasti SKB Tiga Menteri tahun 1975 tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan. Problema-problema tersebut akan dicoba diuraikan dalam pembahasan berikut.

a. Tenaga Pengajar

Pendidikan adalah satu sistem, sedangkan tenaga pengajar atau guru merupakan sub sistem. Sub sistem yang satu ini memiliki kedudukan yang amat penting. Oleh karena keterkaitan dengan pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Betapapun canggihnya suatu konsepsi pendidikan termasuk kurikulum dan sylabus bila tidak ditopang oleh guru yang berkualitas dan berdedikasi

maka konsep yang canggih itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Salah satu problem yang dihadapi oleh madrasah adalah masih kekurangan guru baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kekurangan guru ini terasa sekali pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Metematika dan yang sejenisnya. Usaha untuk mengatasi kekurangan ini telah diusahakan dengan jalan membuka jurusan Tadris pada Fakultas Tarbiyah di sebahagian IAIN. Walaupun telah dibuka jurusan Tadris tersebut namun kebutuhan akan tenaga pengajar ini masih terasa. Dari segi kualitas diharapkan sekali madrasah memiliki tenaga pendidik yang berkualitas. Sebab beban-beban yang diemban oleh madrasah jauh lebih berat dari beban tugas yang diemban oleh sekolah umum. Karena dari satu sisi madrasah ini diharapkan pengetahuan umumnya sama dengan sekolah umum di samping memiliki pengetahuan agama dan bahasa Arab.

b. Sarana dan Fasilitas

Perkembangan berikutnya, madrasah menjadi sekolah yang berciri khas agama Islam, yakni sejak diberlakukannya UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003. Inti dari sekolah yang berciri khas agama Islam adalah semua kurikulum dan silabusnya sama dengan sekolah dan diberi ciri keislaman.

Sub sistem berikutnya yang amat penting dan juga sangat menentukan adalah sub sistem sarana dan fasilitas, seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, buku daras dan seperangkat alat-alat pelajaran, seperti papan tulis, slide, TV, video, type recorder dan sebagainya. Kesemua perlengkapan ini amat membantu bagi berlangsungnya proses belajar dan mengajar.

Berdasarkan kurikulum Madrasah Aliyah tahun 1984 dapat dilihat bahwa program studi dibagi kepada dua program, yaitu program A dan program B. Program A meliputi A1, A2, A3, A4 dan A5.

A1 adalah program ilmu-ilmu agama, A2 Fisika, A3 ilmu-ilmu Biologi, A4 ilmu-ilmu sosial, sedangkan A5 adalah pengetahuan budaya. Berdasarkan pembagian jurusan ini, dapat dipahami bahwa ada dua program studi yang amat membutuhkan laboratorium, pertama program studi ilmu-ilmu fisika dan kedua program studi ilmu-ilmu biologi. Disamping itu juga pengembangan pengetahuan bahasa amat penting di lembaga pendidikan ini, maka laboratorium bahasa juga merupakan hal yang amat penting. Untuk mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai diperlukan dana yang memadai pula. Bila kita melihat masalah dana ini, pada umumnya madrasah-madrasah kita memiliki dana yang terbatas, sehingga dengan demikian sarana yang dimiliki masih terbatas pula.

c. Waktu/Jam Pelajaran

Seperti yang telah dimaklumi bahwa madrasah ini tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum bahkan pada tingkat aliyah dibuka program studi ilmu-ilmu fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan budaya. Berdasarkan yang demikian itu maka sudah barang tentu dibutuhkan waktu belajar yang mestinya

lebih banyak dari sekolah umum, oleh karena seorang tamatan madrasah memiliki bobot pengetahuan umum yang sederajat dengan sekolah umum, di samping pengetahuan agama dan bahasa Arab. Untuk mencapai target yang sedemikian itu sudah logis kalau madrasah memiliki jam belajar yang lebih dari sekolah umum.

Untuk mencapai maksud tersebut program yang ideal adalah menempatkan siswa dalam satu asrama yang menyatu dengan sekolah. Dengan melaksanakan program asrama ini, para siswa dapat dikondisikan dalam suasana belajar sepanjang hari, mulai dari selesai shalat Subuh sampai selesai shalat Isa pada malam hari. Apabila belum memungkinkan bagi madrasah-madrasah kita, untuk membuka program asrama, maka penambahan waktu belajar pada sore atau malam hari adalah suatu hal yang tidak mungkin ditawar-tawar. Penambahan waktu ini diharapkan agar tercapai kualitas tamatan madrasah seperti yang diharapkan. Penambahan waktu belajar ini ditekankan kepada pendalaman program studi masing-masing.

d. Dana

Tidak dapat diingkari bahwa dana adalah kunci penggerak dari berbagai program, dan kemacetan dana akan berakibat pula kemacetan program, demikian juga halnya dengan program pendidikan. Seperti yang telah diungkapkan terdahulu bahwa madrasah-madrasah baik swasta maupun negeri pada umumnya masih kekurangan dana. Untuk menanggulangi kekurangan dana ini dapat diupayakan antara lain dengan membentuk

kerjasama antara orang tua murid dan guru yang lebih mantap dan terprogam.

e. Organisasi

Organisasi formal yang mengelola madrasah adalah Kementerian Agama. Sebaiknya untuk meningkatkan mutu madrasah dibentuk badan kerjasama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Dari Kementerian Pendidikan Nasional diharapkan banyak memberi bantuan dalam bidang tenaga pengajar dan lain sebagainya.

3. Madrasah dalam Bingkaian Undang – Undang SISDIKNAS (Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dan No. 20 Tahun 2003)

Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional, adalah seperangkat aturan-aturan atau ketentuan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang ini terdiri dari XX bab dan 59 pasal. Berisikan ketentuan umum, dasar fungsi dan tujuan, hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, satuan, jalur dan jenis pendidikan, jenjang pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, kurikulum, hari belajar dan libur sekolah, bahasa pengantar, penilaian, peran serta masyarakat, badan pertimbangan pendidikan nasional, pengolahan, pengawasan, ketentuan lain, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Di dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 12, 13 dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan-peraturan tentang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berkenaan dengan itu lahirlah:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

Peraturan Pemerintah yang terkait dengan madrasah adalah PP No. 28 dan No. 29 Tahun 1990. Di dalam PP Nomor 28 Tahun 1990 disebutkan pada bab III pasal 4 ayat (3) menjelaskan, bahwa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 040/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum. Dan untuk penyelenggaraan madrasah dilimpahkan kepada Menteri Agama. Berdasarkan pelimpahan tersebut maka Menteri Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Madrasah Aliyah. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993.

Di dalam Keputusan tersebut dijelaskan bahwa Madrasah Aliyah (MA) adalah Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 membagi pendidikan menengah itu kepada Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Menengah Keagamaan, Pendidikan Menengah Kedinasan, dan Pendidikan Menengah Luar Biasa (PP No. 29 Bab I, pasal 1).

Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan jenis-jenis pendidikan menengah tersebut dan yang terkait dengan pembahasan ini adalah pendidikan menengah umum, yang didefenisikan dengan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dimaklumi bahwa Madrasah Aliyah (MA) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 370 Tahun 1993, adalah dikelompokkan kepada pendidikan menengah umum maka kurikulumnya mestilah sejalan dengan hakekatnya sebagai pendidikan menengah umum. Selain dari itu karena hanya sekolah menengah yang berciri khas agama maka di dalam kurikulumnya juga tergambar ciri khas tersebut. Dengan demikian missi Madrasah Aliyah (MA) tersebut ada dua. Pertama perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa serti ciri-ciri keislamannya.

Penjelasan tersebut akan mencoba memaparkan kurikulum Madrasah Aliyah (MA). Dasar penyusunan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) adalah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah,

telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum.

Dalam bab I pasal 1 butir 6 disebutkan Madrasah Aliyah (MA) adalah sekolah menengah umum (SMU) yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Selanjutnya dalam bab IX pasal 20 menegaskan pelaksanaan ketentuan tentang kurikulum Madrasah Aliyah (MA) ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Berkenaan dengan itu maka Menteri Agama RI menetapkan Surat Keputusan No. 373 tanggal 22 Desember 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah.

Fungsi, peranan dan status madrasah secara substansial pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 ini tidak berbeda dengan madrasah pada Undang-Undang No 2 Tahun 1989. Hanya saja dilihat dari yuridisnya, madrasah pada Undang-Undang No 20 tahun 2003 lebih kuat dan kokoh, karena penyebutan nomenklatur madrasah masuk dalam batang tubuh undang undang, berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 2 tahun1989, peristilahan madrasah hanya diatur pada Peraturan Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri. Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah

Tsanawiyah dijelaskan pada Peraturan pemerintah No 28 tahun 1990. Sedangkan perakatan Madrasah Aliyah disebutkan pada Keputasan Menteri Pendidikan dan Kebudayan NO. 489/U/1992. Perkatan madrasah dpada Undang-Undang No 20 tahun 2003 dapat ditemukan pada pasal 17 dan 18.

Pasal 17: Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrsah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 18: Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

4. Masa Depan Madrasah di Indonesia

Salah satu pertanyaan yang timbul di dalam membicarakan madrasah adalah bagaimana masa depan madrasah di Indonesia? Apakah akan mengalami masa depan yang cerah sehingga dijadikan alternatif model pendidikan masa datang di Indonesia, atau malah sebaliknya?.

Pertanyaan ini logis diajukan mengingat :

1. Dari segi jumlah madrasah jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan sekolah umum.
2. Dari segi minat untuk memasuki madrasah jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan sekolah umum.
3. Kualitas kebanyakan lulusan madrasah belum betul-betul seimbang dengan lulusan sekolah umum.

Berangkat dari hal tersebut, mungkinkah eksistensi madrasah dapat dipertahankan ? Ataukah madrasah tetap akan menjadi lembaga pendidikan kelas dua, pinggiran (marginal) ?.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan ini sudah pada tempatnya, pertama sekali kita lihat dahulu kekuatan dan kelemahan madrasah. Permasalahan yang mendasar dan esensial dari madrasah telah diatur dalam SKB Tiga Menteri Tahun 1975. Di antara kekuatan yang strategis yang dimiliki oleh madrasah saat sekarang ini yang belum pernah dimiliki oleh madrasah-madrasah sebelumnya, telah tercantum pada Bab II pasal 2. inti pokok dari Bab II itu adalah mensejajarkan ijazah madrasah dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.

Makna derajat di sini mengandung arti bahwa tamatan madrasah memiliki hak dan status yang sama dengan tamatan sekolah umum. Implikasi dari persamaan itu dilihat dari hak untuk melanjutkan studi maupun hak untuk memperoleh pekerjaan.

Oleh karena permasalahan filosofis dan strategis telah diatur sedemikian rupa dalam SKB Tiga Menteri, maka yang tinggal sekarang adalah permasalahan yang bersifat teknis. Salah satu permasalahan yang bersifat teknis adalah bagaimana meningkatkan kualitas madrasah sehingga betul-betul setaraf dengan sekolah umum yang diasuh oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan yang diharapkan, maka madrasah mestilah dapat mengatasi berbagai problema yang tengah dihadapinya, yakni tenaga pengajar, peralatan,

waktu, dana dan organisasi pengelola. Problema-problema ini kita sebutkan dengan problema intern.

Madrasah setelah diberlakukannya undang-undang sistem pendidikan nasional, di samping problema intern, problema eksternpun tidak kalah pentingnya untuk diatasi guna mengukuhkan eksistensi madrasah. Problema ekstern adalah hubungan dan kaitan madrasah dengan lembaga-lembaga lain di luar Kementerian Agama. Dalam hal ini terkait erat dengan kebijakan otonomi daerah . Madarasah harus memilik sikap dan keijakan yang jelas tentang duduknya madrasah dalam otonomi daerah.

Selain itu, dilihat dari sudut memasyarakatkan madrasah pada kalangan umat Islam yang tergolong menegah ke atas sangat diperlukan. Apalagi kebijakan di masa yang akan datang adanya manajemen berbasis sekolah dan adanya komite sekolah. Alangkah akan terbantunya madarasah bila di madrasah turut serta yang menjadi komitenya adalah masyarakat Muslim yang memiliki kualitas ekonomi tingkat menengah ke atas.

Bagi umat Islam, kehadiran lembaga pendidikan madrasah sangat dibutuhkan. Oleh karena model madrasah inilah yang mendekati untuk tercapainya hakekat tujuan pendidikan Islam, yang disimpulkan dalam:

1. Tercapainya tujuan *hablum minallâh* (hubungan dengan Allah);
2. Tercapainya tujuan *hablum minannâs* (hubungan dengan manusia);
3. Tercapainya tujuan *hablum minal'âlam* (hubungan dengan alam).

Ketiga komponen tersebut terintegrasi dalam satu kesatuan. Anak didik dalam konsep pendidikan Islam mesti memperoleh ketiga-ketiganya. Bila diuraikan lebih rinci dalam bentuk subjek mata pelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut: Komponen *hablum minallâh* adalah subjek-subjek yang mengungkapkan pengenalan kepada Allah melalui ayat-ayat *tanziliyah*. Penjabarannya dalam bentuk mata pelajaran meliputi: tauhid, fiqh, tafsir, hadits, akhlak/tasawuf. Kesemuanya ini kita sebut dengan ilmu-ilmu diniyah.

Adapun komponen *hablum minannâs*, adalah subjek-subjek mata pelajaran yang menguraikan manusia, yang meliputi antara lain: sosiologi, antropologi, sejarah, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Sedangkan komponen *hablum minal'âlam* adalah subjek-subjek mata pelajaran yang menguraikan hubungan manusia dengan alam, yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu kealaman *(natural science)*.

Berangkat dari tersebut, jelas bahwa pendidikan Islam adalah kesatuan antara tiga komponen, yakni: komponen *hablum minallâh* yang dituangkan dalam ilmu-ilmu *diniyah*. Komponen *hablum minannâs* yang dituangkan dalam ilmu-ilmu sosial, dan komponen *hablum minal'âlam* yang dituangkan dalam ilmu-ilmu kealaman. Dengan demikian, tentu saja pendidikan yang hanya berpusat pada salah satu atau sebagian saja dari ketiga komponen itu bukanlah pendidikan Islam yang utuh.

Melihat konsep yang sesungguhnya dari pendidikan Islam tersebut seperti tertera di atas, timbul pertanyaan lembaga pendidikan mana yang ada sekarang ini yang melaksanakan ketiga komponen itu secara utuh?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya ditelusuri secara global tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada.

Ada tiga lembaga pendidikan Islam yang dijumpai saat sekarang, yakni pesantren, sekolah dan madrasah. Pesantren adalah lembaga Islam yang sudah tua sekali usianya. Lembaga ini sudah ada sejak permulaan penyebaran Islam di Indonesia. Di lembaga ini inti pokok materi yang dipelajari adalah ilmu-ilmu diniyah. Kalaupun ada ilmu sosial dan kealaman itu hanya sebagai pelengkap atau pendamping saja. Di lembaga ini santri dibimbing untuk menguasai segala macam ilmu-ilmu diniyah dari sumber aslinya yang berbahasa Arab atau lebih populer dengan istilah kitab kuning. Berdasarkan tujuan kurikuler yang hendak dicapai di pesantren ini maka para santri sudah barang tentu kurang atau tidak menguasai sama sekali ilmu-ilmu sosial/humaniora dan ilmu-ilmu kealaman.

Lembaga kedua adalah sekolah, sesuai dengan perjalanan yang ditempuh oleh sekolah, jelas kelihatan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bukan diniyah. Jadi yang dikembangkan di sekolah adalah ilmu-ilmu sosial/humaniora dan ilmu-ilmu kealaman. Kendatipun di lembaga ini diajarkan juga mata pelajaran agama, namun belum mencapai sasaran yang diharapkan. Pendidikan agama di sekolah baru menitikberatkan lapangan kognitif. Sedangkan yang diharapkan disamping kognitif adalah pembinaan afektif.

beberapa kelebihan, bila dibanding dengan lembaga pendidikan lainnya (pesantren dan sekolah), dan pastilah diramalkan bahwa masa depan madrasah akan cerah. Untuk terwujudnya kecerahan tersebut mestilah diupayakan menanggulangi problem intern dan ekstern yang telah penulis kemukakan terdahulu.

Kehadiran madrasah hingga saat sekarang ini belum seluruhnya dihayati oleh umat Islam. Kemampuan serta keberadaannya masih belum diyakini sepenuhnya. Hal ini terlihat dengan jelas masih segelincir kecil umat Islam yang memilih madrasah.

Hal ini tidak sepenuhnya disalahkan kepada umat Islam. Tentu saja di dalam mencari dan memasuki pendidikan seseorang akan mencari lembaga pendidikan yang berkualitas dan mempunyai masa depan yang cerah. Secara jujur kita kemukakan bahwa sampai saat sekarang ini madrasah belum bisa memperlihatkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas.

Faktor apa sebetulnya yang dominan menyebabkan madrasah belum bisa memperlihatkan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas?. Menurut hemat penulis, hal ini adalah permasalahan teknis. Karena bersifat teknis maka pemecahannya tidak sesukar yang bersifat filosofis dan strategis. Permasalahan teknis itu penulis uraikan dalam dua hal, yaitu masalah yang bersifat intern dan ekstern. Permasalahan teknis ini akan bisa dipecahkan dan diatasi apabila ditangani dengan serius dan penuh tanggung jawab.

Dari berbagai uraian terdahulu dapat diambil berbagai kesimpulan, antara lain:

1. Pembaharuan pendidikan adalah sesuatu yang wajar dan bahkan mesti terjadi, sesuai dengan tuntutan masyarakat.
2. Pendidikan memegang peranan penting guna meningkatkan status seseorang, maupun kelompok. Agar umat Islam Indonesia tidak termarjinalkan, maka semestinyalah umat Islam memperhatikan masalah yang berkenaan dengan pendidikan secara sungguh-sungguh.
3. Dunia pendidikan Islam di Indonesia, telah mengalami dinamikanya, sejak permulaan abad ke-20 telah terjadi pembaharuan pendidikan dengan munculnya sistem madrasah.
4. Pada mulanya titik tekan madrasah terletak pada mata pelajaran diniyah, tetapi setelah diberlakukan SKB Tiga Menteri maka diupayakan memperimbangkan antara mata pelajaran, diniyah dengan mata pelajaran ilmu-ilmu sosial/humaniora dan ilmu-ilmu kealaman, dan selanjutnya setelah dikeluarkan undang-undang sistem pendidikan nasional (UU No. 2 Tahun 1989 dan UU No. 20 Tahun 2003) dan dengan berbagai Peraturan Pemintah, maka keberadaan madrasah semakin menyatu dengan sekolah, sehingga madrasah disebut dengan sekolah yang berciri khas agama Islam. Kurikulum dan program studinya sama antara sekolah dan madrasah.
5. Pendidikan model madrasah adalah lebih memungkinkan untuk tercapainya hakekat tujuan pendidikan Islam, asalkan problema teknis yang bersifat intern dan ekstern dapat diatasi.

6. Problema yang bersifat intern meliputi tenaga pengajar, sarana/fasilitas, waktu, dana dan organisasi. Sedangkan problema ekstern adalah hubungan madrasah dengan lembaga-lembaga lain di luar Kementerian Agama,terutama kedudukannya di era otonomi daerah.
7. Apabila madrasah dapat mengatasi kemelut yang dihadapinya itu, maka sudah barang tentu masa depan madrasah akan cerah dan dapat dijadikan sebagai model alternatif pendidikan Islam di Indonesia.

BAB IV

REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DAN TANTANGAN GLOBALIASI

A. PENGERTIAN REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM

Perkataan reformasi berasal dari kata reform yang mempunyai arti *to change from worse to better, to introduce improvement in; to amend, to bring from a bad to good state; to remove or abolish for something better* (The New Webster: 703). Berdasarkan ini dapat dimaklumi inti dari reformasi adalah upaya perubahan dari yang buruk kepada yang lebih baik. Dalam hal ini terkandung makna pembaharuan dan perubahan. Makna pembaharuan adalah itu adalah meninggalkan pola-pola lama baik dalam bentuk pikiran dan perbuatan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Perkataan reformasi menjadi populer di Indonesia sekitar empatbelas tahun yang lalu dipicu oleh masalah-masalah

politik dan ekonomi yang tidak kondusif pada masa itu. Banyak hal yang perlu diperbaiki. Hampir di segala aspek kehidupan masyarakat; politik, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Dalam Islam sendiri perkataan reformasi itu identik dengan *tajdîd* (pembaharuan), yang intinya juga adalah meninggalkan pola-pola lama untuk mengambil pola-pola baru yang lebih baik.

Bertolak dari pemaknaan reformasi tersebut dan dihubungkan dengan pendidikan Islam, maka pertanyaan adalah apakah perlu adanya pembaharuan pendidikan Islam ?. Dan kalau perlu apa saja aspek-aspek yang perlu diperbaharui ?. Serta bagaimana aplikasinya ?

Beranjak dari sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejak awal abad ke-20 telah dimulai reformasi pendidikan Islam di Indonesia. Sesuai dengan arus pembaharuan yang melanda dunia Islam sejak abad ke-19 yang dimulai dari Mesir, Turki, India dan kemudian diawal abad ke-20 masuk ke Indonesia. Ide-ide pembaharuan tersebut masuk ke dunia pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa aspek pendidikan menjadi *stressing* dari pembaharuan tersebut, antara lain materi pelajaran, metode dan sistem pendidikan. Pembaharuan itu terus bergulir setelah Indonesia merdeka terlebih-lebih lagi setelah diundangkanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian diiringi sejumlah Peraturan Pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan.

Sesuai arus perkembangan zaman dan sesuai pula dengan dinamika masyarakat, maka reformasi dalam bidang pendidikan Islam inipun akan bergulir terus. Bila dibagi maka reformasi

itu bisa mencakup dua hal: *pertama*, reformasi pada tingkat pemikiran yaitu meletakkan pendidikan Islam pada visi yang sebenarnya. *Kedua*, reformasi pada tingkat aplikatif yaitu mencakup tentang adanya peraturan-peraturan baik yang berbentuk Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

Salah satu dari rumusan tujuan negara Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, karena itu negara sangat bertanggung jawab terhadap terlaksananya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Berbagai upaya telah dirintis sejak awal Indonesia merdeka dan telah banyak mengalami kemajuan.

Kendatipun sudah banyak kemajuan yang dicapai sejak Indonesia merdeka dalam dunia pendidikan, akan tetapi dalam banyak hal masih perlu dibenahi secara serius. Diantaranya adalah kualitas pendidikan, keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja (*link and match*), pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan lain sebagainya.

Dunia kita yang semakin mengglobal semakin menipiskan batas antar bangsa dan budaya, disaat itu akan tidak bisa dielakkan akan terjadi kompetisi. Pada saat dunia kompetitif telah digelar dalam kehidupan ini mau tidak mau maka kualitas sumber daya manusia menjadi handalan utama. Karena kualitas sumber daya manusia menjadi handalan maka pendidikan semestinya menjadi prioritas utama.

Setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad perjalanan bangsa ini, dirasakan bahwa pendidikan belum merupakan

prioritas utama sehingga akibatnya dirasakan beberapa kesenjangan dalam kualitas manusia Indonesia. Pada zaman Presiden Soekarno, prioritas utama tampaknya yang dipikirkan adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan politik, mulai dari perang fisik dan diplomasi menghadapi Belanda, kemudian jatuh bangunnya kabinet, pemilihan umum pertama dan sidang-sidang konstituante yang selalu *dead lock*, selanjutnya muncul era konfrontasi dengan Malaysia serta tumbuhnya kekuatan komunis di Indonesia yang puncaknya melahirkan G-30 S PKI. Di era ini dunia pendidikan belum terpikirkan secara serius dan sungguh-sungguh.

Di era pemerintahan orde baru, pada zaman Presiden Soeharto berkuasa prioritas utama adalah pembangunan ekonomi, dengan titik tumpunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dampak negatifnya menimbulkan berbagai hal yang berbau KKN, yang menghantarkan bangsa ini kepada krisis ekonomi dan moneter seperti yang dirasakan saat sekarang ini.

Di era reformasi di saat bangsa dan negara Indonesia telah memasuki abad dua puluh satu yang ditandai dengan munculnya era globalisasi, maka tidak boleh tidak handalan utama adalah kualitas manusia, karena itu menurut hemat penulis era ini sebaiknya adalah era pendidikan. Yang bermakna seluruh potensi bangsa diarahkan kepada sektor pendidikan.

B. URGENSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DAN MANUSIA INDONESIA SEUTUHNYA

1. Urgensi Pendidikan Dalam Mewujudkan Masyarakat Madanai

Pendidikan Islam adalah upaya transformasi ilmu, nilai, keterampilan, kultur, adat kebiasaan yang berlandaskan Islam dari si pendidik kepada si terdidik untuk membawanya ke tingkat kesempurnaan (*insan kamil*). Dalam usaha pentransferan itu sendirilah terletaknya hakikat pendidikan.

Sejak awal kemunculan Islam telah menunjukkan betapa ajaran Islam itu membawa kepada peradaban. Hakikatnya dapat dilihat dari kesatuan yang utuh antara hubungan manusia dengan Khaliknya (Allah), sesama manusia dan alam semesta. Keseimbangan terhadap ketiga hubungan tersebut berimplikasi kepada terwujudnya masyarakat madani.

Inti dari masyarakat madani yang dibangun oleh Rasulullah SAW. terletak pada keseimbangan hubungan manusia dengan ketiga aspek tersebut. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah melahirkan kesadaran religius yang tinggi serta menginsafi secara mendalam tentang hakekat hidup serta tujuan akhir dari hidup manusia yang ini semua akan berdampak terhadap prilakunya di permukaan bumi ini. Hubungan manusia dengan sesama manusia akan melahirkan sikap yang meletakkan manusia pada posisi yang sebenarnya, melahirkan sikap egalitarian, demokratis, adil dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Hubungannya dengan alam semesta menempatkan kepadanya sebagai khalifah Allah di bumi, dimana seluruh alam raya ini

diamanahkan dirinya sebagai khalifah Allah di bumi, di mana seluruh alam raya ini diamanahkan kepada manusia untuk diolah, diambil manfaatnya, dipelihara, dilestarikan dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kemakmuran umat manusia. Untuk memperankan fungsi manusia sebagai khalifah adalah terletak kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkenaan dengan itu, peran pendidikan sangat dominan untuk mewujudkan masyarakat madani, sebab masyarakat madani tersebut sarat dengan nilai-nilai baik nilai transendental, etis maupun rasional dan semua nilai-nilai itu ditransferkan dari si pendidik kepada si terdidik. Terancamnya pembentukan masyarakat madani tersebut apabila terdapat dua hal; *Pertama*, mandeknya pendidikan. *Kedua*, isi-materi yang ditransferkan tidak sesuai dengan hakikat pendidikan Islam. Dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam, kedua faktor tersebut telah pernah terjadi pada periode kemunduran pendidikan Islam (abad XIII-XVIII M). Sehingga peristiwa itu mengantarkan umat Islam ke zaman kegelapan.

Komaruddin Hidayat menjelaskan bahwa dalam wacana keislaman di Indonesia Nurcholis Madjid yang menggelindingkan istilah masyarakat madani yang terbakukan dengan nama Yayasan Paramadina (terdiri dari arti para dan madina dan atau parama dan dina). Secara semantik artinya kira-kira ialah sebuah agama (*dina*) yang *excellent* (paramount) misinya untuk membangun sebuah peradaban (madania). (Hidayat, 2002: 1-2).

Menurut Nurchalis Madjid, masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu kepada masyarakat madinah yang berada di bawah pimpinan Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau membangun tatanan kehidupan masyarakat yang berperadaban.

Jika masyarakat Madinah di bawah pimpinan Rasulullah SAW. yang menjadi acuan bagi masyarakat madani itu, maka perlulah diketahui beberapa ciri-ciri dari masyarakat Madinah tersebut. *Pertama*, masyarakat *Rabbâniyah*, semangat ber-ketuhanan yang dilandasi atas tiga pilar yaitu aqidah, syariah dan akhlak. *Kedua*, masyarakat yang demokratis, dimana Rasulullah SAW. dan para sahabatnya mentradisikan musyawarah dalam segala persoalan dan Rasulullah tidak berkeberatan menarik pendapatnya apabila ada yang lebih baik. *Ketiga*, masyarakat egalitarian, memandang manusia sama di depan hukum, bahkan beliau pernah bersabda "Seandainya Fatimah mencuri niscaya akan aku potong tangannya". *Keempat*, masyarakat yang toleran, masyarakat Madinah adalah masyarakat yang plural, dari segi suku mereka terdiri dari berbagai etnik. Qabilah Auz dan Khazraj adalah soko guru dari kelompok Anshor, sedangkan suku Quraish yang berasal dari Makkah adalah orang-orang Muhajirin. Dari sisi agama selain dari Islam ada Yahudi dan lain sebagainya. Kehidupan toleran itu diikat oleh Rasulullah dalam satu ikatan yang disebut dengan *consti-tution of Madinah* (Piagam Madinah atau *Mistâq al-Madinah*). *Kelima*, masyarakat yang berilmu pengetahuan.

Beranjak dari uraian di atas, terlihat jelas adanya hubungan yang signifikan antar pendidikan dan pembentukan masyarakat madani. Hubungan tersebut terkait erat tentang kesamaan esensi antara keduanya. Pendidikan Islam pada hakikatnya tiada lain adalah upaya pembentukan pribadi dan masyarakat

yang berperadaban. Sedangkan masyarakat madani itu sendiri adalah kondisi masyarakat yang memiliki indikasi-indikasi tertentu yang menggambarkan sebagai perwujudan manusia. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa masyarakat madani itu sendiri tidak mungkin terbentuk tanpa lewat pendidikan. Karena itu, aplikasi pendidikan di Indonesia mesti diberi muatan-muatan yang lebih mengarahkan tercapainya masyarakat madani.

Di dalam mengaplikasikan pendidikan Islam di Indonesia ada beberapa muatan yang lebih diberi penekanan pada bidang-bidang tertentu yang selama ini belum banyak disinggung dalam penterapan pendidikan Islam di Indonesia. Berkaitan dengan itu perlu ada beberapa hal yang perlu direformasi agar muatan-muatan pendidikan Islam relevan dengan pembentukan masyarakat madani. *Pertama*, muatan materi (bahan) yang diberikan adalah mencakup keseimbangan terhadap pengembangan semua potensi manusia baik lahir maupun bathin. *Kedua*, dari sejak dini telah diberikan pendidikan yang dapat membentuk kepribadian yang mengarah kepada terciptanya masyarakat madani, seperti demokrasi, egalitarian, keadilan, menghargai hak-hak asasi manusia, dan lain sebagainya. *Ketiga*, untuk merealisasi kesemuanya itu mestilah diberdayakan pendidikan informal di rumah tangga, formal di sekolah dan non formal di masyarakat.

2. Urgensi Pendidikan Dalam Membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya.

Pendidikan seperti yang banyak didefenisikan oleh para

pakar yang apabila diambil intinya adalah upaya sadar yang diberikan oleh si pendidik dalam rangka membawa si terdidik kepada manusia ideal yang dicita-citakan. Bentuk manusia ideal yang dicita-citakan itu dirumuskan sendiri oleh suatu bangsa atau suatu komunitas.

Didalam memperbincangkan pendidikan ada dua pemaknaan yang selalu didengungkan oleh para pakar. *Pertama*, pendidikan adalah memanusiakan manusia. *Kedua*, pendidikan adalah transfer budaya. Dipandang dari sudut pendidikan sebagai alat untuk memanusiakan manusia pada dasarnya berupaya untuk mengembangkan potensi manusia semaksimal mungkin sehingga pada suatu saat ia tumbuh sebagai manusia seutuhnya.

Pertanyaan mendasar dapatkah manusia itu berkembang dan tumbuh dengan sempurna tanpa pendidikan?. Dari berbagai analisa dikaitkan dengan hakikat manusia itu sendiri jelaslah bahwa manusia tidak mungkin tumbuh dan berkembang tanpa melalui pendidikan. Karena itulah sejak manusia lahir dia telah membutuhkan pertolongan orang lain untuk mengembangkan dirinya, baik pertolongan pengembangan fisik maupun non fisik.

Dipandang dari sudut potensi manusia baik jasmani dan rohani tidak boleh tidak mesti memperoleh pendidikan agar potensi yang ada itu tumbuh dan berkembang. Potensi jasmani adalah seluruh potensi manusia berwujud nyata meliputi indra manusia dan lainnya. Sedangkan potensi rohani manusia adalah seluruh perlengkapan manusia yang tidak berwujud nyata yang berbentuk spiritual.

Potensi-potensi manusia ini semuanya tidak mungkin

berkembang tanpa lewat proses pendidikan. Perkataan *education* pada dasarnya berasal dari *educare* yang intinya adalah mengarahkan kepada perkembangan potensi manusia. *Tarbiyah* (bahasa Arab) mengandung makna pertumbuhan, perawatan, pemeliharaan. Di sini diperlukan adanya suatu proses berkesinambungan yang terus menerus tanpa berhenti untuk mengembangkan potensi manusia tersebut. Potensi akal manusia misalnya merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan yang tidak mungkin berkembang dengan sempurna tanpa lewat pendidikan.

Tentang urgensi pendidikan dalam rangka memanusiakan manusia, dapat diambil kisah klasik yang telah dikemukakan oleh para pakar tentang betapa urgennya pendidikan tersebut dalam rangka memanusiakan manusia, yakni kisah ditemukannya anak manusia yang dipelihara oleh serigala. Anak manusia itu tidak bisa hidup dengan wajar sebagaimana manusia, dia hidup sebagaimana layaknya serigala mulai dari cara makannya, berjalannya dan kebiasaan hidup lainnya.

Pendidikan berperan sebagai transfer budaya. Hal ini berkenaan dengan manusia sebagai pencipta budaya yang secara akumulatif telah berproses sejak ribuan tahun yang lalu setidaknya sejak manusia memasuki abad peradaban. Akumulasi budaya itu secara berkesinambungan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peradaban modern dimana manusia hidup saat sekarang bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tetapi merupakan rentetan mata rantai dari sebelumnya. Dengan demikian, kendatipun manusia yang hidup sekarang ini menikmati berbagai kemudahan dan kenyamanan hidup disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumbangan peradaban masa lampau

juga tidak kurang maknanya untuk mengantarkan manusia kepada peradaban masa kini. Dalam proses transformasi budaya inilah peranan pendidikan amat menentukan.

Berbicara tentang manusia Indonesia yang ingin dibentuk kearah yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Manusia Indonesia yang ingin dibentuk tergambar dalam tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yakni ada delapan aspek penting dari pendidikan nasional tersebut, yaitu:

1. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berakhlak mulia;
3. Sehat;
4. Berilmu;
5. Cakap;
6. Kreatif;
7. Mandiri;
8. Menjadi warga negera yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kriteria tersebut merupakan tipe manusia ideal yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia lewat jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Kriteria manusia Indonesia yang ingin diciptakan itu mencakup. *Pertama*, manusia religius, manusia yang patuh dan taat menjalankan perintah agama. *Kedua*, manusia bermoral, berakhlak mulia, memiliki komitmen yang kuat terhadap kehidupan beretika. *Ketiga*, manusia yang sehat jasmani dan rohani. *Keempat*, manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, manusia pencari dan penggal, pengamal

ilmu pengetahuan dan pencita ilmu. *Kelima*, manusa yang cakap dan memiliki keterampilan. *Keenam* dan *Ketujuh*, manusia yang kreatif dan mandiri. *Kedelapan*, manusia yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahtraan bangsa dan negara.

C. ERA GLOBALISASI DAN TANTANGAN TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

1. Era Globalisasi

Globalisasi, hakikatnya adalah kompetisi. Kompetisi hakikatnya adalah keunggulan dan di sini akan berlaku teori Darwin *the survival of the fittest*. Seleksi alam akan muncul bahwa yang unggullah yang akan bertahan. Oleh karena itu, arah pendidikan kita di abad ini adalah pembentukan generasi yang unggul akan mampu bersaing.

Ada dua *event* yang hampir bersamaan munculnya pada saat bangsa Indonesia memasuki millenium ketiga. Pertama globalisasi, diakibatkan kemajuan ilmu dan teknologi terutama komunikasi dan transportasi sehingga dunia semakin menjadi tanpa batas. Hal ini tentu akan berakibat munculnya budaya global. Dalam budaya global ini ditandai dalam bidang ekonomi perdagangan akan menuju kepada terbentuknya pasar bebas, baik dalam kawasan ASEAN, Asia Pasifik bahkan akan meliputi seluruh dunia. Dalam bidang politik akan tumbuh semangat demokratisasi. Dalam bidang budaya akan terjadi pertukaran budaya antar bangsa yang berlangsung begitu cepat yang saling mempengaruhi, dalam bidang sosial akan muncul semangat konsumeris yang tinggi disebabkan pabrik-pabrik memproduksi

kebutuhan-kebutuhan konsumeris dengan cepat pada setiap saat dan merangsang manusia untuk memilikinya.

Event kedua adalah reformasi, dalam era reformasi ini diharapkan akan muncul wajah Indonesia baru yang kontras dengan wajah lamanya. Wajah baru Indonesia itu adalah wajah yang mampu memunculkan masyarakat madani, yakni masyarakat berperadaban dengan menekankan kepada demokratisasi dan hak-hak asasi manusia, serta hidup dalam berkeadilan.

Dalam konteks kemasyarakatan, ciri-ciri masyarakat di era globalisasi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, abad ini adalah abad yang mengedapankan ilmu pengetahuan sebagai handalan manusia untuk memecahkan problema kehidupannya. Dengan demikian, abad ini akan melahirkan masyarakat belajar (*learning society*) atau masyarakat ilmu pengetahuan *(knowledge society)*. Kunggulan manusia atau suatu bangsa akan dikaitkan dengan keunggulan bangsa tersebut dalam bidang ilmu pengetahuan.

Kedua, di era ini akan muncul dunia tanpa batas (*borderless world)*. Sekat-sekat geografis menjadi semu sebagai akibat dari kemajuan ilmu komunikasi dan informasi. Peristiwa apa saja yang terjadi disuatu belahan dunia dalam waktu yang hampir bersamaan akan diketahui dibelahan dunia lainnya, maka terjadilah pertukaran informasi secara mudah.

Ketiga, era ini juga akan memunculkan persaingan global, akan muncul era kompetitif. Apabila era persaingan muncul maka diperlukan manusia-manusia unggul, sebab kompetitif akan menuntut munculnya manusia–manusia unggul.

Keempat, era ini akan memunculkan teknologi pembelajaran jarak jauh seperti *teleconference*, internet, serta media–media komunikasi teknologi pembelajaran modern lainnya, dalam bentuk *global education*.

Kelima, era ini akan memunculkan pergaulan manusia yang berdasarkan multikultural. Manusia hidup dalam lintas budaya, ras, etnik, bahasa serta agama.

Era globalisasi menyuguhkan peluang dan tantangan. Peluangnya adalah era ini semakin membuat semua orang mudah berkomunikasi dan mengakses informasi sehingga akan semakin mempermudah hubungan antar sesama manusia, sehingga dengan demikian transformasi ilmu dan peradaban manusia menjadi sangat mudah pula.

Sementara itu, tantangan era globalisasi juga sudah menghadang. Diantarnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat disangkal bahwa dunia ini masih saja dibagi kepada dua kelompok besar, yaitu negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Negara-negara maju adalah menjadi produsen dari hasil-hasil kemajuan teknologi. Sedangkan negara-negara berkembang menjadi konsumen. Dengan demikian, negara-negara berkembang akan menjadi negara yang tergantung kepada negara-negara maju. Negara–negara maju akan meraih keuntungan yang banyak dari penjualan hasil produksi mereka terhadap negara–negara berkembang.

Kedua, tantangan ekonomi, disebabkan negara-negara maju tumbuh menjadi negara-negara kaya, maka laju perekonomian duniapun akhirnya ditentukan oleh negara-negara maju. Sementara

negara-negara berkembang karena kekurangan sumber daya manusia terampil, tidak bisa mengolah hasil dalam negeri mereka secara maksimal untuk mendapat nilai tambah, dan otomatis berpengaruh kepada penghasilan negara tersebut.

Ketiga, tantangan budaya. Persaingan budayapun tidak bisa dihindari, dari berbagai hal yang berkenaan dengan gaya hidup, pandangan hidup, model pakaian, makanan dan seterusnya akan muncul di era global. Di sini biasanya budaya-budaya yang berasal dari negara- negara maju akan mendominasi.

2. Tantangan Terhadap Pendidikan

Tantangan globalisasi bagi dunia pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut: *Pertama*, tantangan kualitas. Era global adalah era dunia tanpa batas, batas-batas suatu negara dengan negara lainnya amat tipis. Berbarengan dengan itu pula maka tidak dapat dihindari akan muncul pertarungan budaya. Di sisi lain manusia, barang, jasa, teknologi dan lain sebagainya, akan terjadi pertukaran antara satu negara dengan negara lainnya baik resmi maupun tidak. Jika demikian halnya maka tidak bisa dihindari akan terjadinya persaingan. Apabila kompetensi muncul maka yang unggullah yang akan menang. Berkenaan dengan itu pertanyaannya bagaimanakah meningkatkan kuaitas manusia Indonesia?.

Tilaar menyebutkan bahwa di dalam pengembangan "*manusia unggul partisipatoris*" diperlukan pengembangan sifat-sifat sebagai berikut :

1. Kemampuan untuk mengembangkan jaringan kerjasama (*network*) *Networking* ini diperlukan karena manusia tidak

lagi hidup terpisah–pisah akan tetapi telah berhubungan antara satu dengan lainnya.

2. Kerjasama (*team work*). Setiap orang di dalam masyarakat abad 21 mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keungulan spesifiknya. Individu-individu yang telah mengembangkan kemampuan spesifiknya itu membangun team work yang pada gilirannya untuk membangun produk-produk yang tinggi mutunya
3. Cinta pada kualitas tinggi. Manusia unggul adalah manusia yang terus menerus meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan-nya sehingga dia akan mencapai kualitas tinggi. Kualitas yang dicapai hari ini akan ditingkatkan esok harinya (Tilaar, 1999:56-57).

Dengan demikian, tantangan globalisasi ini menuntut perhatian yang sungguh-sungguh dari semua lapisan masyarakat untuk menghadapi dampak negatifnya.

Dalam kehidupan sehari-hari Tilaar juga mengemukakan konsep keunggulan yang diambilnya dari Martha Tilaar, yaitu:

1. Dedikasi dan disiplin, memiliki rasa mengabdi kepada tugas, orang yang telah memiliki sifat tersebut akan diiringi dengan tumbuhnya sikap disiplin.
2. Jujur, kejujuran yang dikembangkan itu adalah kejujuran terhadap orang lain maupun kejujuran terhadap diri sendiri. Inti kejujuran terhadap orang lain, adalah manusia yang bisa bekerjasama dengan orang lain dan dasar kerjasama itu adalah saling mempercayai. Jujur terhadap dirinya sendiri adalah manusia yang mengetahui kemampuannya, yang dengan demikian dikembangkannya keprofesionalannya makin meningkat.
3. Tekun, manusia unggul adalah manusia yang dapat memfokuskan perhatiannya kepada tugas yang telah dipercayaka kepadanya.
4. Inovatif, manusia unggul adalah manusia yang terus mencari yang baru, tidak puas dengan status quo.
5. Ulet, manusia unggul adalah manusia yang tidak mudah putus asa, dia akan terus mencari dan mencari (Tilaar, 1999:57-59).

Dengan demikian, pembicaraan tentang pentingnya membentuk manusia unggul di abad globalisasi yang tidak boleh tidak adalah upaya pembentukannya melalui pendidikan.

Berbagai kriteria manusia unggul yang dijelaskan di atas banyak menyangkut tentang soal mental, karenanya pendidikan mental itu merupakan prioritas utama yang akan dilaksanakan saat sekarang ini. Tantangan dunia pendidikan Indonesia saat sekarang ini serba kompleks.

D. INOVASI PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI

1. Pendidikan Islam di Era Globalisasi

Hakikat pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia dalam arti yang sesungguhnya. Memanusiakan manusia dalam arti sesungguhnya itu mengandung makna memberdayakan seluruh potensi lahir dan batin manusia agar dia dapat tumbuh

berkembang dengan baik sehingga dia menduduki harakat kemanusiaan yang sesungguhnya.

Untuk mengembangkan potensi lahir dan bathin manusia perlu dikembangkan tiga hal:

Pertama potensi lahiriah manusia yaitu berkenaan dengan fisik sehingga tumbuh subur, sehat, bugar dan terhindar dari penyakit. Dalam sebuah pepatah disebutkan "Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat."

Kedua, potensi bathin manusia mengisi dua hal, yaitu potensi akal dan potensi hati nurani. Potensi akal berfungsi untuk berpikir sehingga manusia menjadi cerdas. Selanjutnya potensi hati nurani, yaitu untuk merasa. Disinilah tempat pembentukan kepribadian dan akhlak mulia. Pendidikan potensi batin akan mencerahkan batin manusia. Pendidikan akal adalah memberikan sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat mencerdaskan akalnya, yang meliputi *natural sciences*, *social sciences*, humaniora, dan logika, sehingga jadilah sesorang itu memiliki kecerdasan intelektual. Pendidikan hati nurani adalah pendidikan yang akan menumbuhkembangkan nilai-nilai positif dalam bathin manusia dan mengikis nilai negatif, sehingga seseorang tumbuh menjadi orang berakhlak mulia, memiliki kecerdasan emosiaonal dan spritual. Pada pendidikan batin inilah letaknya pendidikan agama dan akhlak mulia.

Pendidikan keterampilan bertujuan agar manusia memiliki kemampuan menggerakkan tangannya untuk bekerja serta mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus memiliki jiwa wirausaha.

Lalu pertanyaan berikutnya adalah untuk apa pendidikan itu dilaksanakan ?. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan tidak lain untuk menjadikan manusia hidup bahagia dunia dan akhir.

Era global menuntut manusia untuk memiliki kualitas global pula. Karena itu, pendidikan Islam harus diarahkan kepada hal tersebut; sekolah-sekolah Islam, madrasah dan pesantren serta perguruan tinggi Islam harus diarahkan terciptanya manusia yang dapat hidup mendunia. Untuk itu, perlu dibuat rancangan pendidikan Islam yang meliputi :

1. Pendidikan Berkualitas. Era global adalah identik dengan era kompetitif. Dengan demikian pendidikan bermutulah yang akan membawa manusia untuk survive di masa yang akan datang. Mutu adalah paduan sifat-sifat produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan langsung atau tak lansung baik mutu yang dinyatakan maupun yang tersirat masa kini dan masa depan (Tampubolon, 2001 : 108).

   Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengan perkataan bermutu. Misalnya makanan bermutu, lukisan bermutu, pelajaran bermutu, dan lain sebagainya. Perkataan bermutu ini mengandung makna dengan sifat yang baik. Dengan demikian bermutu berarti mempunyai sifat-sifat yang baik atau menyenangkan bagi yang merasakannya atau juga bagi umum (Tampubolon, 2001, 106).

   Sekarang timbul pertanyaan bagaimana menciptakan pendidikan Islam bermutu itu?. Berkenaan dengan itu ada beberapa faktor yang terkait erat dengan pembentukan

mutu (kualitas), yaitu. raw input (bahan baku), pendidik, sarana dan fasilitas, metode, kurikulum, manajemen, lingkungan (*environment*), proses pembelajaran. Penataan setiap aspek yang disebut di atas inilah yang menjadi landasan pokok bagi pengembangan Pendidikan Islam yang berkualisas.
2. Membangun pendidikan Integrited fisik dan non fisik (akal, qalb, nafs) serta keterampilan, sehingga muncul kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. Memanfaatkan pengajaran teknologi globalisasi, teknologi pembelajaran jarak jauh, penggunaan komputer, internet, *teleconference*, dan lain-lain.
4. Memperluas jaringan kerjasama internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa era globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya mempermudah kehidupan manusia dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan transportasi, memperpendek jarak yang jauh. Dampak negatifnya akan terjadi persaingan budaya dan kompetisi dalam berbagai bidang kehidupan. Kompetisi akan dimenangkan oleh yang kuat. Budaya-budaya kuat akan mendominasi dan akan mengalahkan budaya yang lemah. Termasuk dalam bidang ekonomi.

Pendidikan di era ini hendaklah diarahkan kepada kemampuan bersaing (berkompetisi), sebab pada dasarnya era global pasti memunculkan kompetisi.

Pendidikan Islam di era ini haruslah mempersiapkan langkah-langkah ke arah itu untuk bisa eksis. Apabila pendidikan Islam tidak bisa melahirkan *out put* yang dapat bersaing di

era global, maka keberadaannya akan teringgal. Karena itu, tantangan yang muncul di era global harus mampu disikapi secar positif oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam.

2. Inovasi Pendidikan Islam

Inovasi pendidikan adalah ide, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil invensi atau *diskovert* yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan (Ibrahim, 1988:51).

Hidup itu pada hakikatnya adalah perubahan. Karena itu, perubahan yang terjadi di masyarakat adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Bahkan sebetulnya disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan, perubahan itu semakin cepat. Disebabkan karena terjadi perubahan sosial, maka hal itu berdampak kepada berbagai aspek kehidupan manusia termasuk didalamnya pendidikan. Pendidikan itu sendiri adalah peruwujudan dari kebutuhan manusia pada suatu dan saat tertentu, dan otomatis pendidikan harus senantiasa mampu menyahuti perubahan-perubahan yang terjadi.

Arus globalisasi saat ini menimbulkan banyak sekali perubahan di tengah-tengah masyarakat. Perubahan sosial terjadi tidak bisa dihindari karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika terjadi revolusi industri pertama, tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin, tentu hal ini berdampak besar, antara lain terhadap tenaga kerja, tentang perlunya tenaga profesional, perlunya pendidikan untuk mengoperasikan mesin serta tenaga yang akan merawat mesin dan berbagai

tuntutan-tuntutan lainnya. Seterusnya terjadinya perubahan yang lebih dahsyat lagi pada masa revolusi industri kedua yakni menggantikan otak manusia dengan alat-alat elektronik, misalnya dalam bentuk apa yang kita kenal sekarang ini dengan komputer. Dengan komputer banyak pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh manusia diganti dengan alat mulai dari kegiatan di rumah tangga, toko, kantor, sekolah dan berbagai bentuk lainnya (Ibrahim, 1988:7).

Dari contoh di atas mau tidak mau akan terjadi perubahan sosial, yang pada gilirannya pula terjadinya perubahan dalam pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan dan lain sebagainya.

Bertolak dari kenyataan tersebut diakibatkan perubahan yang terjadi di masyarakat di era global ini maka diperlukan adanya inovasi dalam dunia pendidikan Islam yang setidaknya meliputi :

a. Kurikulum

Kurikulum dalam pengertian luas tidak hanya terbatas kepada subjek pelajaran, tetapi mencakup berbagai aktifitas yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti yang diungkapkan oleh Saylor dan Alexander "... *school curriculum is the total afford of the school to bring about desired outcome's in shool and in out of school situation. In short the curriculum is the school's program for learners*" (Saylor, 1960:4).

Romaine Staphen mengemukakan defenisi yang senada "*Curriculum is interpered to mean all of the organized courses, activities and experiences which pupils have under the direction of the school, whether in the class room or not*" (Staphen, 1954: 14).

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Alice Meil dalam bukunya *Changing the Curriculum a Social/Process*, bahwa kurikulum meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan, dan sikap orang yang meladeni dan diladeni sekolah, yakni anak didik, masyarakat, para pendidik dan personalia. (Meil, 1946: 10).

Dari berbagai defenisi tersebut dapat diketahui bahwa sebetulnya kurikulum mengandung makna yang sangat luas, sehingga dapat dikatakan seluruh apa saja yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan disebut dengan kurikulum.

Berkaitan dengan pembahasan ini, ada beberapa hal yang sering mendapat perhatian tentang masalah kurikulum di Indonesia.

1) Sentralistik

Sistem sentralistik ini terkait erat dengan birokrasi atas-bawah yang sifatnya otoriter yang terkesan pihak "bawah" harus melaksanakan seluruh keinginan pihak "atas". Dalam sistem yang seperti ini inovasi tidak akan muncul. Dalam bidang kurikulum sistem sentralistik juga mempengaruhi *output* pendidikan kita. Tilaar menyebutkan kurikulum yang terpusat, penyelenggaraan sistem manajemen yang dikendalikan dari atas telah menghasilkan *output* pendidikan kita manusia robot tanpa inisiatif (Tilaar, 1999: 87).

Keseragaman kurikulum di seluruh Indonesia adalah sesuatu yang kurang tepat, karena wilayahnya bagitu luas dan memiliki ciri budaya serta alam lingkungan yang berbeda pula. Setiap daerah memiliki budaya sendiri, dimana peserta didik telah hidup menyatu dengan budaya sejak dia lahir yang perlu dikembangkan dalam membentuk kepribadiannya. Demikian juga dia hidup di lingkungan alam yang peserta didik perlu diberdayakan untuk mengelola, memanfaatkan serta melestarikan alam lingkungan itu.

Selain itu, alam demokratisasi yang semakin berkembang dalam kehidupan manusia tidaklah sesuai dengan sistem pendidikan sentralistik, karenanya dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No, 20 Tahun 2003, salah satu diantara aspek yang perlu mendapat perhatian untuk memperoleh hak desentralisasi adalah pendidikan. Desentralisasi bukanlah berarti menghilangkan unsur-unsur nasional, dan menimbulkan fanatisme daerah, tetapi diberi perimbangan yang proporsional antara kurikulum nasional dan daerah (lokal).

2) *Link and Match*

Istilah *link and match* dipopulerkan pada zaman Wardiman menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Intinya adalah bagaimana pendidikan itu *link* (keterkaitan) *output*-nya dengan kebutuhan masyarakat. Di dunia yang terus berkembang seperti yang telah diuraikan terdahulu secara otomatis akan terjadi perubahan di masyarakat (*social change*). Perubahan itu dengan serta merta pula akan berdampak kepada perubahan gaya hidup serta kebutuhan hidup masyarakat. Karena terjadinya

perubahan tersebut dunia pendidikan harus mampu menghasilkan manusia yang berilmu dan lihai dalam memanfaatkan teknologi. Dalam hal ini apakah dunia pendidikan kita telah mampu menyahitunya ?.

Munculnya prinsip *link and match* karena dilihat terdapatnya kesenjangan antara *output* pendidikan dan kebutuhan pembangunan akan tenaga terampil. Dalam hal ini tentu tidak dimaknai bahwa pendidikan kita semata-mata diarahkan kepada menghasilkan tenaga kerja terampil. Praktek pendidikan di Indonesia tidak boleh dilihat secara parsial, tetapi harus dipandang dari berbagai segi termasuk dari sisi kebutuhan tenaga kerja, sehingga terbentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Dipandang dari sudut pembagian pendidikan atas beberapa jalur, haruslah meletakkan kajian tersebut secara holistik. Dengan demikian, arah kurikulum pendidikan Indonesia platformnya tetap berprinsip menciptakan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan terdahulu. Namun harus juga dipertimbangkan penempatannya sesuai dengan jalur pendidikan yang telah diatur.

3) Beban Kurikulum

Banyak juga kritikan yang dilemparkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional berkaitan dengan saratnya kurikulum sehingga seolah-olah kurikulum itu kelebihan muatan. Hal ini juga mempengaruhi kualitas pendidikan. Dimana anak-anak terlalu banyak dibebani mata pelajaran.

Dari satu sisi bisa saja kritikan itu benar, tetapi dari sisi lain tentu juga ada alasannya untuk menyusun kurikulum

sedemikian rupa. Jika beranjak dari tujuan pendidikan nasional, maka tidak boleh tidak program mata pelajaran mestilah sinkron dengan tujuan pendidikan nasional. Barangkali yang penting diatur di sini adalah soal pemahaman kita tentang kurikulum. Betul, jika pemahaman tentang kurikulum itu adalah subjek mata pelajaran yang diberikan di sekolah saja maka secara otomatis terasa beban kurikulum itu berat. Tetapi apabila diintensifkan praktek kurikulum dalam pengertian yang disebutkan terdahulu maka tinggal membaginya kepada beberapa bahagian dalam operasionalnya.

Pengoperasian kurikulum itu dapat disinkronisasikan secara proporsional antara intra kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler. Intra kurikuler, yakni apa yang diberikan di depan kelas oleh pendidik kepada si terdidik. Kedua, kokurikuler, yakni apa yang diberikan kepada si terdidik sebagai kelanjutan dari intra kurikuler. Selain dari pada itu yang sering dilupakan adalah upaya pembentukan suasana dan iklim yang kondusif bagi terwujudnya tujuan pendidikan.

Dengan demikian, subjek-subjek pelajaran tersebut dapat dibagi kepada beberapa bentuk kurikulum di atas, sehingga beban kurikulum itu tidak hanya tertumpu pada intra kurikuler saja.

b. Pendidik

Pendidik adalah elemen yang amat penting dalam pendidikan, sebab pendidik berfungsi sebagai sentral dari seluruh aktifitas pendidikan khususnya proses belajar mengajar. Hampir semua faktor pendidikan yang disebut dalam teori pendidikan terpulang

operasionalnya di tangan pendidik, misalnya, metode, bahan (materi) pelajaran dan alat pendidikan.

Karena itu, diantara sekian banyak faktor penentu kualitas pendidikan, faktor utamanya adalah pendidik. Di tangan pendidik kurikulum akan hidup dan bermakna sehingga menjadi "makanan" yang mendatangkan selera untuk disantap oleh peserta didik. Ditangan pendidik pula metode penyajian menjadi hidup dan menarik bagi peserta didik. Alat pendidikan akan bermanfaat ditangan pendidik yang cekatan. Alat yang berbentuk materi dapat diberdayakan oleh pendidik yang profesional sesederhana apapun alat tersebut. Alat pendidikan yang non materi akan digunakan oleh pendidik sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Kapan misalnya peserta didik diberi hukuman, larangan, pujian, hadiah dan lain sebagainya.

Berdasarkan itulah makanya pendidik memegang kunci penting dalam memberdayakan pendidikan menghadapi dunia yang penuh dengan kompetitif. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kualifikasi pendidik dalam menghadapi pasar bebas yang akan datang?. Mengenai ini harus ada beberapa hal yang menjadi agenda peningkatan kualifikasi guru. Tenaga guru yang sudah diangkat perlu dievaluasi berdasarkan kualifikasi ini, bagi yang belum supaya diarahkan ke tingkat kualifikasi tersebut. Bagi calon pendidik harus dipersiapkan ke arah kualifikasi dimaksud.

1. Keilmuan. Pendidik betul-betul memiliki kualifikasi ilmu sesuai dengan bidang yang diajarkannya berdasarkan jenjang pendidikan yang diajarkannya.
2. Metodologis. Seorang guru mesti memiliki ilmu terapan

yang akan dipergunakan dalam rangka mengkomunikasikan ilmu tersebut kepada peserta didik. Memiliki keterampilan mengajar, keterampilan membuat persiapan mengajar, mengevaluasi, metode mengajar, manajemen pendidikan, kepemimpinan guru, dan lain sebagainya.

3. Akhlak. Seorang pendidik mestilah memiliki komitmen moral yang tangguh, konsisten dan konsekuen menjalankan etika profesinya sebagai pendidik. Pendidik mesti menjadi contoh, karena dia tempat bercermin anak didiknya.
4. Loyalitas. Kecintaan kepada profesinya menimbulkan kecintaan kepada tugas yang diembannya. Karena itu, profesi kependidikan bagi seorang pendidik bukanlah pekerjaan sambilan yang ditangani setengah hati. Hal ini sejalan dengan kompetensi guru yang telah disebutkan dalam UU No. 14 tahun 2005 (Kompetensi paedagogik, kepribadian, sosial dan profesional).

c. Lembaga Pendidikan

Berkaitan dengan demakin, meningkatnya tuntutan kualitas pendidikan, maka pemaknaan pendidikan tidak cukup hanya meletakkannya dalam pengertian *schooling*, tetapi lebih dari pada itu, tuntutan kualitas tidak memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan pendidikan formal saja tetapi mesti serentak dan bersamaan dengan perlunya kebersamaan antara pendidikan formal, nonformal dan informal. Karena itu, memberdayakan semua lembaga pendidikan ini serta mengaturnya menjadi satu kesatuan adalah merupakan suatu upaya untuk lebih memberdayakan pendidikan di era globalisasi.

Demikian juga halnya dengan mensinkronkan antara berbagai bentuk kurikulum yang telah disebutkan di atas menjadi satu kesatuan juga bagian yang relevan dengan pemberdayaan lembaga pendidikan sekarang ini.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merubah seluruh tatanan kehidupan manusia secara drastis, karenanya perubahan masyarakat sesuatu yang alami sifatnya sebagai suatu bahagian dari proses dan dinamika perkembangan masyarakat. Sejak manusia berada di planet bumi ini telah terjadi banyak perubahan. Alvin Toffler pun telah membagi gelombang kehidupan manusia itu kepada tiga gelombang, gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga sebagai abad informasi. Masing-masing gelombang menunjukkan tingkatan peradaban manusia.

Di era informasi dan komunikasi ini manusia akan berada di bawah naungan dunia atau peradaban global. Peradaban global ini mau tidak mau akan membawa manusia kepada kompetisi. Di abad kompetisi akan berlaku hukum kompetitif yang pernah diungkapkan Darwin *The survival of the fitties*. Intinya adalah terjadinya pertarungan keunggulan, secara alami akan terjadi seleksi alam siapa yang unggullah yang akan bertahap hidup.

Pertanyaan mendasar, bagaimanakah membentuk manusia unggul tersebut?. Jawabnya tidak lain adalah lewat pendidikan. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan pendidikan dan jelas sekali bahwa manusia tidak akan berdaya tanpa pendidikan. Potensi yang terpendam pada diri manusia tidak mungkin diwujudkan tanpa lewat pendidikan. Di sinilah letaknya hakikat memanusiakan manusia. Di sisi lain manusia sejak

keberadaannya di muka bumi secara evolutif telah membangun budaya dan peradabannya. Peradaban yang dibangun oleh manusia itu secara berkesinambungan dan generasi ke generasi telah diwariskan kepada manusia. Budaya dan peradaban manusia itu akan diwariskan lewat pendidikan.

Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang saat ini sedang diterpa oleh aneka macam krisis sebagai problema internnya. Sedangkan problema eksternnya dia akan menghadapi dunia global yang tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain apalagi dalam waktu dekat akan terbuka pasar bebas kawasan ASEAN dan Asia Pasific. Dalam kondisi yang sedemikian itu bagaimana bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya sebagai suatu bangsa di era kompetitif tersebut.

Berkenaan dengan itu tidak boleh tidak seluruh kekuatan bangsa, pemerintah dan seluruh masyarakat harus menyamakan visi dalam menghadapi dunia global dimaksud, kesamaan visi itu adalah harus memberdayakan pendidikan sebagai suatu alternatif untuk menjawab berbagai kemelut intern dan masalah ekstern yang sedang dihadapi. Era ini menurut penulis sudah masanya "mempanglimakan" pendidikan.
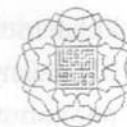
BAB V

PENDIDIKAN AGAMA DALAM PRESPEKTIF MULTI KULTIRAL DI INDONESIA

Sejak awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pendidikan agama telah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pelaksanaan pendidikan agama itu adalah implementasi dari landasan filosofis bangsa yang tertera dalam sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 fasal 29, yang menjelaskan tentang kedudukan agama di Negara Republik Indonesia, serta landasan sosial religius masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang beragama. Berdasarkan landasan tersebut, maka sangat logis jika pendidikan agama diberikan bagi genersi muda bangsa Indonesia, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan terpenting dari pendidikan agama adalah agar terbentuknya peserta didik yang beriman dan bertaqwa terhadap

Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia serta mengamalkan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya dan juga dapat menghargai dan menghormati penganut agama lain.

Sesuai dengan keberadaan bangsa Indonesia yang pluralis yang terdiri dari berbagai etnis, ras, bahasa, budaya, daerah dan agama dituntut tetap untuk senantiasa dapat menjaga kesatuan bangsa. Kebhinekaan itu tidak sampai menimbulkan pepecahan bangsa tetapi tetap berada pada Ketunggalikaan. Pengalaman yang telah dilalui bangsa Indonesia, ternyata pernah terjadi konflik horizontal di kalangan masyarakat pada pasca reformasi, seperti, konflik yang bernuansa agama terjadi di Ambon dan Poso, bernuansa etnis terjadi di Kalimantan antara suku Dayak dan Madura, bernuansa ras terjadi antara pribumi dan non pribumi (Cina), dll.

Ternyata semangat persatuan bangsa yang diikat oleh filosof Bhinneka Tuinggal Ika bisa luntur dan tidak mampu menahan arus perpecahan bangsa seperti diuraikan di atas. Pertanyaan yang mendasar apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Dan dapatkah dicarikan jalan keluarnya agar masyarakat Indonesia memiliki ketahanan mental sehingga dalam suasana apapun mereka bisa mengendalikan diri dari konflik dan senantiasa hidup dalam persatuan kesatuan bangsa ? Jawabnya ada, yaitu apabila semangat persatuan dan kesatuan muncul dari dalam diri seluruh masyarakat Indonesia, bukan dari luar. Untuk membentuk tumbuhnya semangat persatuan yang demikian, harus dilaksanakan lewat pembentukan kepribadian, dan jalan untuk membentuk kepribadian itu adalah lewat pendidikan.

Pendidikan yang bagaimanakah yang tepat untuk pembentukan semangat persatuan tersebut?. Salah satunya adalah pendidikan multikultural *(multi cultural education)*. Pada pendidikan multikultural seseorang tidak dituntut untuk mengganti budayanya dengan budaya lain, tetapi tetap berpegang kepada budayanya dengan menghargai dan menghormati budaya orang lain. Salah satu diantara faktor penyebab timbulnya ketidak harmonisan sosial dapat bersumber dari agama. Oleh karena itu diperlukanlah konsep-konsep pendidikan agama yang bernuansa multikultural di Indonesia.

A. MASYARAKAT MAJEMUK

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk baik dipandang dari sudut georafis, etnis, ras, budaya, maupun agama. Dipandang dari sudut geografis masyarakat Indonesia tersebar di seluruh nusantara yang tinggal di pulau-pulau besar maupun kecil yang berjumlah sekitar tujuh belas ribu pulau. Dipandang dari sudut etnis, Kuntjaraningrat (1971) menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 450 kelompok etnis. James Fox (2004) seorang Antropolog dari Australia menyatakan bahwa di Asia Tenggara terdapat 1413 kelompok bahasa daerah dan 601 kelompok (42 %) berada di Indonesia.

Dilihat dari sudut penyebaran penduduk diberbagai pulau di Indonesia tidak merata. Pulau jawa yang luasnya 6,89% dihuni oleh penduduk 59.99%. Irian Jaya yang luas wilayahnya 21,99% dihuni oleh 0,92%. Kepadatan penduduk di pulau Jawa 814 jiwa perkilometer sedangkan di Irian Jaya 4 jiwa.

Ditinjau dari penganut agama, BPS tahun 2010: Islam 207 176 162, Kristen Protestan 16 528 513, Katolik 6 907 873,

Hindu 4 012 116, Budha 1 703 254. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 237 641 326. Dipandang dari sudut penyebaran agamapun tidak merata, Islam banyak dianut di Sumatrea, Jawa, Madura, Sulawesi, Kalimantan, Lombok, Sumbawa dan pulau-pulau di Maluku Utara. Protestan mayoritas di Irian Jaya Katolik di Flores, Hindu di Bali.

Kemajemukan dipandang dari satu sisi adalah kekayaan khazanah bangsa, akan tetapi bisa menjadi ancaman apabila tidak bisa merawatnya dan akan berakibat menimbulkan disintegrasi bangsa yang serius seperti beberapa peristiwa yang terjadi di Ambon, Kalimantan (sampit), Sulawesi (poso).

B. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Pendidikan Agama adalah bagian yang integral dan menyatu dengan pendidikan nasional. Sejak awal Indonesia merdeka telah mulai dilaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri. Pada tahan 1946 BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengusulkan kepada pemeritah agar di sekolah-sekolah dilaksanakan pendidikan agama. Usul tersebut ditanggapi positif oleh pemerintah, maka dilaksanakanlah pendidikan agama di sekolah dengan melibatkan secara langsung dua kementerian yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Sejak dilaksanakannya pendidikan agama di sekolah tahun 1947 sampai sekarang telah terjadi dinamika diseputar pendidikan agama. Setidaknya telah terjadi tiga fase perkembangan pendidikan agama di sekolah:

Fese pertama (tahun 1947 – 1965) pada fase ini pendidikan agama kelihatannya masih bersifat fakultatif dengan indikasinya bahwa ada statemen dalam Undang-Undang tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (UU No.4 tahun 1950) bahwa orang tua menetapkan apakah anaknya ikut atau tidak dalam pendidikan agama, begitu juga orang dewasa berhak menentukan apakah dia mengikuti pendidikan agama atau tidak, selain itu dicantumkan juga bahwa pendidikan agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Hal ini tertera pada Bab XII pasal 20 UU No.4 Tahun 1950.

Berbeda halnya dengan fase kedua (1966-1990), pada fase ini adalah era Orde Baru. PKI (Partai Kominus Indonesia) dibubarkan dan sekaligus juga melarang idiologi komunis di Indonesia. Untuk menghilang idiologi komunis di Indonesia salah satu alat yang ampuh adalah dengan meningkatkan peranan pendidikan agama, maka sejak digelarnya sidang umum MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) tahun 1966, ditetapkan bahwa pendidikan nasional bertujuan antara lain mempertinggi mental, moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama. Dengan demikian, posisi pendidikan agama bertambah kuat dibanding dengan posisi pada fase pertama.

Fase ketiga (1990 sampai sekarang) setelah diberlakukannya Undang-Undang No.2 Tahun 1989. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada fase ini status pendidikan agama semakin kuat, pendidikan agama masuk dalam sistem pendidikan nasional, lewat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.2 tahun 1989 dan UU No.20 tahun 2003). Di dalam UU No.2 tahun 1989 dijelaskan bahwa pendidikan

agama adalah pendidikan yang wajib diberikan pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Ada tiga mata pelajaran yang berkedudukan seperti itu yaitu Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarga negaraan.

Dalam Undang -Undang No.20 tahun 2003 dijelaskan tentang pendidikan agama itu pada pasal 12.a yakni : Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

C. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Pengertian Pendidikan multikultural masih belum seragam di antara para pakar. Ada tiga hal pengertian pendidikan muti-kultural: (1) Pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat (2) Pendidikan yang menawarkan ragam model dalam keber-agaman budaya dalam masyarakat (3) pendidikan yang membentuk sikap siswa untuk menghargai keberagaman budaya dalam masyarakat. (Rosyada, 2005: 4)

Tilaar mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat. Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat yang multikultural adalah multikulturalisme yaitu sebuah idiologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan. Model multi-kulturalisme sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan

dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terujudnya masyarakat yang lebih besar yang mempunyai kebudayaan seperti mosaik tersebut.

Di tengah arus globalisasi yang tidak boleh tidak akan memunculkan masyarakat global. Kehidupan masyarakat global sudah jelas akan memunculkan masyarakat puluralis. Agar kehidupan masyarakat pluralis tersebut tetap berada pada suasana keharmonisan berlandaskan kepada keadilan, hak-hak asasi manusia, kebersamaan, demokrasi, dan tidak diskriminatif, maka diperlukan kehidupan masyarakat yang berdasar kepada multikulturalisme.

Pada masyarakat multikulturalisme perbedaan budaya tidak hanya dilihat dari segi keanekaragamannya, tetapi lebih menekankan keanekaragaman tersebut dari sudut keadilan. Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan kebudayaan dalam kesederajatan. Masayarakat multikulturalisme juga dibedakan dengan masyarakat *melting pot*, yakni masyarakat yang menghilangkan budaya asalnya dan memunculkan budaya baru.

Indonesia dengan masyarakatnya yang pluralis, yang kelihatannya masih rentan dengan munculnya disintegrasi dan disharmonis di kalangan masyarakat baik disebabkan faktor ras, etnis dan agama. Kenyataan yang melanda kita di era reformasi ini membuat kita semakin sadar betapa ikatan persatuan itu amat rentan, dimana telah pernah terjadi konflik horizontal disebabkan etnis (suku), ras, agama dan georafis.

Jika demikian halnya, ada sesuatu yang perlu dilakukan agar ikatan kebangsaan itu kokoh, yakni diperlukan adanya pendidikan kesatuan bangsa. Salah satu di antaranya adalah pendidikan multikultural.

Pada masyarakat pluralis perlu ada upaya-apaya pendidikan yang menjadi basic untuk menyatukan bangsa yang pluralis tersebut. Amerika Serikat seperti yang diungkapakan Azyumardi Azra yang dikutipnya dari La Belle (1994), bahwa pada dasarwasa 1940-1950 berkembang konsep pendidikan inter cultural dan inter kelompok *(Inter-cultural and inter-group education)*. Pada dasarnya pendidikan ini untuk mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat berbeda. Pada tahap pertama pendidikan interkultural ditujukan untuk mengubah tingkah laku individu untuk tidak meremehkan apalagi melecehkan budaya orang atau kelompok lain, khususnya dari kalangan minoritas. Selain dari itu juga ditujukan untuk tumbuhnya toleransi dalam diri individu terhadap berbagai perbedaan rasial, etnis, agama dan lain-lain. (Azra, 2005, 8).

Secara sederhana Azyumardi Azra mendefenisikan pendidikan multikultural itu sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. (Azra, 2005: 7).

Penekanan pada pendidikan multikultural itu adalah tumbuhnya sikap; (1) Penerimaan terhadap realita keragaman budaya; (2) Tetap konsisten memegang budayanya sendiri; (3) Menghormati dan menghargai budaya orang lain; (4) Mengedapankan tentang keadilan, kebersamaan, toleransi,

demokrasi serta hak-hak asasi manusia; (5) Tidak dibedakan antara budaya mayoritas dan minoritas.

Pemikiran dan gagasan tentang pendidikan multikultural masih sangat baru di Indonesia, karena itu belum semua orang memahaminya dengan baik. Pada tahap awal ini, perlu digagas dulu konsep-konsep pendidikan multikultural tersebut dan seterusnya disosilisasikan di kalangan masyarakat.

Di antara hal yang perlu digagas lebih matang adalah landasan filosofisnya, tujuannya, strategi pembelajaran, kurikulum, kualifikasi pendidik, metode, sarana dan media pengajarannya.

D. HUBUNGAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Bagaimanakah hubungan di antara dua variabel di atas, yaitu pendidikan agama dan pendidikan multicultural ? Pendidikan agama seperti yang telah banyak ditulis oleh para pakar dibidangnya adalah upaya yang dilakukan untuk membentuk peserta didik sesuai dengan kepribadian yang diinginkan agama tersebut. Pendidikan agama memiliki tiga dimensi pokok: *pertama*, pendidikan yang berkenaan dengan keyakinan (akidah) di dalam ajaran Islam disebut dengan Rukun Iman. *Kedua*, berkenaan dengan implementasi dari akidah tersebut yaitu diwujudkan dalam bentuk ibadah, didalam Islam disebut dengan Rukun Islam. *Ketiga*, berkenaan dengan prilaku hubungan kepada sesama manusia, dalam Islam disebut dengan akhlak. Selanjutnya dilaksanakan *transfer of knowledge*, *transfer of values* dan *transfer of skills*.

Adapun pendidikan multikultural adalah upaya untuk menumbuhkan pengharagaan terhadap budaya lain di luar budayanya sendiri. Seseorang yang berasal dari sebuah etnis tertentu di Indonesia, di dalam kehidupan keseharianya tetap konsisten menjalankan aturan-aturan yang ada pada etnis tersebut, dan di sisi lain muncul dalam dirinya rasa hormat dan tidak menganggap enteng terhadap adat dan budaya dari etnis lain, tanpa harus dia merubah kepribadiannya menjadi berkepribadian etnis tersebut. Demikian juga seorang penganut suatu agama tertentu, dia tetap konsisten dan *istiqamah* melaksanakan seluruh ajaran agama yang dianutnya, sedangkan di sisi lain dia tetap menghargai dan menghormati penganut agama lain, tanpa dia harus ikut berubah menjadi penganut agama lain tersebut.

Kebijakan pendidikan agama di Indonesia telah tertuang pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pada pasal 12 a : Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Pernyataan yang tertera dalam Undang-Undang ini mengandung makna bahwa seseorang tetap konsisten dan *istiqamah* mengimani dan mengamalkan agamanya secara utuh sesuai dengan konsep agama tersebut. Untuk itu tidak dibenarkan seseorang dengan alasan apapun menerima pendidikan agama yang bukan agama yang dianutnya, atau menerima pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya tetapi diajarkan oleh pendidik yang tidak seagama. Jika demikian kebijakannya, maka berbagai bentuk dan usaha yang akan melencengkan

dari prinsip itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan seorang guru agama tertentu mengajarkan agama yang bukan agamanya, dan tidak pula dibenarkan seorang murid menerima pendidikan agama yang bukan agamanya. Jika demikian, maka pendidikan multikultural tidaklah bermaksud bahwa seseorang peserta didik akan menerima pelajaran agama yang bukan agamanya. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan ada pendidikan agama yang berbeda dengan agama yang dianut oleh seorang murid.

Jika perinsip itu telah dipahami bersama, maka di dalam mengemas pendidikan agama dalam perspektif multikultural itu adalah berkisar diseputar: (1) pemahaman, dan pemberian kesadaran kepada peserta didik bahwa selain dari agama yang dianutnya masih ada sejumlah agama lain. (2) Menanamkan sikap bahwa seseorang bebas beribadah sesuai dengan agamanya. (3) Menanamkan keyakinan bahwa dia tetap konsisten dan *istiqamah* terhadap kebenaran agama yang dianutnya, karena itu dia tidak perlu ikut serta didalam melaksanakan ibadah (ritual) agama lain. (4) Saling menghargai prinsip-prinsip akidah dan ibadah (ritual) dari agama lain. (5) dapat dikembangkan kerjasama sosial yang tidak terkait dengan akidah dan ibadah.

Bagaimana bentuk hubungan antara pendidikan agama dan pendidikan multikultural tersebut?. *Pertama*, terkait dengan pendidik, para pendidik (guru agama) bisa menyampaikan suasana dan semangat pendidikan multikultural tersebut kepada peserta didiknya ketika dia mengajarkan agama. *Kedua*, kurikulumnya berbentuk integrated dengan kurikulum pendidikan agama. *Ketiga*, lembaganya bisa formal, nonformal dan informal. *Keempat*, metodenya dapat digunakan berbagai metode yang lazim dipergunakan di dalam pendidikan agama, ceramah,

tanya jawab, diskusi, bercerita, penugasan, studi wisata, dan lain-lain. *Kelima*, fasilitas dan media dapat menggunakan fasilitas dan media yang sudah dikenal di dunia pendidikan agama, seperti buku-buku, gambar, vidio, TV, computer, dan lain-lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ditengah arus dunia gelobal yang menghilangkan sekat-sekat geografis dan budaya tidak boleh tidak manusia akan hidup dalam suasana kebersamaan dan saling membutuhkan. Oleh karena itu, bibit-bibit yang menyebabkan timbulnya disharmonis harus dihilangkan baik itu bersumber dari keanekaragaman budaya.

Disharmonis itu sangat berbahaya bagi intraksi umat manusia dan bangsa. Oleh karena itulah hidup dalam suasana saling memiliki pengertian diantara satu budaya dengan budaya lainnya adalah syarat utama terujudnya integrasi.

Indonesia sebuah negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dihuni oleh sejumlah penduduk yang pluralis baik dari segi etnis, ras, suku, georafis dan agama sangat membutuhkan upaya-upaya integrasi bangsa dan menghindarkan diri dari timbulnya bibit disharmonis dan disintegrasi. Upaya yang paling starategis untuk terjalin integrasi bangsa adalah lewat pendidikan multikultural. Lewat pendidikan akan membentuk kepribadian.

Dengan demikian, persatuan dan kesatuan itu bukan datang dari luar diri. Jika datang dari luar diri seolah-olah dipaksakan, tetapi datang dari dalam diri sendiri yang terbentuk lewat pendidikan.

Wacana, pamikiran dan gagasan pendidikan mutikultural

di Indonesia masih tergolong baru, masih mencari bentuk, masih mengumpulkan gagasan dan pemikiran. Akan tetapi, suatu yang menggembirakan bahwa telah banyak para pakar pendidikan, antropologi, sosiologi yang merespons positif adanya pendidikan mutikultural.

Bagi masyarakat Indonesia yang pluralis, pendidikan multikultural itu sangat perlu, sebab bangsa Indonesia beberapa tahun yang lalu yang eksesnya sampai sekarang masih ada yakni timbulnya berbagai konflik horizontal di kalangan masyarakat, baik disebabkan faktor etnis, ras, agama maupun geografis.

Salah satu mata pelajaran yang perlu dikaitkan dengan pendidikan mutikultural adalah pendidikan agama. Perlu dirancang filosofis, konsep serta aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat.

BAB VI

PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

A. PERANAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Pendidikan tinggi agama khususnya Islam telah berdiri buat pertama kali pada akhir pemerintahan Jepang di Indonesia, tepatnya pada tanggal 8 Juli 1945 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1364, resmi berdiri Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. STI ini mencontoh kurikulum Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1946 STI ini dipindahkan ke Yogyakarta sesuai dengan tuntutan revolusi ketika itu seiring dengan pindahnya Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Tahun 1947 STI berkembang menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dan salah satu fakultasnya adalah Fakultas Agama Islam. Tahun 1950 Fakultas Agama Islam tersebut dinegerikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN).

Selanjutnya tahun 1960 berkembang pula menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Fakultas-fakultas IAIN yang ada di daerah-daerah di luar lokasi IAIN induk dipisahkan dari IAIN induknya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Selanjutnya sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, sebagian IAIN dan STAIN telah berkembang pula menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Dilihat dari perkembangan di atas, jelas bahwa dunia Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia telah mengalami dinamika yang sangat pesat. Bergerak dari yang sederhana kepada keadaan yang lebih sempurna, dari Sekolah Tinggi (Perguruan Tinggi) menjadi Institut dan berkembang pula menjadi Universitas. Apa yang membedakan ketiga lembaga tersebut?. Yang membedakannya adalah tinjauan dari segi pengembangan keilmuan. Sekolah Tinggi mengembangkan satu cabang ilmu tertentu. Institut mengembangkan sekelompok ilmu sejenis. Sedangkan Universitas mengembangkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Perguruan Tinggi memiliki peranan yang amat penting dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Sebab lewat Perguruan Tinggilah akan dihasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Tugas Perguruan Tinggi adalah melahirkan manusia berkualitas. Pembangunan suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari manusia berkualitas. Dari Perguruan Tinggilah lahirnya para pemikir, penggagas dan pelaksana dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Karena itu, pencepatan pembangunan di negara manapun jua sangat erat kaitannya dengan peranan Perguruan Tinggi di negara tersebut.

1. Tugas Pokok Perguruan Tinggi

Ada tiga tugas utama Perguruan Tinggi sebagaimana dikenal dengan istilah "Tri Dharma Perguruan Tinggi." *Pertama*, berkenaan dengan pendidikan pengajaran. *Kedua*, penelitian dan *ketiga*, pengabdian kepada masyarakat. Dharma pertama intinya adalah pentransferan ilmu pengetahuan dari si pendidik (pemberi) kepada peserta didik (penerima). Disini diperlukan berbagai kelengkapan seperti dosen, mahasiswa, kurikulum, sarana fasilitas pembelajaran, manajemen akademik. Dharma kedua erat kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Lewat penelitian akan ditemukan teori baru ilmu pengetahuan. Dengan ditemukannya teori maka akan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Sementara dharma ketiga adalah pengaplikasian ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat. Ilmu yang dikembangkan lewat dharma pertama dan kedua diterapkan di tengah-tengah masyarakat, dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Lewat ketiga dharma ini akan terwujud di tengah-tengah masyarakat peranan lembaga Perguruan Tinggi, sehingga Perguruan Tinggi tersebut tidak menjadi menara gading yang jauh terpisah dan tidak bersentuhan dengan masyarakat. Konsep dasar sesungguhnya adalah Perguruan Tinggi mesti menyatu dengan masyarakat.

Bagi Perguruan Tinggi agama tugas itu lebih berat lagi, sebab di samping tugas pokok di atas, Perguruan Tinggi agama juga memiliki tugas moral dan etis. Tri dharma tersebut mestilah berada pada bingkai moral. Perguruan Tinggi agama mesti berperanan sebagai pemikir dan pendistribusi nilai-nilai moral

di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, mesti ada nilai (*value*) dan tugas plus bagi lembaga pendidikan tinggi agama.

2. Pengembangan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam dapat dibagai dua. *Pertama*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. *Kedua*, pendidikan Islam sebagai lembaga Pendidikan Islam. pendidikan Islam sebagai mata pelajaran artinya mata pelajaran agama yang diberikan di lembaga pendidikan informal, nonformal dan formal. Mata pelajaran agama tercakup dalam mata pelajaran keimanan, ibadah dan akhlak.

Pendidikan Islam sebagai lembaga yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam baik informal, nonformal, serta formal. Pelaksanaan Pendidikan Islam dapat dibagi kepada tiga bentuk, yaitu informal, nonformal dan formal. Informal pendidikan agama yang dilaksanakan di lingkungan keluarga. Non formal dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, dalam rangka melayani keperluan masyarakat sebagai pangganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka pendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan Formal dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti sekolah, madrasah, pesantren dan Perguruan Tinggi agama. Ketiga lembaga pendidikan tersebut saling terkait dan idealnya adalah ada sinkronisasi diantara ketiga lembaga tersebut. Inilah yang disebut dengan tri pusat pendidikan.

Penanggung jawab lembaga pendidikan informal adalah orang tua, maka seharusnya setiap orang tua menjadi pendidik

agama. Lembaga pendidikan non formal penanggung jawabnya adalah tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun nonformal. Mereka membuat gagasan dan mengaplikasikan gagasan itu berwujud sebuah lembaga pendidikan. Di bidang pendidikan agama, pendidikan non formal itu dilakukan dalam bentuk kursus-kursus, training-training, private les, majelis ta'lim. Lembaga pendidikan formal, penanggungjawabnya adalah guru. Untuk melahirkan seorang guru harus lewat pendidikan keguruan.

Untuk menjadi seorang pendidik diperlukan tiga persyaratan: *Pertama*, ilmu pengetahuan. *Kedua*, kemampuan mengkomunikasikan ilmunya kepada peserta didik. *Ketiga*, memiliki akhlak mulia. *Keempat*, manajemen pendidikan. Undang-undang tentang guru dan dosen telah menjabarkannya dalam empat kompetensi dasar yang telah disebutkan terdahulu.

3. Peranan Pendidikan Tinggi Agama dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Bertolak dari tugas pokok Pendidikan Tinggi maka dapat dilahirkan gagasan tentang apa saja peranan lembaga Pendidikan Tinggi dalam mengembangkan pendidikan agama.

Secara garis besar ada tiga rumpun keilmuan yang harus diberikan kepada mahasiswa calon pendidik. *Pertama*, rumpun ilmu yang akan diajarkannya, yaitu mata pelajaran keagamaan (Keimanan, ibadah, akhlak dan lain sebagainya). *Kedua*, rumpun ilmu keguruan (ilmu pendidikan, strategi mengajar, psikologi dan lain-lain). *Ketiga*, rumpun ilmu perluasan wawasan (ilmu kealaman, sosial).

Sesuai dengan perkembangan pendidikan yang mulai bergerak dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta Pendidikan Tinggi maka diperlukan lembaga pendidikan keguruan yang akan melahirkan guru-guru agama pada tingkat Raudatul Athfal (Taman-Kanak-Kanak), Tingkat Dasar (SD/Ibtidaiyah), Tingkat Menengah (SMP/Tsanawiyah), SMA/MA) dan Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan itu, maka Perguruan Tinggi Islam harus dikembangkan menjadi sebuah Perguruan Tinggi yang dapat melahirkan lulusan yang akan bertugas pada tingkatan-tingkatan pendidikan tersebut. Untuk itu, perlu dipersiapkan program guru Raudatul Athfal, program guru Sekolah Dasar dan Menengah serta Perguruan Tinggi.

Untuk pendidikan agama nonformal, lembaga pendidikan tinggi Islam dapat membuka kursus-kursus singkat dan juga dapat dilaksanakan lewat kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Lewat kursus-kursus singkat dapat ditawarkan kepada masyarakat kursus singkat pendidikan agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Lewat dharma kedua, dapat dilakukan penelitian-penilitian yang bersifat *applied research*. Bidang-bidang yang diteliti menyentuh langsung tentang hal yang berkenaan dengan problematika pendidikan agama. Hasil penelitian itu dapat dijadikan masukan dan solusi.

Selanjutnya, melalui dharma pengabdian kepada masyarakat, dosen dan mahasiswa terjun ke masyarakat memasuki majelis-majelis ta'lim, memberikan serangkaian ceramah yang sistematis, terencana punya kurikulum dan silabus berisikan tentang

pendidikan Islam. Ceramah dapat bermuatan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dan juga dapat bermuatan tentang metode mengajarkan agama bagi anak-anak dan remaja di rumah tangga, sehingga hasilnya berguna bagi masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Tinggi memiliki peranan yang amat strategis dalam percepatan pembangunan bangsa di segala bidang terutama di bidang sumber daya manusia. Lewat pendidikan tinggi akan dipersiapkan sumber daya manusia terdidik. Salah satu bidang studi yang dikembangkan di Perguruan Tinggi adalah bidang studi pendidikan. Bidang studi ini akan mendidik calon-calon guru yang dibekali dengan berbagai ilmu keguruan dan ilmu ilmu yang menjadi pokok yang akan menghantarkannya menjadi guru.

Prodi pendidikan Agama Islam adalah salah satu prodi yang bertanggung jawab untuk terbentuk guru-guru agama, mulai tingkat Raudatul Athfal sampai Perguruan Tinggi. Karena itu, peranan pendikan tinggi sangat terkait erta dengan Pendidikan agama Islam.

B. PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kehidupan Perguruan Tinggi di Indonesia belum sampai satu abad. Dengan demikian, termasuk negara yang masih muda dalam tradisi Perguruan Tinggi. Sangat jauh berbeda dengan negara-negara yang terdapat dibelahan Barat (Eropa dan Amerika) yang telah melahirkan Perguruan Tinggi sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Itupun pada awalnya kelahiran

Perguruan Tinggi di Indonesia dianggapsebaga suatu yang mustahil.

Pendidikan tinggi atau Perguruan Tinggi memiliki peranan yang amat penting dalam pembangunansuatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, di mana saja dipenjuru dunia ini akan berlomba untuk mendirikan Perguruan Tinggi serta mendorong generasi mudanya untuk memasuki Perguruan Tinggi. Apa sebab demikian?. Hal ini tiada lain karena lewat Perguruan Tinggilah akan dihasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Tugas Perguruan Tinggi adalah melahirkan manusia berkualitas. Pembangunan suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari manusia berkualitas tersebut.

1. Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Perguruan Tinggi diharapakan akan mejadi pendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan saat sekarang ini. Berkaitan dengan itu sudah dapat dipastikan bahwa bangsa yang unggul adalah bangsa yang dapat menguasai dan memanfatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disadari betul bahwa penguasan dan pemanfatan Ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat dicapai melalui Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Berkenaan dengan itu maka peranan Perguraun Tinggi sangat menentukan. (BPPN, 2001, 2).

Sehubungan dengan itu, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) mengajukan pokok-pokok pikiran berkenaan dengan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesaia ini perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Penerapan dan pengembangan teknologi informasi yang canggih (sistem *on-line*, serta mampu mengakses internet) pada semua aktivitas Perguruan Tinggi, terutama dalam pembangunan perpustakaan.
b. Peningkatan serta penguatan kemampuan berbahasa asing, terutama Bahasa Inggris sangat diperlukan. Bahasa Inggris haruslah dipandang sebagai *the second language rather than a foreign language.*
c. Rendahnya kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia, dibanding dengan Perguruan Tinggi di negara-negara lain, setidak-tidaknya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu dana pengembangan Pendidikan Tinggi yang rendah dan mutu dosen yang rendah pula. (BPPN, 2001: 2-3).

Setelah diberlakukan UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen kualitas pendidikan tinggi di Indonesia sudah semakin membaik, dan dosen pun sudah semakin berkulitas dengan ditetapkannya standar minimal pendidikan dosen adalah Strata Dua (S.2).

2. Kaitan Perguruan Tinggi dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bericara tentang pengembangan sumber daya manusia, terkait erat dengan cita-cita ideal manusia yang ingin dibentuk Bangsa Indonesia melalui Pendidikan Nasional. Sebagaimana tertera pada Bab II pasal 3 Undang- Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.2 Tahun 2003).

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemam-

puan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnaya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrtis serta bertanggung jawab.

Berkenaan dengan tujuan pendidikan tersebut akan diformulsikan dalam tiga bentuk:

Pertama, masalah yang berkenaan dengan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, sehat. *Kedua*, berkenana dengan ilmu, sehat, cakap, kretif, mandiri. *Ketiga*, berkenaan dengan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

a. Pembentukan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan sehat.
   Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang religius, kehidupan beragama adalah hal yang amat urgen bagi masyarakat Indonesia. Agama telah ditempatkan pada posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika pendiri bangsa ini bersidang untuk menentukan dasar negara, maka ditetapkalah Pancasila sebagai dasar negara dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Selanjutnya landasan konstitusional UU Dasar 1945 juga menyebutkan tentang agama. Selanjutnya pada tataran landasan operasionalnya dibentuklah Kementerian Agama. Oleh karena itu, pentingnya masalah beragama, maka ditetapkanlah bahwa salah satu profil manusia Indonesia

itu adalah manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Bagaimana supaya manusia itu memiliki kualifikasi yang sedemikian?. Upayanya tidak lain adalah melalui jalur pendidikan; mulai tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Dengan demikian, Perguruan Tinggi punya peranan yang besar dalam membentuk manusia beriman bertakwa dan berakhlak mulia serta sehat jasmani dan rohani.

b. Pengembangan Ilmu, Cakap, Kreatif dan Mandiri.

Salah satu tugas utama Perguruan Tinggi adalah pentransferan ilmu, pendalaman ilmu, pengembangan ilmu, serta penyebar luasan ilmu. Lewat dharma pertama terjadi komunikasi keilmuan antara dosen dan mahasiswa. Dosen mentransferkan ilmunya kepada mahasiswa lewat proses belajar-mengajar. Ilmu yang ditransferkan itu diperdalam lagi oleh dosen dan mahsiswa lewat berbagai kegiatan ilmiyah berupa diskusi, seminar, symposium dan lain sebagainya. Selanjutnya ilmu itu dikembangkan lewat riset. Lewat risetlah ditemukan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak boleh tidak Perguruan Tinggi mesti mengambil peranan yang sungguh-sungguh dalam bidang riset. Hasil temuan itu dipublisaikan di tengah-tengah masyarakat lewat berbagai media atau dapat dijadikan sebagai kebijakan pemerintah.

Tidak disangsikan lagi bahwa peranan ilmu pengetahuan sangat startegis dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Negara-negara yang telah maju dalam bidang ilmu pengetahuannya terimbas pula kepada kesejahteraan masyarakat-nya. Sebab lewat kemajuan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh, mereka bisa memproduksi berbagai bentuk produk teknologi. Di sisi lain, ukuran dari suatau masyarakat yang berperadaban tinggi adalah kemajuan ilmu pengetahuan.

Negara kita yang dihuni lebih dari dua ratus juta penduduk yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke terdiri dari tujuh belas ribu pulau-pulau besar dan kecil, memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang sangat mendambakan tangan-tangan terampil sebagai *output* dari suatu Perguruan Tinggi untuk memanfaatkan, mengelola serta memelihara kekayaan alam Indonesia. Dari mana kita memperoleh manusia-manusia cekatan itu? Jawabnya, tidak lain adalah dari Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, saat ini arah kurikulum kita adalah kurikulum berbasis kompetensi, agar setiap peserta didik dapat diarahkan untuk betul-betul berkompeten dibidangnya.

Krisis ekonomi yang menimpa dunia sekarang tentu sangat besar imbasnya kepada dunia pendidikan, khususnya dunia Pendidikan Tinggi. Banyaknya masyarakat miskin yang terkendala melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ke Perguruan Tinggi.

Kondisi ini serba dilematis, sebab penyelenggaraan pendidikan tinggi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dapat juga dimaklumi bahwa untuk melahirkan *out put* yang berkualitas tinggi diperluan pendanaan penyelenggaran pendidikan yang tidak sedikit, sedangkan sebagaian besar masyarakat kita sedang dihimpit oleh persoalan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan Perguruan Tinggi – Perguarauan Tinggi memiliki

kepedulian sosial yang tinggi agar menerima calon mahasiswa tanpa dibebani dengan biaya yang tinggi.

c. Pembentukan Warga Negara yang Demokratis Dan Bertanggung Jawab

   Setiap warga negara Republik Indonesia dituntut untuk menjadi seorang demokrat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggung jawab itu diwjudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan, meliputi; cinta tanah air, cinta persatuan bangsa, cinta kedamaian, menghargai warga negara lainnya, rela berkorban dan memberi untuk kemajuan bangsa dan negara.

   Untuk terlaksananya hal yang demikian diperlukan poses pendidikan. Dalam proses pendidikan itulah Perguruan Tinggi mengambil peranan yang sangat penting.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perguruan Tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Lewat Pendidikan Tinggi akan terlaksana berbagai aktifitas pendidikan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya baik fisik maupun psikis.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya mestilah mengacu kepada profil manusia yang ingin dibentuk. Jika ditelusuri, terdapat tiga komponen dasar profil manusia Indonesia yang ingin digapai. *Pertama*, tentang iman, takwa dan akhlak mulia dan sehat. *Kedua* tentang ilmu pengetahuan, kecakapan, kreatifitas dan kemandirian. *Ketiga*, tentang warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai itu semua diperlukan lembaga pendidikan yang terpercaya.

Sutu hal yang menggembirakan kita saat ini adalah kebijakan pemerintah tentang Perguruan Tinggi. Pada prinsipnya pemerintah memberi peluang yang sama bagi Perguruan Tinggi negeri dan swasta untuk berkembang. Berlomba berpacu dalam konsep *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba untuk kebaikan).

C. PEMBIDANGAN ILMU PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

Pembidangan ilmu pada PTAI ke depan terkait erat bagaimana pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan kemudian bagaimana menyikapinya. Diawali dari konsepsi idealnya dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan kesatuan pandangan tentang hal tersebut, baik yang berasal dari dalam PTAI sendiri maupun dari luar.

Jika dirujuk kepada konsep ideal pembidangan ilmu sejak dari zaman klasik sampai sekarang, kelihatan bahwa ilmu dalam pandangan Islam terbagi kepada dua rumpun pokok, yakni ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang bersumber dari non wahyu (pnemuan manusia). Dari kedua sumber pokok itulah lahirnya berbagai cabang-cabang ilmu pengetahuan, di Indonesia popular dengan istilah ilmu pengetahuan agama dan umum.

Dalam proses sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan dalam Islam pernah terjadi –pada zaman kemunduran– seolah-olah ilmu pengetahuan menurut pandangan Islam itu hanyalah ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu saja. Pandangan yang seperti itu mulai berubah secara gradual setelah umat

Islam menerima ide-ide pembaharuan disekitar abad ke sembilanbelas. Di Mesir, misalnya muncullah Muhammad Ali Pasha yang membangun berbagai institusi pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari nonkewahyuan seperti dibangunnya sekolah-sekolah pertanian, teknik, meliter, pertambangan, kedoketarn dan lain-lain. (Nasution, 1992 : 38).

Demikian juga di Turki usaha yang sama dilaksanakan oleh Sultan Mahmud II. Di India atas prakarsa Said Ahmad Khan dibangunlah sekolah MAOC *(Muhammaden Anglo Oriental College),* di sekolah ini diajarkan ilmu pengetahuan kewahyuan dan ilmu pengetahuan non kewahyuan, sekolah inilah merupakan cikal bakal universitas Islam Alighar *(Alighar Muslim University)*.

Di Indonesia, atas usaha dari pelajar-pelajar Islam yang pulang dari Timur Tengah yang mereka sudah mendapat ide-ide pembaharuan pemikiran selama di Timur Tengah, seperti Abdullah Ahmad, Muhammad Djamil Djambek, Karim Amrullah, Syekh Taher Jalaluddin. Atas prakarsa mereka terutama Abdullah Ahmad maka pada awal abad ke duapuluh mulai didirikan madrasah yang di dalamnya diajarkan pengetahuan agama dan umum. Namun, dapat dimaklumi juga bahwa memasukkan pengetahuan umum ke lembaga pendidikan Islam terutama pesantren tidak semudah yang dibayangkan, bahkan sampai hari ini masih ada pesantren yang tetap bertahan hanya mengajarkan kitab-kitab klasik yang isinya sudah pasti ilmu-ilmu agama saja.

Secara khusus di dunia Perguruan Tinggi di Islam di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami dinamika. Pada tahap pertama sekali didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) pada bulan Juli 1945, kurikulum yang dipakai adalah mencontoh kurikulum Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Setelah STI berubah menjadi UII (Universitas Islam Indonesia) di Yogyakarta yang Fakultas Agamanya dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) pada tahun 1950 yang mengasuh tiga jurusan yakni Tarbiyah, Qadha dan Dakwah. Dari Jurusan yang dikembangkan ini kelihatan bahwa pengembangan ilmu adalah ilmu-ilmu keagamaan. Selanjutnya pada tahun 1960 didirikan IAIN dengan menggabungkan antara PTAIN di Yogyakarta dan ADIA di Jakarta. Dari kedua IAIN Yogyakarta dan Jakarta secara bertahap berkembangnya IAIN di seluruh Indonesia.Di IAIN sampai tahun 1980-an ilmu-ilmu yang dikembangkan adalah ilmu-ilmu agama. Baru pada tahun 1980-an di berbagai IAIN dibuka jurusan Tadris di Fakultas Tarbiyah dengan program studi matematika, IPA, Fisika dan Bahasa Inggeris.

Pada tahun 1997, fakultas-fakultas daerah yang berada di bawah asuhan IAIN induk masing-masing, secara administrasi dan manajemen dipisahkan dari induknya menjadi sekolah tinggi dengan nama STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri). Fokus utama dari sekolah tinggi inipun tetap pengembangan ilmu-ilmu agama.

Sejak tahun 1990-an pada masa Tarmizi Taher menjadi Menteri Agama dikembangkan gagasan untuk mendirikan Universitas Islam Negeri. Gagasan dan pemikiran itu berkembang di kalangan PTAI. Sejak saat itu IAIN Syarif Hidayatullah mempersiapkan diri untuk menjadi universitas yang akhirnya pada

tahun 2002 diresmikan berdirinya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di UIN ini dikembangkan kedua ilmu pokok tersebut, adanya ilmu yang bersumber dari wahyu dan ada ilmu yang bersumber dari non kewahyuan.

1. Konsep Ilmu Dalam Islam

Umat Islam bersentuhan dengan ilmu pengetahuan buat pertama sekali adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu. Rasulullah SAW. pada saat-saat tertentu menerima wahyu dari Allah lewat Malaikat Jibril. Selanjutnya wahyu tersebut disampaikan Beliau kepada para sahabat. Informasi yang disampaikan itu menjadi pengetahuan bagi mereka.

Wahyu yang disampaikan itulah Al-Qur'an selain dari itu para sahabat juga menerima wejangan dari Rasulullah SAW dan itulah yang disebut dengan Hadist atau Sunnah. Dengan demikian, pada tahap awal umat Islam mengenal dua sumber ilmu pengetahuan yaitu Al Qur'an dan Sunnah.

Semangat keilmuan telah ditumbuhkan Rasulullah sejak dini, baik lewat ucapan, praktek dan dorongan beliau. Misalnya Rasulullah membebaskan tawanan perang yang mampu mengajari umat Islam membaca dan menulis sebagai tebusan. Selain itu, Al-Qur'an pun banyak berbicara tentang ilmu dan mendorong untuk berilmu.

Umat Islam berkenalan dengan ilmu pengetahun non kewahyuan, ketika terjadi penaklukan daerah-daerah di belahan utara – Syiria, Irak, Iran, Mesir – yang kaya dengan pengetahuan dan peradaban. Hasil kontak itulah yang menimbulkan munculnya semangat ilmiah di kalangan kaum Muslimin. Setelah melewati

periode penerjemahan umat Islam menjadi pelopor ilmu pengetahuan terutama sekitar abad ke delapan sampai ke duabelas Masehi. Ketika itu berkembanglah di kalangan umat Islam dua pilar utama ilmu pengetahuan; yakni ilmu-ilmu *naqliyah* dan *aqliyah*.

Apabila dirujuk kepada pendapat para pemikir Islam klasik terlihat bahwa kedua ilmu itu tidak dipilah tapi menyatu. Beberapa pendapat tentang itu akan diuraikan berikut ini: Al-Farabi mengkalasifikasikan pengetahuan sebagai berikut: (1) Ilmu bahasa: sintaksis, tata bahasa, pengucapan, cara berbicara, puisi. (2) Logika: pembagian, komposisi dan defenisi pikiran secara sederhana. (3) Ilmu *propaedeutic*: ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu optik, ilmu tentang cakrawala, musik, ilmu gaya berat, ilmu membuat alat. (4) Fisika (ilmu alam); metafisika (ilmu tentang tentang Tuhan dan prinsip benda). (5) Ilmu kemasyarakatan: *yurisprudensi*, retorika. Al-Farabi memasukkan studi keagamaan di bawah metafisika dan ilmu kemasyarakatan. (Ashraf, 1989 : 29).

Ikhwanussafa, membagi pengetahuan atas tiga kelas: (1) Pendahuluan: menulis, membaca, bahasa, ilmu hitung, puisi dan ilmu persajakan, pengetahuan tentang pertanda dan yang ghaib, keahlian dan profesi. (2) Religius atau positif: Al-Qur'an, penafsiran alegoris, hadist, sejarah, hukum, tasawuf dan penafsiran mimpi. (3) Filosofis atau faktual (*haqiqi*): matematik, teori angka, ilmu ukur, astronomi, musik, logika dengan retorika dan sofistika. Fisika (zat dan bentuk), cakrawala dan elemen-elemen, metereologi, geologi, botani, zoology, metafisika (teologi)-Tuhan, kecerdasan, jiwa (dari lingkungan ke bawah) pemerintah

para nabi dan raja-raja, jenderal, khusus, individual, alam baka, dan lain-lain. (Ashraf, 1989 : 29).

Sedangkan Al-Ghazali mengelompokkan ilmu kepada: *shar'iyyah* dan *gayr syari'yyah*. Ilmu Syari'ah terdiri dari: (1) *Ushul* yakni Al-Qur'an, sunnah Nabi, ijmal dan atsar sahabat. (2) *Furu'* yakni ilmu yang dipahami dari ilmu *ushul*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia yang biasanya berupa fiqh dan ilmu yang berkitan dengan kemaslahatan akhirat. (3) *al Muqaddimat*, yaitu ilmu alat seperti bahasa. (4) *al-Mutammimat*, yakni ilmu Al-Qur'an, tafsir, ilmu hadist, usul al-fiqh, dll. Yang *ghair shar'iyyah* dikelompokkan menjadi tiga: (1) Terpuji (2) Mubah dan (3) Tercela (Azizy, 2003: 17).

Ibnu Khaldun menyebutkan dalam kitan *Muqaddimah*--nya bahwa ilmu terbagi dua yaitu *naqliyyaah* dan *'aqliyyah*, atau ilmu flsafah atau intelektual. Yang termasuk pada ilmu *naqliyyah* adalah Al-Qur'an, Hadits, yurisprudensi, theologi sufisme, (tassawuf) ilmu-ilmu linguistik, seperti: tata bahasa, leksikografi dan kesusasteraan, metafisika, ilmu ghaib, ilmu abjad, kimia, dan ilmu yang menyangkut kuantitas seperti ilmu ukur, ilmu hitung, aljabar, transaksi komersial, astronomi dan astrologi (Ashraf, 1987 : 32).

Naquib Al-Attas, menjelaskan hakikat pengetahuan bertolak dari pandangan bahwa semua pengetahuan itu datangnya dari Allah. Penggolongan pengetahuan berdasarkan kepada kenyataan bahwa manusia itu memiliki dua jiwa, yang satu adalah santapan dan kehidupan jiwa sedangkan yang kedua adalah kelengkapan yang dapat digunakan untuk melengkapi dirinya di dunia untuk mengejar tujuan yang pragmatis.

Pengetahuan jenis pertama diberikan Allah melalui wahyu-Nya kepada manusia lewat Al-Qur'an.

Adapun jenis kedua adalah pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan penelitian. Hal itu ditempuh lewat penyelidikan dan perenungan rasional. Kelompok ilmu pertama wajib diketahui oleh setiap Muslim (*fardhu 'ain*), sedangkan kelompok ilmu kedua *fard kifâyah*. (Al-Attas, 1979 : 29-34).

Konfrensi pendidikan Islam internasional membagi ilmu kepada dua: *perennial knowledge dan acquired knowledge: "planning of education to be based on the classification of knowledge into two categories ; (a)Perennial knowledge direved from qur'an and sunnah meaning all shari'ah–oriented knowledge relevant and related to them, and (b) Acquired knowledge susceptible to quantitative growth and multiplication, limited variations and cross cultural borrowing as long as consistency with shari'ah as the source of values is maintained*". (*First Conference on Muslim Education* : 4).

Bayar Dodce dalam bukunya *Muslim Education in Medevial Time* mengemukakan bahwa The Medieval Curriculum: (a) *The revealed science and of the Arabic Language (grammer, rethoric, literature, reading (Qur'anic), exegesiss (commentary), traditions (of the prophet), law, sources of principle the law, theology.* (b) *The rational science; mathematies, devition of inheritence, logic. Many individual scholars studied philosophy, astrology, astronomy, geometry, medicine, pharmacy and certain aspect of the natural science, as well as alchemy, but these subyect were as rule taught by private teacher in ther homes or else in*

hospital. The basic curriculum of medieval time did not include secular subjects, but was devoted to studies explaining the revelations of the Qur'an and their application to everyday life. (Dodce, 1962 : 29-30).

Mehdi Nakosteen mengemukakan, ilmu pengetahuan Islam mengalami kemajuan yang mengesankan selama priode abad "pertengahan" melalui orang-orang kreatif seperti al-Kindi, al-Razi, al-Farabi, Ibnu Sina, al-Masudi, At-Tabari, Al-Ghazali, Nashir Khusru, Omar Khayam dan lain-lain. Pengetahuan Islam itu telah melakukan investigasi dalam ilmu kedokteran, theologi, matematika, geografi dan bahkan sejarah. Tetapi itu semua ini dilakukan di dalam *framework* keagamaan dan skolastikisme (Nakosteen, 1996 : xi).

Kurikulum pendidikan Islam pada waktu itu (zaman pertengahan), disebutkan Nakosteen "*Bukan suatu yang luar biasa menemukan pelajaran-pelajaran: matematika (aljabar, trigonometeri dan geometri); sains (kimia, fisika, astronomi); ilmu kedokteran (anatomi), pembedahan, farmasi, dan cabang-cabang ilmu kedoteran khusus; filsafat (logika, etika, dan metafisika); kesusateraan (filologi, tata bahasa, puisi dan ilmu persajakan); ilmu-ilmu soial, sejarah, gegrafi, disiplin-disiplin yang berhubungan dengan politik, hukum, sosiologi, psikologi dan jurisprudensi (fiqh), teologi (perbandingan agama, sejarah agama-agama, studi Qur'an, tradisi religius (Hadist) dan topik-topik religius lain).*" (Nakosteen, 1996 : 71).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya ilmu dalam Islam dibagi kepada dua jenis, yakni ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang bersumber dari manusia.

Praktek keilmuan yang seperti ini telah diaplikasikan oleh masyarakat Muslim di zaman klasik. Hanya saja pada zaman kemunduran *(dark age)* yang dialami oleh umat Islam pada saat mana akal tidak difungsikan secara maksimal dan pintu ijihad tertutup, ilmu yang berkembang adalah ilmu-ilmu kewahyuan saja. Hal ini melanda seluruh dunia Islam. Kenyataan seperti inilah yang dialami oleh pendidikan Islam di Indonesia, sebelum masuknya ide-ide pembaharuan di mana ilmu-ilmu yang dikembangkan di pesantren, dayah, surau adalah ilmu-ilmu kewahyuan yang dikemas di dalam kitab-kitab klasik (kuning).

Selanjutnya setelah adanya kontak antar dunia Islam dengan dunia Barat di abad ke sembilan belas, maka timbullah kesadaran umat Islam bahwa ilmu yang semestinya dikembangkan dalam Islam itu tidak hanya ilmu-ilmu kewahyuan saja, juga mencakup ilmu-ilmu yang non kewahyuan. Sejak itu secara bertahap muncullah upaya untuk merekonstruksi keilmuan dalam Islam dalam dua pilar tersebut.

Di Indonesia upaya untuk menggabungkan antara ilmu-ilmu kewahyuan dengan yang non kewahyuan itu dilaksanakan pada awal abad keduapuluh setelah kembalinya para pelajar Islam yang menuntut ilmu di Timur Tengah. Sejak itu berdirilah madrasah yang mencoba untuk menggabungkan kedua ilmu tersebut, dan secara bertahap pula pesantren memasukkan mata pelajaran umum dan keterampilan.

Gaung penyatuan kedua ilmu tersebut (*perennial knowledge* dan *acquired knowledge*) terdengar sangat bergema ketika dilaksanakan konferensi pertama pendidikan Islam se dunia

pada tahun 1977. Hasil dari konferensi itu direalisasi dengan munculnya Universitas Islam Internsional (*International Islamic University*), salah satunya yang terdapat di Asia Tenggara ini yaitu di Kuala Liumpur Malaysia.

2. Aplikasi Konsep Ilmu Dalam Lapangan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan Islam telah berlangsung di Indonesia sejak masuknya Islam ke Indonesia, dilaksanakan di masjid, pesantren, dayah, surau. Inti dari ilmu yang dikembangkan pada masa itu adalah pendalam ilmu-imu agama saja lewat kitab-kitab klasik. Karena itulah pada zaman kolonial Belanda sebelum abad keduapuluh terdapat dikhotomi antara sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan kolonial Belanda. Dalam sistem pendidikan Islam ketika itu ilmu yang diajarkan hanya ilmu agama saja lewat kitab kuning, sedangkan sistem pendidikan kolonial mengajarkan hanya ilmu-ilmu sekuler dan tidak mengajarkan sama sekali pendidikan agama.

Pada awal abad ke duapuluh baik karena tuntutan interen umat Islam maupun karena pengaruh pembaharuan di dunia Islam yang dibawa oleh para pelajar yang pulang dari Timur Tengah, mulai muncul usaha-usaha pembaharuan pendidikan Islam. Usaha pembaharuan terlihat pada: *pertama*, mata pelajaran, tidak lagi semata-mata mengajarkan mata pelajaran agama, tetapi telah dimasukkan mata pelajaran umum. *Kedua*, metode tidak lagi semata-mata memakai methode sorogan, wetonan, hafalan dan *muzakarah* seperti yang dikembangkan di pesantren, tetapi telah mengenal metode-metode lainnya.

Ketiga, manajemen telah mengikuti manajemen sekolah yang dikelola oleh pemerintah Belanda. Selain dari itu sistem klasikal pun diterapkan pula. (Daulay, 2001 : 67).

Secara bertahap lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisonal; pesantren, dayah dan surau menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Di dalam menyikapi ini tidak secara drastis, tetapi berubah secara pelan-pelan sehingga sampai saat sekarang pun masih ada pesantren yang masih tetap berpegang kepada pola lama dan pesantren ini disebut dengan pesantren *salafiyah* disamping adanya pesantren *khalafiy* (modern).

Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Kementerian Agama dan salah-satu tugasnya adalah mengurusi masalah pendidikan agama, baik sebagai mata pelajaran maupun sebagai lembaga. Sebagai mata pelajaran pendidikan agama dilaksanakan mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Sebagai lembaga, adanya lembaga pendidikan Islam mulai tingkat dasar sampai pendidikan tinggi - Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan PTAI, ditangan Deperteman Agama lembaga-lembaga ini diadakan berbagai perbaikan, namun orientasinya tetap pada pengembangan ilmu-ilmu agama.

Perubahan yang cukup drastis di lapangan pendidikan Islam adalah ketika di berlakukannya SKB Tiga Menteri (Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Inti dari perubahan itu adalah pembaharuan dan pemberdayaan madarasah. Diadakanlah perubahan yang drastis dalam kurikulum madrasah SKB Tiga Menteri yakni 70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama. Dengan diberlakukannya kurikulum

yang seperti itu maka madrasah disetarakan dengan sekolah umum. Madarsah ibtidaiyah setara dengan SD, madrasah Tsanawiyah setara dengan SLTP dan Madrasah Aliyah setara dengan SLTA.

Selanjutnya dengan diberlakukannya UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka madrasah secara ekplisit dinyatakan sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Pemaknaannya adalah di madarasah diprogramkan seluruh apa yang diprogram di sekolah dan ditambah dengan mata pelajaran agama dan suasana keberagamaan.

Dengan demikian, pada tingkat pendidikan dasar dan menengah lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak tahun 1975 dan diperkuat lagi sejak diberlakukanya UU No. 2 tahun 1989 serta UU No. 20 tahun 2003 maka madrasah telah mengalami perubahan yang drastis. Bagaimana keadaannya dengan lembaga pendidikan tinggi Islam, seperti IAIN dan STAIN ?. Kalau kita mencermati pada tingkat pendidikan tinggi perubahan itu sangat lambat. Atau hampir tidak ada. Kalaupun dapat dikatakan perubahannya adalah ketika sebagian Fakultas Tarbiyah di Indonesia membuka Jurusan Tadris dengan konsentrasi matematika, fisika, biologi dan Bahasa Inggris pada tahun 1980-an. Kelihatannya perubahan itu tidak terlalu banyak berarti bagi pengembangan IAIN sebab perubahan masih bersifat parsial.

Setelah digaungkan perubahan IAIN menjadi UIN, pada tahun 1990-an mulai tumbuh pemikiran sebagian IAIN ke arah itu. Salah satu yang amat serius memprogramkan perubahan IAIN menjadi UIN adalah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Untuk itu, mereka mengawali dengan membuka jurusan dan program studi umum, yang akhirnya pada tahun 2002 secara resmi IAIN Syarif Hidayatullah berubah menjadi UIN (Universitas Islam Negeri).

3. Upaya Pengembangan Perguruan Tinggi Kedepan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa pendidikan Islam tidak hanya mumpuni dalam bidang teori, tetapi diperlukan karya nyata dalam menyahuti tuntutan kehidupan masyarakat modern saat ini. Kedepan, ada upaya yang bisa dilakukan dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi, antara lain:

a. Mengkonstruk Ilmu-Ilmu Keislaman

Secara garis besar telah dikemukakan di atas bahwa pada dasarnya ilmu-ilmu keislaman itu adalah perpaduan yang menyatu antar ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang bersumber dari manusia. Pada prinsipnya ilmu itu satu datangnya dari Allah, akan tetapi ada yang langsung dari Allah yaitu ilmu-ilmu kewahyuan dan ada yang lewat perantaraan manusia. Kedua ilmu ini secara ideal harus dikembangkan di lembaga pendidikan Islam.

Tahap pengembangannya adalah menentukan batasan-batasan ilmu-ilmu yang tergolong kewahyuan atau bukan kewahyuan. Lewat penentuan itu akan diperoleh secara jelas batasan masing-masing, dan seterusnya diaplikasikan dalam bentuk mata pelajaran.

Dalam tataran ini, IAIN Sumatera Utara telah mengkonstruki

bangunan ilmu itu kepada emapat macam: *Pertama*, ilmu kewahyuan, ilmu yang menyangkut sumber ajaran Islam Al-Quran dan al-Hadist. Secara historis studi tentang ilmu ini telah berkembang secara serius baik di kalang muslim maupun non muslim yang pada gilirannya telah melahirkan cabang ilmu 'Ulum Al-Qur'an, tafsir (*Quranic Exegesis*), dan 'Ulum al-Hadist. Kedua ilmu itu masing-masing mengandung beberapa disiplin ilmu pendukung.

Kedua, Pemikiran Islam, mencakup seluruh pemikiran yang berkembang di kalangan Islam, baik yang secara esensial berkembang dari kedua sumber di atas atau penjabaran terhadap keduanya, maupun dari realitas alam dan perenungan yang telah mengalami "Islamisasi". Hasan Hanafi menyebutnya dengan ilmu-ilmu rasional. Sejarah telah membuktikan bahwa kayanya peradaban Islam dengan ilmu-ilmu pemikiran ini seperti Kalam, *Ushul al-Fiqh*, Sufisme, Filasafat, Seni, Kedokteran, Astronomi, fisika, Kimia dan lain-lain (Matondang, 1998: 2).

Ketiga, adalah ilmu terapan adalah ilmu tentang realitas peradaban dan kebudayaan yang berkembang/dikembangakan oleh umat Islam. *Keempaat*, ilmu instrumen adalah penunjang bagi pendalaman ilmu–ilmu tersebut di atas yaitu ilmu-ilmu bahasa dan metodologi. (Matondang, l998: 2).

b. Pengintegarasian Ilmu.

Sejak bergulirnya pendapat Al-Faruqi tentang Islamisasi Ilmu, maka banyak para pakar memperbincangkannya. Sekarang model integrasi itu masih terus berkembang, namun suatu keharusanlah bagi pemikir-pemikir Muslim saat sekarang

untuk terus mengembangkan-nya. Penulis berpendapat paling tidak ada dua langkah yang harus ditempuh untuk ini. *Pertama*, landasan filosofis dan *kedua*, landasan metodologis.

Pada landasan filosofis yakni membangun landasan integrasi keilmuan berdasarkan landasan ontologis, epistimologis dan axiologis. Landasan ontologis, membicarakan tentang hakikat keberadaan sesuatu dan dalam pandangan Islam hakikat keberadaan itu tidak hanya materi, akan tetapi juga immateri. Diyakininya adanya eksistensi kedua keberadaan itu. Hal ini tentu mengandung implikasi terhadap adanya dua pendekatan yakni ada pendekatan yang dilakukan terhadap materi di samping immateri. Karena itu kebenaran yang dibangun tidak hanya kebenaran sensual dan rasional, tetapi juga diakui adanya kebenaran etik dan transendental.

Landasan epistimologis adalah membicarakan tentang asal usul, pencapaian dan dari mana ilmu itu diperoleh. Dalam hal ini ditawarkan pencapaian ilmu tidak hanya berlandas kepada filsafat positivitik dan rasionalistik. Kajian tidak hanya kebenaran sensual dan rasional, maka sudah barangtentu diperlukan landasan epistimologi yang dapat mengungkapkan berbagai tingkat kebenaran tersebut.

Landasan axiology, landasan ini membicarakan apakah ilmu itu bebas nilai atau terkait nilai. Jika ilmu bebas nilai, maka ilmu itu akan menuju ke arah yang tak terkendalikan dan akan berakibat penghancuran manusia dan dehumanisasi. Menurut pandangan Islam, ilmu itu terkait nilai. Dengan demikian, perlu dipertanyakan, apa, bagaimana dan akan ke mana IPTEK dipergunakan. Bila IPTEK dipergunakan untuk menghancurkan manusia, maka ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

Landasan metodologis. Pertanyaannya adalah, metode yang bagaimana yang tepat untuk diberlakukan dalam membangun IPTEK yang berwawasan Islam. Dalam hal ini ada beberapa tawaran, antara lain Mukti Ali memakai pendekatan kontekstual sebagai upaya untuk mempelajari kitab suci sebagai pusat ide, dan sejarah Islam sebagai periferinya. Quraish Shihab memperkenalkan *tafsir maudhu'i*, dengan merumuskan tema masalah yang akan dibahas, menghimpun, menyusun, menelaah ayat Al-Qur'an dan melengkapinya dengan Hadits yang relevan, dan menyusun kesimpulan sebagai jawaban Al- Qur'an atas masalah yang dibahas.

Noeng Muhajir memperkenalkan cara yang mirip dengan metode *maudhui'*/tematik bagi upaya membangun IPTEK dalam persepektif Islam. Langkah pertama, mengkonstruk suatu bangunan ilmu tertentu atau mensistematisasikan suatu tema besar beradasarkan konsep IPTEK yang valid, sekaligus menampilkan problematikanya, sesudah itu baru dilanjutkan dengan tahap kedua, yakni menghimpun, menyusun, menelaah ayat Al-Qur'an dan hadist yang relevan. Teknis nash tersebut dapat dihimpun pertama-tama berdasar problematika yang teridentifikasi ditahap pertama. Selanjutnya ditahap berikutnya muncul teori atau konsep dasar tentang berbagai hal keilmuan dalam Islam (Muhajir, 1989).

Qadri Azizy menjelaskan tentang *Islamization of Knowledge* adalah merupakan respons terhadap perkembangan keilmuan di Barat yang begitu maju. Respon ini adalah upaya agar ilmu-ilmu sekuler itu mempunyai akar dan landasan dari ajaran tauhid. Menurut beliau program *Isalmization of knowledge* ini pada umumnya lebih memfokuskkan pada sasaran *social science, humanities*, bahkan juga *natural science* (termasuk teknologi), justru kurang ada gaung untuk memperbaiki ilmu-ilmu keislaman yang baku. (Azizi, 2003 : 35-36).

4. Keharusan Untuk Berubah

Pembidangan ilmu yang dikembangkan di PTAI selama setengah abad ini tidak banyak perubahan yang berarti, perubahannya hanya bersifat parsial, misalnya dengan membuka Jurusan Tadris di Fakultas Tarbiyah. Selayaknya sudah sepantasnya di abad duapuluh satu ini terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan itu adalah berkenaan dengan pembidangan ilmu yang selama ini terfokus kepada pembidangan ilmu-ilmu agama saja, maka sudah saatnya terjadi perubahan ke arah lebih komprehensif yakni mengembangkan ilmu-ilmu yang non kewahyuan. Alasan pertimbangan ini adalah :

a. Konsep pendidikan dalam Islam dan secara khusus konsep keilmuan dalam Islam adalah mengembangkan dua jenis keilmuan yakni ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang bersumber dari non kewahyuan.

b. Pada saat pertama sekali dibukanya perkuliahan pada Sekolah Tinggi Islam (STI) pada tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta, kurikulum yang dipakai adalah kurikulum Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar Kairo. Erat kaitannya bahwa ketika itu Al Azhar masih terkonsentrasi kepada ilmu-ilmu diniyah. Sedangkan sekarang Al Azhar telah membuka fakultas-fakultas non keagamaan.

c. Sejak diberlakukannya UU No.2 tahun 1989 yakni Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional diiringi dengan

seperangkat PP terutama PP No. 28 tahun 1990 (tentang pendidikan dasar) dan PP No.29 tahun 1990 (tentang pendidikan menengah), madrasah telah dikategorikan kepada sekolah yang berciri khas Islam. Sebagai sekolah, maka program pokoknya adalah mata pelajaran seperti apa yang diprogramkan di sekolah. Hal itu bermakna bahwa tujuan institusional madrasah tidak lagi persiapan peserta didik untuk mendalami agama, hal inipun ditandai pula dengan hilangnya jurusan agama di madarsah aliyah. Hal yang sama juga berlaku pada UU No. 20 tahun 2003. (Undang-Undang tentang Sistem Pendidkan Nasional yang berlaku sekarang).

d. Kondisi lapangan kerja sebagai pegawai negeri bagi alumni IAIN semakin terbatas, baik sebagai guru maupun sebagai pegawai administrasi.
e. Kecenderungan masyarakat saat sekarang ini adalah menginginkan putra-putri mereka mendalami ilmu-ilmu umum, tetapi memiliki jiwa keberagamaan yang kuat.

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, konsep keilmuan dalam Islam pada dasarnya bersumber dari dua pilar yaitu pilar ilmu-ilmu kewahyuan dan non kewahyuan. *Kedua*, konsep ilmu yang semacam ini telah dibangun sejak zaman klasik, misalnya pemikiran Al-Farabi, Ikhwanussafa, Al-Ghazali, Ibn Khaldun.

Konsep itu juga dikembangkan olehi pemikir-pmikir Islam kontemporer seperti Naquib Al-Attas, As-Syaibani, Al'Ainain, Ashraf dan seluruh tokoh yang menggagas Konferensi Islam Internasional tentang pendidikan Islam.

Dari kedua pilar itu perlu dipetakan pembidangan ilmu yang akan diterapkan di PTAI. IAIN Sumatera Utara –sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indoensia- telah memetakan itu dalam empat kelompok keilmuan yaitu: kewahyuan, pemikiran, terapan, dan instrumen. Berdasarkan landasan pemikiran di atas untuk ke depan di PTAI sudah semestinyalah digagas pengembangan keilmuan yang berbasis dua pilar tersebut di atas.

Pengintegrasian kedua pilar ilmu itu harus terus dikembangkan dan dikaji secara terus menerus, dengan merujuk kepada pendapat-pendapat yang telah lebih dahulu berkembang, seperti gagasan Al Faruqi, Sardar dan para pemikir Islam kontemporer lainnya.

Pemetaan keilmuan di PTAI adalah berbasis kepada dua pilar keilmuan yakni ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang bersumber dari non wahyu. Dari kedua pilar itulah berkembangnya displin ilmu-ilmu lainnya. Dengan demikian, pembukan program studi, jurusan dan fakultas ilmu-ilmu yang berbasis non kewahyuan sudah perlu dipersiapkan, baik konsep ontologis, epistimologis dan axiologisnya, maupun adminstrasinya. Oleh karena itu, harus mengkomunikasikannya dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.

D. MEMBERDAYAKAN PENDIDIKAN AGAMA DI PERGURUAN TINGGI

Tap MPRS Nomor XXVII Tahun 1966, menetapkan bahwa pendidikan agama wajib diberikan di sekolah-sekolah mulai

dari tingkat dasar sampai Universitas-Universitas Negeri. Keputusan tersebut erat kaitannya dengan upaya untuk memberantas faham komunisme yang sudah tersebar di masyarakat pada ketika itu dan juga sejalan dengan salah satu arah pendidikan yang ditetapkan oleh MPRS Tahun 1966 yakni mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.

Landasan pikiran yang seperti itu juga menjiwai isi dan arah serta tujuan pendidikan nasional yang diungkapkan secara eksplisit dalam tujuan pendidikan nasional yang dicantumkan pada pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yakni "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi menusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa tersebut tentu upaya yang dilakukan adalah lewat pendidikan agama. Pertanyaan yang mendasar tentang hal ini adalah sudah sejauh manakah pendidikan agama yang dilaksanakan selama ini untuk membawa peserta didik ke arah yang dicita-citakan yakni pembentukan manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja di dalam menggapai tujuan tersebut tidak lepas dari berbagai problema. Problema-problema tersebut harus dicarikan solusinya.

Perkataan iman dan taqwa berada pada tataran abstrak, namun harus muncul pada tataran praktis dalam kehidupan keseharian peserta didik. Karena itu, perlu ada indikasi–indikasi terukur yang dapat dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi pendidikan agama di Perguruan Tinggi.

1. Landasan Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofi bangsa bertolak dari Pancasila sebagai dasar negara, yakni sila Ketuhan Yang Maha Esa. Asas ini mengandung makna bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan kehidupan beragama bangsa Indonesia. Disinilah letaknya pandangan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia yang memposisikan agama sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari penyelenggaraan negara. Meletakkan kedudukan di antara dua posisi tidak sekuler dan tidak pula menjadi negara agama.

b. Landasan Konstitusional UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari preambul sampai batang tubuh menyinggung masalah yang berkenaan dengan agama. Dalam preambul dinyatakan bahwa kemerdekaan dicapai atas berkah rahmat Allah SWT. Di dalam batang tubuh UUD 1945 dicantumkan masalah yang berkenaan dengan agama, yakni pasal 29 ayat 1 dan 2.

c. Landasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah berkenaan dengan pendidikan.

Landasan ini menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional yang salah satu aspeknya pembentukan manusia beriman dan bertaqwa.

d. Landasan Sosial Religius.

Masyarakat Indonesia secara kutural adalah masyarakat religius, karena itu maka untuk menghidupkan serta mendorong agar tumbuh dan berkembangnya semangat keberagaman masyarakat adalah sesuatu yang berlandas kepada landasan kultural sosial masyarakat Indonesia.

2. Arah Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi

Dirjen Dikti Depdikbud lewat surat yang dikeluarkannya: No. 25/DIKTI/KEEP/1985, menjelaskan tentang tujuan pendidikan di Perguruan Tinggi adalah menghasilkan warga negara menjadi sarjana yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama, dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain.

Lembaga pendidikan tinggi adalah lembaga ilmiah, maka seharusnya pula pendidikan agama yang diberikan disesuaikan dengan tingkat berfikir mahasiswa tersebut. Dalam hal ini diperlukan pembahasan-pembahasan di samping prinsip dan dasar-dasar agama Islam perlu diberikan pembahasan dan sentuhan sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang ditekuninya.

Dengan demikian, ada tiga muatan pokok pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi :

a. Pokok-pokok yang berkaitan dengan dasar-dasar agama Islam (Aqidah, Syari'ah, Akhlak).
b. Islam dikaitkan dengan disiplin ilmu terkait yang dipelajarinya (Islam untuk disiplin ilmu pendidikan, psikologi, sejarah, ekonomi, hukum dan sosial, kedokteran dan lain-lain).
c. Kaitan agama dengan kehidupan nyata sehingga timbulnya sikap *istiqamah*, terutama dikaitkan dengan sikap hidup dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi.

3. Strategi Pendekatan

a. Integrited pendekatan kognitif, afektif dan psikomotorik.

Banyak kesan dari pengamat pendidikan agama bahwa pendidikan agama dilaksanakan di Indonesia sangat dominan pendekatan kognitif mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Pendekatan ini lebih banyak orientasinya kepada pengisian otak yang sifatnya *transfer of knowledge*. Padahal agama sebetulnya tidak hanya "santapan" otak, bahkan yang lebih dominan adalah "santapan" hati.

Oleh sebab itu, pendekatan afektif menjadi strategi utama. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan afektif itu?. Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan afektif adalah: 1) berkenaan dengan perasaan; 2) keadaan perasaan yang mempengaruhi keadaan penyakit (penyakit jiwa), gaya atau makna yang menunjukkan perasaan (Kamus Umum bahasa Indonesia, 1990:8).

Kamus Psikologi menyebutkan: *affect, effection*: 1) *a broad class of mental prcesses, including feeling, emotion, moods, and temprament. Historically, affectin was unpleasantness. Affectivity*: 1) *emotionality, tendency toward emotional reaction;* 2) *generalized emotional reaction not readily indentifiable with a particular situmulus situation*. (Chaplin, 1973 : 13-14).

Berdasarkan ungkapan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa afektif itu adalah masalah yang berkenaan dengan emosi (kejiwaan). Berkenaan dengan itu terkait dengan suka, benci, simpati anti pati dan lain sebagainya. Dengan demikian, afektif itu adalah sikap bathin seseorang.

Pendidikan agama yang berorientasi kepada pembentukan afektif ini adalah pembentukan sikap mental peserta didik ke arah menumbuhkan kesadaran beragama. Beragama tidak hanya pada kawasan pemikiran, tetapi juga memasuki kawasan rasa. Karena itu, sentuhan-sentuhan emosi beragama perlu dikembangkan. Di antara metode yang banyak kaitannya dengan sentuhan emosi adalah :

1) Bimbingan kehidupan beragama
   Bimbingan kehidupan beragama adalah lembaga konsultasi mahasiswa dalam berbagai problema kehidupan yang dialaminya terutama berkenaan dengan agama. Diasumsikan berdasarkan tingkat emosional perkembangan jiwa mahasiswa, banyak di kalangan mahasiswa yang memerlukan bantuan dan pertolongan dari pihak lain untuk memberikan jalan keluar dari problema yang dihadapinya.
2) Studi Islam Intensif (SII)
   Kegiatan ini merupakan komplemen dari kegiatan kelas

yang terjadwal terstruktur. Bentuknya bisa dalam bentuk diskusi, muzakarah, pesantren kilat, bedah buku, praktikum ibadah dan lain sebagainya.
3) Malam Ibadah
   Perlu dijadwalkan adanya latihan spritual untuk menghayati kebermaknaan beragama di kalangan mahasiswa, seperti membaca Al-Qur'an zikir dan lain yang kegiatannya mengarah kepada kepada *muhâsabah*.

b. Integrited pendekatan sensual, rasional, etik dan transendental.

Pendekatan agama yang dilakukan kepada mahasiswa harus dilakukan dengan cara rational, ilmiah dan supra ilmiah. Kepada mahasiswa harus diberikan kesadaran bahwa kebenaran itu memiliki beberapa jenis. Sehingga tidak terkesan bahwa kebenaran itu hanya satu sisi kebenaran lainnya. Kebenaran transendental misalnya, adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam. Kebenaran ini dapat digolongkan kepada kebenaran supra ilmiah. Seseorang harus dapat membedakannya dan mendudukkan masing-masing pada posisinya. Misalnya ketika berbicara tentang alam ghaib, maka dipakai pendekatan transendental. Dan ketika berbicara alam nyata dipergunakan pendekatan sensual, rasional dan ilmiah.

Pendekatan-pendekatan tersebut erat kaitannya dengan pendekatan yang dilakukan oleh Al-Qur'an berbicara tentang hal-hal bersifat indrawi, rasional dan supra rasional.

c. Dialogis (*Two Ways Traffics*)

Menghidupkan suasana dialogis berarti menghidupkan pemikiran keagamaan. Pemikiran keagamaan di dalam Islam telah berkembang sejak abad pertama Hijriah. Pada tahap awal lahir dan berkembang pemikiran teologis (ilmu kalam), muncul aliran Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Asy'ariyah dan lain sebagainya. Dalam bidang Fiqh muncul mazhab-mazhab fiqh seperti: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam bidang Tasawuf juga muncul pemikiran yang dikembangkan oleh al-Hallaj dengan teori *hulul*-nya, Ibnul 'Arabi, Al Ghazali dan lain sebagainya.

Timbulnya berbagai aliran ketika itu menyebabkan timbulnya dinamika pemikiran Islam. Bagi mahasiswa, wacana pemikiran itu perlu ditumbuhkan karena dengan demikian akan memperluas cakrawala pemikirannya sehingga dia tidak terjebak kepada salah satu pemikiran saja dan menjadi fanatisme buta untuk mengikuti pemikiran tersebut.

d. Menumbuhkan Sikap Moderat

Beberapa produk dari pemikiran Islam tidak jarang menimbulkan pemikiran ekstrim, seperti halnya pemikiran Qadariyah dan Jabariyah dalam bidang Teologis, Satu aliran berpendapat bahwa manusia telah diberi kekuatan untuk menentukan dirinya sendiri apakah bahagia atau celaka di dunia dan akhirat. Sedangkan satunya lagi berpendapat seluruh nasib dan ketentuan terhadap manusia telah diatur, manusia tinggal menunggu masanya saja. Kedua aliran ini masing-masing apabila diteliti ayat-ayat Al Qur'an mengandung kedua unsur tersebut. Ada

ayat-ayat yang mendorong sikap Qadariyah dan ada pula ayat-ayat Jabariyah. Demikian juga seterusnya. Terjadinya perbedaan pendapat yang dahsyat tersebut bertolak dari masing-masing kelompok berpegang kepada memperkuat fahamnya saja.

Sebenarnya di antara kedua aliran tersebut dapat ditumbuhkan sikap moderart, sebagai contoh munculnya aliran Ahlus Sunnah yang mencoba mengambil sintesa di antara keduanya. Pemikiran moderat ini perlu ditumbuhkan agar mahasiswa tidak terjebak kepada fanatisme buta terhadap satu aliran saja.

e. Pendekatan Integrited Keilmuan

Ilmu dalam pandangan Islam terbagi kepada dua. Pertama *perennial knowledge* yaitu ilmu yang bersumber dari wahyu. Kedua, ilmu yang tergolong *acquired knowledge*. Kedua ilmu itu masing-masing berbeda ontologisnya dan epistimolosignya serta axiologisnya. Agar nilai-nilai Islam muncul dalam ilmu pengetahuan, maka diperlukan pendekatan integrited di antara kedua ilmu yang disebutkan di atas. Langkah awal dapat dimulai dengan mencari tahu hubungan ayat Al-Qur'an dengan berbagai kaitannya dengan ilmu pengetahuan modern. Misalnya ketika Al-Qur'an berbicara tentang gejala alam perlu pendekatan ilmu-ilmu kealaman, gejala makhluk kehidupan perlu pendekatan ilmu biologis, penciptaan manusia perlu kaitannya dengan kedokteran dan demikian seterusnya. Berikutnya, perlu pengungkapan nilai-nilai Islam (*Islamic Values*) yang terdapat pada ayat-ayat *kauniyah*.

2. Upaya Mewujudkan Kampus Religius

Salah satu cita-cita yang harus ditanamkan oleh pendidik agama di kampus adalah mewujudkan kampus religius. Untuk sampai kesana disadari sangat sulit, kendatipun sulit tetapi visi pendidik mesti diarahkan kesana.

Apa yang dimaksudkan dengan kampus religius itu, adalah suasana keberagamaan yang kental yang dapat diindikasikan antara lain:

a. Hidupnya praktek-praktek ibadah;
b. Kajian keagamaan yang intensif;
c. Munculnya toleransi kehidupan beragama;
d. Akhlak mulia menjadi primadona warga kampus;
e. Melahirkan produk-produk keagamaan, seperti buku, majalah, koran dan lain sebagainya.

Untuk menuju cita-cita ideal tersebut, maka diperlukan beberapa program strategis.

a. Menghidupkan pendidikan agama, tidak hanya terjebak dengan alokasi 2 SKS saja, tetapi dapat dibentuk kegiatan-kegiatan pendidikan agama di luar kelas. Hal ini memerlukan manajemen tersendiri.
b. Mempersiapkan sarana dan fasilitas yang memadai
c. Buku-Buku Keagamaan dilengkapi diperpustakaan khusus pendidikan agama
d. Unsur-unsur pimpinan, dosen, pegawai menjadi contoh teladan dalam kehidupan keseharian
e. Waspada terhadap segala sesuatu yang merongrong kehidupan beragama, baik dalam bentuk ideologis dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pendidikan agama di Perguruan Tinggi sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: faktor pendidik, peserta didik, kurikulum, metode sarana dan fasilitas, evaluasi, pendekatan yang dilakukan dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya adalah strategi pendekatan yang bagaimana yang dilakukan.

Ada beberapa segi pendekatan yaitu: Pendekatan integrited kognitif, afektif, psikomotorik, integrited sensual, rasional, etik, transendental, pendekatan dialogis, pendekatan sikap moderat dan integrited keilmuan.

Visi pendidikan agama di Perguruan Tinggi ini adalah bagaimana upaya untuk mewujudkan kampus religius dengan berbagai indikasi yang telah diuraikan.

E. PERANAN ETIKA AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBENTUK SIKAP ILMIAH

Kita hidup di era globalisasi, dunia kesejagatan, di mana batas-batas wilayah dalam makna kultur semakin menipis bahkan cenderung akan hilang. Gaya hidup mengglobal itu telah menjadi milik manusia secara bersama-sama pula. Di dalam kehidupan yang seperti itu maka tidak bisa dihindari akan terjadi saling pengaruh di antara budaya manusia. Sudah menjadi hukum alam apabila terjadi persaingan maka budaya yang kuatlah akan menang, sedangkan budaya yang lemah akan kalah dan mengikut kepada budaya yang kuat itu. Budaya yang kuat itu tidak pula lepas dari pengaruh atau power dari kekuatan peradaban bangsa yang menang tersebut. Karena itu terdapat signifikan bahwa budaya yang kuat itu

berasal pula dari negara-negar yang kuat baik dalam arti politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Budaya kesejagatan umat manusia kelihatannya semakin cenderung kepada budaya material, individual dan hedonis. Budaya-budaya tersebut, masuk menembus ke dalam kehidupan manusia yang tidak boleh tidak akan mempengaruhi pola hidup dan perilaku masyarakatnya. Budaya material itu berimplikasi kepada budaya konsumeris, yang akibatnya kebutuhan hidup semakin meningkat, banyak hal-hal yang pada dasarnya tidak begitu diperlukannya, tetapi justru di konsumsinya.

Dampak dari materialis adalah meningkatnya kebutuhan di luar kebutuhan utama manusia. Manusia mesti berupaya dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang terkadang di dalam pemenuhan kebutuan ini manusia tidak mempertimbangkan apakah itu bersumber dari yang halal atau tidak.

Dampak individualis, hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya pemuasan ego manusia, meninggalkan atau setidaknya kekurangan perhatian manusia terhadap manusia lainnya. Kemiskinan dan kebodohan yang melanda umat manusia di dunia sekarang begitu juga di Indonesia, menimbulkan pertanyaan kita, siapakah yang bertanggung jawab untuk melepaskan mereka dari kemelut tersebut.? Starategi memerangi kemiskinan dan kebodohan tidak mungkin dituntaskan tanpa diatur disusun strategi yang tepat. Pemberian "ikan "dalam hal ini tidak terlalu banyak manfaatnya, karena itu perlu pemberian "pancing". Untuk itu diperlukan manusia–manusia yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pertanyaannya

apakah kemiskinan yang melanda dunia dan Indonesia erat kaitannya dengan kekurang pedulian sebagian masyarakat yang memiliki wewenang dan kemampuan di lapangan ini untuk memiliki kepedulian kepada orang lain.

Kecenderungan hedonisme, merebak di penjuru dunia juga adalah gejala bahwa keinginan untuk mencapai kenikmatan hidup meningkat. Gejala merebaknya di masyarakat terutama generasi muda yang terlibat dalam narkoba adalah bukti nyata tentang itu, disamping meningkatnya penyimpangan seksual di kalangan masyarakat.

Selain dari faktor ekstern yang disebutkan di atas, faktor intern pun tidak kalah pentingnya untuk diketahui agar dapat dicarikan solusinya. Sudah sejak lama sebagian masyarakat kita diserang oleh penyakit lemahnya komitmen pribadi untuk menegakkan disiplin dan peraturan pada dirinya. Kelemahan itu berdampak kepada munculnya prilaku-prilaku tidak terpuji yang merupakan bagian tak terpisahkan dari etik itu sendiri.

Kelemahan disiplin diri, menyebabkan orang bekerja dengan tidak sungguh- sungguh. Kelemahan menegakkan aturan membuat orang dengan mudah melakukan berbagai kegitan yang secara akal sehat dan etik tercela. Prestasi dikalahkan oleh prestise, karena itu untuk mencapai prestise tidak jarang terjadi penyimpangan-penyimpangan.

1. Urgensi Etika Dalam Kehidupan Manusia

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat (Bertens, 1993 : 4). Perkataan lain yang identik dengan etika adalah moral berasal dari bahasa

latin *mos*, jamaknya *mores* yang juga berarti adat atau cara hidup. Dalam prakteknya antara etika dan moral terdapat perbedaan, moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada (Santoso, 2000 : 9).

Ethic (from Greek ethos 'character) is the systematic study of nature of value concepts. 'Good, 'bad ' 'ought', right, wrong, ets and the general principles which justify as in applying them to anything, also called moral philosophy (from latin mores, 'customs') The present article is not concerned with the history of ethic, but treats its general problems apart from their historical setting (Encyclopedia Bratenica, 1972:752).

Etika adalah pembahasan tentang baik dan buruk. Apa yang seharusnya dan selayaknya dilakukan dan apa pula yang tidak. Lillie menggolongkan etika sebagai ilmu pengetahuan normative yang bertugas memberikan pertimbangan prilaku manusia dalam masyarakat apakah baik atau buruk (Zubair, 1995 : 16).

Jika itu dikaitkan dengan akademik, maka berkenaan dengan sikap prilaku warga kampus terhadap apa yang harus dilakukan dan apa pula yang tidak. Ada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan mereka di dalam menjalankan perannya di kampus. Dunia akademik adalah dunia yang memiliki kekhasan, yang di dalamnya ada aturan-aturan main yang tidak boleh dilanggar. Seseorang akan tercela sebagai warga kampus apabila dia melakukan hal tersebut.

Secara umum kaedah etik dan moral berlaku bagi siapa saja dan di mana saja tanpa melihat profesinya. mencuri, merapok, serta korupsi di mana saja dan profesi apa saja perbuatan itu tetap tercela. Selain dari itu ada hal-hal khusus yang berlaku di lingkungan profesi tertentu yang apabila seseorang melakukannya sangat tercela. Misalnya di dunia Perguruan Tinggi seorang dosen plagiator dikatakan sangat tidak beretika.

Oleh karena persoalan etika ini amat urgen di Perguruan Tinggi, maka biasa sebuah perguraun tinggi itu membentuk sebuah badan yang bertugas membahas dan mengkaji tentang etika warganya, mungkin disebut namanya dengan"Dewan Kehormatan etika Akademik".

Di pandang dari sudut hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi baik dan buruk, maka sangat wajarlah bila ada aturan-aturan etik yang menjadi landasan di mana sesorang itu bertugas. Karena itulah muncul berbagai etika profesi. Etika profesi kedokteran, etika profesi hakim, dan lain-lain.

Urgensinya etika itu bagi manusia adalah didasari atas bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai kelebihan dan keistimewaan dari makhluk lainnya. Keistemewaan itu terletak pada berbagai kelebihan yang dimiliki manusia baik dari segi potensi lahir maupun bathin manusia. Dari kedua potensi itu lahir berbagai produk peradaban manusia. Peradaban manusia itu pada dasarnya adalah meningkatkan derajat dan posisi manusia di dunia ini. Peningkatan derajat manusia itu tidak lepas dari apabila mereka berpegang kepada kaedah-kaedah etik, moral atau akhlak.

Di pandang dari sudut bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, maka agar terjadi keharmonisan hidup manusia di

dunia ini ada aturan yang dipatuhi yang menyangkut tentang nilai *(value)* yaitu tentang baik dan buruk. Berbicara tentang baik dan buruk maka hal itu adalah bidang etika.

Etika mengandung norma-norma yang harus ditaati oleh manusia terlebih-lebih norma itu menyangkut hubungannya dengan orang lain. Kaharmonisan hubungan manusia akan terganggu apabila tidak ada norma etika yang dipedomani bersama untuk dipatuhi. Dengan demikian urgensi etika dalam kehidupan manusia sangat urgen.

2. Etika Akademik

Dalam buku Materi Dasar Pendidikan Pogram Akta Mengajar Buku I A Filsafat Ilmu, salah satu bagian yang dijelaskan adalah tanggung jawab ilmuan. Butir–butir yang terdapat pada tanggung jawab ilmuan itu identik dengan etika akademik yang harus dimiliki oleh seluruh civitas akademika di sebuah Perguruan Tinggi Penulis akan menjadikan hal tersebut menjadi acuan dalam membentangkan beberapa etika akademik yang harus dimiliki oleh seseorang ilmuan atau calon imuan (dosen dan mahasiswa) yakni :

a. Kebenaran, civitas akademika (dosen dan mahasiswa), mesti bertolak dari landasan kebenaran. Kebenaran di sini yang paling tidak dibagi kepada tiga jenis kebenaran. Pertama kebenaran ilmiah, kebenaran filasafat dan kebenaran agama Kebenaran ilmah. Yakni kebenaran pengungkapan berdasarkan prosedur ilmiah : ratio dan emperis *deduktif* dan *induktif.* Kebenaran filasafat kebenaran berdasarkan *reflective thingking* (berpikir murni), deduktif, kontemplatif, universal, sistematis dan beberapa persyaratan berpikir filsafat lainnya. Kebenaran agama berdasarkan kebenaran wahyu. Kebenaran wahyu merupakan salah satu bentuk kebenaran di samping kebenaran ilmiah dan fisafat.

b. Kejujuran. Kejujuran terkait erat dengan pengungkapan kebenaran. Hasil-hasil temuan ilmiah harus didasari atas kejujuran. Seorang ilmuan tidak boleh memanipulasi data berdasarkan selera dan keinginannya, tidak boleh menjadi plagiator, dan lain-lain yang menyimpang dari nilai-nilai obyektif.

c. Tanpa kepentingan langsung seorang. Hal ini terkait erat agar seseorang tetap konsisten berdasarkan kaedah–kaedah-kaedah ilmiah. Kepentingan yang ditonjolkan bukan kepentingan pribadi, akan tetapi apa kata temuan ilmiah itulah yang menjadi landasan utama.

d. Berdasarkan kepada kekuatan argumentasi. Seorang warga kampus, harus bertolak dari kekuatan argumentasi. Di sini dipentingkan adalah kekuatan hujjah, bukan otoritas politik atau otoritas person berdasarkan power yang tidak ada kaitannya dengan dunia ilmu.

e. Rasional, obyektif dan kritis. Rasional erat kaitannya mengemukakan pendapat berdasarkan logika berpikir yang benar. Didasari atas hujjah yang dapat dipertanggung jawabkan. Obyektif, tidak memihak, tidak bias, selalu berjalan di atas kaidah-kaidah ilmiah. Tidak berdasarkan atas suatu kepentingan tertentu kecuali kepenting ilmiah. itu sendiri. Kritis, memiliki keberanian untuk menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Sesuai dengan kaedah- kaedah ilmu pengetahuan.

f. Objektif.
g. Kritis.
h. Terbuka, bersedia mengkomunikasikan ilmunya secara terbuka, rela mendapat kritik dari pihak lain dan bersedia pula secara jujur menerima pendapat orang lain apabila itu benar.
i. Bersifat pragmatis, pemilihan objek penelahaan secara etis
j. Tidak merubah kodrat mansuia
k. Tidak merendahkan martabat manusia
l. Keseimbangan kelestarian alam lewat penggunaan kemanfaatan peningkatan ilmu cecara komunal
m. Universal (Depdikbud , 1984: 90)

Selain dari tanggung jawab ilmiah tersebut para ilmuan juga mesti memiliki sikap ilmiah, yaitu: pertama, tidak ada rasa pamrih *(disinterestedness)*, artinya sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmuah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. Kedua, selektif, yaitu sikap yang ditujukan agar para ilmuan mampu mengadakan pemilihan terhadap bebrapa hal yang dihadapi. Ketiga, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indra serta budi *(mind)*. Keempat, adanya sikap yang berdasar pada satu kepercayaan *(belief)* dan dengan merasa pasti *(conviction)* bahwa setiap pendapat atau teori telah mencapai kepastian. Kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa ilmuan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan sehingga selalu ada dorongan untuk riset. Keenam, seorang ilmuan harus memiliki sikap etis (akhlak) yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu dan untuk kebahagian manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara (Tem Dosen Filsafat Ilmu UGM , 1996 : 12).

Beberapa hal di atas adalah prinsip-prinsip dasar yang dipegangi oleh setiap insan akademik dan prinsip-prinsip itu harus menjadi acuannya dalam bertindak. Penyimpangan dari hal tersebut harus disadarinya bisa berdampak amat luas di masyarakat. Misalnya bila ada seorang akademisi menyimpulkan sebuah hasil penelitian yang disengaja direkayasa tidak berdasarkan kepada apa yang sesungguhnya, tentu dampaknya amat besar kepada masyarakat luas.

3. Metode Ilmiah

Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah atau metode keilmuan itu?. Metode ilmiah adalah pengetahuan yang diproses menurut kaedah-kedah dan syarat-syarat ilmiah. Landasan pokok dari kaedah ilmiah itu adalah prosedur pengungkapan kebenaran yang berdasarkan rational dan empiris.

Lahirnya metode ilmiah ini adalah untuk mendamaikan dua metode sebelumnya yang masing-masing menyatakan bahwa metodenyalah yang paling benar. Pertama metode rational. Menurut metode ini kebenaran itu adalah berdasar kepada kebenaran akal (ratio). Akal sebagai kunci dari pembuka kebenaran. Akan tetapi setelah dianalisa metode ini terdapat kelemahannya, yakni kebenaran yang dimunculkan bisa bersifat *slopsisme*, yaitu pengetahuaan yang benar menurut

anggapan kita masing-masing, Kenapa demikian ? sebab tidak ada yang akan menjadi hakim terhadap sesuatu yang dikemukakan seseorang secara rational. Selanjutnya berkembang pula aliran emperisme. Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran haruslah berdasar atas pengalaman langsung yang dialami manusia. Aliran ini pun tidak luput dari kelemahan. Sebab gejala yang terdapat dalam pengalaman kita baru mempunyai arti kalau kita memberikan tafsir terhadap gejala tersebut (Suriasumantri: 1981 : 11).

Oleh karena kedua aliran tersebut *(rationalisme* dan *emperisme)* mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka timbul pemikiran untuk menggabungkan kedua aliran tersebut, itulah yang dinamakan metode keilmuan atau metode ilmiah. Pendekatan rationalisme yang bersifat deduktif harus dilengkapi dengan pendekatan emperisme yang bersifat induktif. Pendekatan ilmiah bertolak dari permasalahan kemudian landasan teori yang diajukan hingga melahirkan hipotesis, dan selanjutnya hipotesis itu diuji kebenarannya atau ketidak benarannya secara emperis dan dari situ diambil kesimpulan.

Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ilmiah ini adalah :

a. Perumusan masalah
b. Penyusunan kerangka berpikir
c. Pengajuan hipotesis
d. Pengujian hipotesis
e. Penarikan kesimpulan (Lubis, 1994 : 22)

Di sini akan terjadi siklus *logico, hipotetico dan verifikasi*. Pada tahap pengajuan logika dan hipotesis seseorang berada pada kawasan berpikir deduktif (rasional), dan apabila telah masuk kekawasan verifikasi seseorang berada pada kawasan induktif (emperik). Setelah hasil-hasil temuan lapangan di peroleh maka hasil temuan lapangan itu dianalisa dan dalam menganalisa itu tentu menggunakan rasio.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah diuraikan kedua variabel di atas yaitu etika akademik dan sikap ilmiah, maka kita melihat pada dasarnya yang dibangun oleh etika akademiki itu adalah juga sikap ilmiah. Sikap ilmiah pada dasarnya bertolak dari kekonsistensian untuk melaksanakan kaedah-kaedah ilmiah. Dan hakikat dari sikap ilmiah adalah menjaga keobyektifan ilmu itu sendiri tentang apa yang dilahirkan oleh prosedur ilmiah itu. Sedangkan etika akademik itu juga adalah menjaga agar setiap ilmuan berjalan pada etik yang senantiasa menjaga keobyektifan ilmu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'ān Al-Karîm.

Abdullah, Abdur Rahman Saleh, *Educational Theory A Qur'ânic Out Look*, Makkah al-Mukarramah, Ummu Al-Qur'an, University, tt.

Al-'Ainâini, 'Ali Khalil Abu, *Falsafah At-Tarbiyyah, Al-Islâmiyyah fi Al-Qur'ân Al-Karîm*, Kairo, Dar Al-Fikri Al-'Arabi, 1980.

Al-Abrâsyî, Muhammad 'Atiyah, *At-Tarbiyyah al-Islâmiyyah wa Falâsifatuhâ*, Mesir, Isa Bâbi al-Halabi, 1975.

______________, *At-Tarbiyyah Al-Islâmiyyah*, Mesir, 'Isa Bâbi al-Halabi, 1964.

Al-Ahwâni, Ahmâd Fuâd, *Al-Tarbiyyah fî al-Islâm*, Kairo, Dâr al-Ma'ârif, tt.

Al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib, *The Concept of Education in Islam*, Kuala Lumpur, Muslim Youth Movement of Malaysia, 1983.

______________, *Aims and Objectives of Islamic Education*, Jeddah : King Abd. Aziz University, 1979.

As-Syaibâni, Omar Muhammad At-Tomy, *Falsafah Pendidikan*

Islam, Terjemahan Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

______________, Umar Muhammad At-Toumy, *Falsafah at-Tarbiyyah al-Islâmiyyah*, Trabulis, Asy-Syirkah al-Ammah, 1975.

Ashraf, Syed Ali, *New Horizone in Muslim Education*, Cambridge, Hodder and Stoughton, The Islamic Academy, 1985.

Azhar Arsyad (Ed.) *Islam & Perdamaian Global*, The Asian Fondation, Yogyakarta, 2002.

Azizy, Qadri, *Melawanan Globalisasi: Kontemplasi Ajaran Islam*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003.

______________, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman*, Ditpertais, Jakarta, 2003.

Azra, Azyumardi, *Abstraks Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Kulturalismen Indonesia*, Makalah, 2005.

Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN), Jakarta, 2001.

Chaplin, J.P, *Dictionary of Psychology*, New York, Dell Publishing, 1973.

Daulay, Haidar Purtra, *Dinamika Pendidikan Islam*, Cita Pustaka Media, Bandung, 2007.

______________, *Histarisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001.

______________, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikian Nasional*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Materi Dasar Program Akta Mengajar V*, Jakarta, 1983 /1984.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta, LP3ES, 1984.

Darajat, Zakiyah, *Pembinaan Dimensi Rohaniah Manusia dalam Pandangan Islam*, Makalah Seminar di IAIN Sumatera Utara Medan, September 1984.

____________, *Pembinaan Madrasah dan Perguruan Agama Lainnya Serta Permasalahannya*, Kertas Kerja Pada Musyawarah MP3A, Jakarta, Juli 1977.

First World Conference on Muslim Education, Jakarta, Inter Islamic University Cooperation of Indonesia, tt.

Goleman, Daniel, *Emotional Inteligensi*, Jakarta, Gramedia, 1997.

Harahap, Basyral Hamidi, *Siala Sampagul*, Bandung, 2004.

Hidayat, Komarudin, *Masyarakat Agama dan Masyarakat Madani*, Jakarta, 2002.

Husein, Syed Sajjed, Syed Ali Ashraf, *Crisis in Muslim Education*, Jeddah, King Abdul Aziz University, 1987.

Ibrahim, *Inovasi Pendidikan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Jakarta, 1988.

Kompilasi Perundangan Bidang Pendidikan, Jakarta: PT. Suka Buku, 2009.

Langgulung, Hasan, *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta, Pustaka Alhusna, 1986.

Lubis, Solliy, M., *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Logos, Jakarta, 1999.

____________, *Penelitian Kualitatif, Yogyakarta*, Rake Saeasin, 1989.

Marwati, Djoened Poesponegoro dan Nugroho Noto Susanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid I – IV*, Jakarta, PN, Balai Pustaka, 1984.

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Pendidikan Pesantren)*, Bogor, Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 1989.

Materi Dasar Pendidikan Program Akta Mengajar V, Buku III.B, *Pengembangan Kurikulum*, Jakarta, Proyek Pengembangan Institut Pendidikan Tinggi, Depdikbud, 1981.

Matondang, M. Yakub, dan Sahrin Harahap, *Struktur Keilmuan Islam*, Makalah Seminar di IAIN SU, Medan, 1998.

Meil, Alice, *Changing The Curriculum a Social Process*, New York, D. Appletion Centry Company, 1986.

Muhadjir, Noeng, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta, Rake Sarasin, cet I, Edisi IV, 1987.

Nakosteen, Mehdi, *Konstribusi Islam Atas Dunia Intelektual Barat*, Terjemahan. Joko S. Kahar dan Suprianto Abdullah, Jakarta, Risalah Gusti, 1996.

Nasr, Sayyid Hossen, *Science and Zivilization*, New York, New Amarican Library, 1970.

Nasution, Harun, *Pembaharu Dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992.

__________, *Pembaharuan Dalam Islam,* Jakarta, Bulan Bintang 1992.

Ogbu, Yohn, U., *Equlization of Educational Opportunity and Racial Ethnic,* dalam *Comprative Education*, Philips G. Altbacp, at. all. London: Mecmillan Publishing, 1982.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.

Rosyada, Dede, *Materi Kurikulum: Pendekatan dan Metode Pendidikan Agama (Islam) Dalam Prespektif Multi Kultural,* Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama, Ciloto Puncak, 15 Maret 2005.

Saylor, Galin, J and Alexander M Williem, *Curriculum Training for Better Teaching and Learning,* New York, Holt, Rinchat, 1960.

Santoso, Heru, *Landasan Etik Bagi Pengembangan Teknologi*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2000.

Second World Conference on Muslim Education, Recommendation, 1980.

Staphen, Romine, *Building of High School Curriculum,* New York, The Ronal Press Company, 1954.

Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, Jakarta, Sinar Harapan, 1985.

Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif,* Jakarta, Gramedia, 1985.

Suryabrata, Sumadi, *Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, Andi offcet, 1983.

Syalaby, Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam,* Terj. Mukhtar Yahya dan M.Sanusi Latief, Singapur: Pustaka Nasional, 1976.

Tampubolon, Daulat P., *Perguruan Tinggi Bermutu*, Jakarta, Gramedia, 2001.

Tasmara, Toto, *Kecerdasan Rohaniyah*, Jakarta, Gema Insani, 2001.

Tilaar, H.A.R, *Beberapa Agenda reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21,* Jakarta, Tiara Indonesia, 2001.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989, Surakarta: PT. Pabelan 1989.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Hidayakarya Agung,1979.

Zohar, Danah dan Ian Marshall, *SQ*, Bandung, Mizan, 2000.

Zubair, Ahmad Charis, *Kuliah Etika*, Jakarta, Grafindo Persada, 1995.

TENTANG PENULIS

Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, lahir di Singkuang, Mandailing Natal, tanggal 06 September 1949. Memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan, tahun 1977. Gelar Magister (S.2) diperolehnya dari Jurusan Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN "Sunan Kalijaga" Yogyakarta, tahun 1988, setelah sebelumnya menempuh pendidikan Purna Sarjana Dosen-Dosen se-Indonesia di IAIN yang sama, angkatan ke-8 tahun 1981-1982. Kemudian memperoleh gelar Doktor (S.3) juga dari IAIN "Sunan Kalijaga" Yogyakarta, tahun 1991. Pada tahun 1996 memperoleh kesempatan untuk mengikuti kursus manajemen di Universitas McGill Monteral Canada.

Penulis adalah dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan, mengasuh mata kuliah Sajarah Pendidikan Islam. Yang bersangkutan pernah aktif menjabat posisi penting di lingkungan IAIN Sumatera Utara, seperti: Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padang Sidempuan, tahun 1992-1997. Pembantu Rektor II IAIN Sumatera Utara Medan, tahun 1997-2001. Pembantu Rektor I IAIN Sumatera Utara Medan, tahun 2001-2005. Dan dikukuhkan sebaga Guru Besar

pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara dalam bidang Sejarah Pendidikan Islam pada tahun 1996.

Selain aktif mengelola Perguruan Tinggi, penulis juga produktif "menelorkan" beberapa tulisan, antara lain: *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah,* Tiara Wacana, Yogyakarta, 2000. *Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia,* Prenada Media Group, Jakarta, 2009. *Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan,* Cita Pustaka Media, Bandung, 2002. *Mauizhah,* Pemda Provinsi Sumatera Utara, 2002. *Qalbun Salim,* Rineka Cipta, Jakarta, 2009. *Dinamina Pendidikan Islam,* Cita Pustaka Media, Bandung, 2004. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional,* Prenada Media, Jakarta, 2004. *Pendidikan Islam di Asia Tenggara,* Rineka Cipta, Jakarta, 2009. *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

TENTANG EDITOR

Sahkholid Nasution, lahir di Gunung Manaon Kec. Barumun Tengah (sekarang Kec. Simangambat) Kab. Tapanuli Selatan (Sekarang Kab. Padang Lawas Utara), tanggal 02 Pebruari 1976. Memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) STAIN Batusangkar Sumatera Barat 1999, gelar Magister (S.2) diperolehnya dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Pascasarjana UIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta 2003.

Anak Kelima (bungsu) dari pasangan H. Daud Nasution dan Hj. Nurillah Hasibuan ini pernah nyantri di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Bangai Kec. Kota Pinang (Sekarang Kec. Torgamba) Kab. Labuhan Batu (Sekarang Kab. Labuhan Batu Selatan) Sumatera Utara selama 6 tahun (MTs. dan MA).

Suami dari Reni Maulina Siregar, S.Pd.I ini adalah dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan, mengasuh mata kuliah *'Ilmu al-Lughah* (Lingusitik Arab) dan juga tercatat sebagai dosen luar biasa di berbagai Universitas dan Sekolah Tinggi Islam di Kota Medan dan sekitarnya.

Ada sejumlah karya ilmiah yang bersangkutan yang sudah dipublikasikan, yaitu: *10 Entri* dalam *Ensiklopedi Haji*

dan Umrah, (Raja Grafindo Persada Jakarta 2002), *20 Entri* di dalam *Ensiklopesi Al-Qur'an Dunia Islam Medern*, (PT. Dana Bhakti Prima Yasa Yogyakarta 2003), *Bimbingan Studi Naskah (Membaca Kitab Standar/Gundul)* (Buku Ajar, 2004), *Tafsir Ayat-ayat Tauhid dan Sosial, (Tafsir-I)* (La Tansa Press-Medan, 2011 ber-ISBN), *Tafsir Ayat-ayat Hukam (Tafsir-II)* (La Tansa Press-Medan, 2011 ber-ISBN), المدخل إلى علم اللغة *Pengantar Linguistik (Analisis Teori-teori Linguistik Umum Dalam Bahasa Arab)*, (IAIN Press, 2010 ber-ISBN), *Tata Bahasa Arab* ([Terjemahan] Darussalam Pulishing-Medan, Edisi Kedua, 2011 ber-ISBN), تيسير اللغة العربية *Mudah Berbahasa Arab Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Jilid-I* (Cita Pustaka-Bandung, 2011 ber-ISBN), *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam,* Karya Dr. Armai Arief, MA (Editor, Ciputat Press-Jakarta, 2002 ber-ISBN), *Media Instruksional*, Karya Drs. Purbatua Manurung, M.Pd (Editor, Badan Penerbit Fak.Tarbiyah IAIN SU-Medan, 2011 ber-ISBN), *Filsafat Pendidikan Islam: Membangun Konsep Pendidikan Yang Islami*, Karya Salminawati, SS., MA (Editor, Cita Pustaka-Bandung, 2011).

Kapita Selekta

Pendidikan Islam di Indonesia

Kehadiran pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu kunci sukses terlaksananya Islamisasi di Indonesia. Perubahan agama dan kepercayaan bangsa Indonesia dari pemeluk agama Hindu, Budha dan Anismisme menjadi pemeluk Islam, tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari pendidikan Islam.

Buku ini terdiri dari topik-topik terpilih yang membahas dan mengungkap seputar persoalan-persoalan pendidikan Islam di Indonesia, baik dari aspek lembaga maupun pemikiran pendidikan Islam. Memuat enam kajian utama, yaitu: *Pertama,* Konsep, Hikikat dan Problematika Pendidikan Islam; *Kedua,* Pendidikan Islam Di Indonesia; *Ketiga,* Pembaharuan Pendidikan di Dunia Islam dan Indonesia; *Keempat,* Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Tantangan Globaliasi; *Kelima,* Pendidikan Agama dalam Prespektif Multi Kultural di Indonesia; Dan *Keemam,* tentang Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia.

PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI
Jl. Sosro No.16A Medan 20224, Tel 061-77151020
Fax 061-7347756 Email. perdanapublishing@gmail.com